



*Analisis*  
**Penerimaan dan  
Pengeluaran Publik**  
*Kabupaten Raja Ampat 2013*



AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)

**Australian  
Aid** 



**Analisis  
Penerimaan dan  
Pengeluaran Publik**  
*Kabupaten Raja Ampat 2013*

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



*Acknowledgement*

Laporan Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik/ *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) ini diterbitkan melalui kerjasama Yayasan BaKTI dengan Pemerintah Australia melalui Program *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation* (AIPD).

*Disclaimer*

Pandangan dan pendapat dalam laporan Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik/ *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) ini bersumber dari Yayasan BaKTI, dan tidak menggambarkan pandangan Pemerintah Australia.

# Kata Pengantar

## Direktur Program AIPD

Salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik untuk mendorong perbaikan pada layanan publik, *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation* (AIPD) bersama dengan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) melakukan penyusunan kajian penerimaan dan pengeluaran publik dalam bentuk laporan *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) di 20 kabupaten di Indonesia termasuk Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Laporan kajian PERA ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam penganggaran alokasi, pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis seperti halnya kemiskinan, kesetaraan gender, HIV/AIDS dan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang belum optimal. Sejalan dengan itu, laporan ini juga memberikan rekomendasi yang sangat relevan dan penting untuk dijadikan sebagai referensi dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat, khususnya dalam hal perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi untuk peningkatan sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, perikanan dan kelautan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kami kepada Tim Peneliti dari Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan peneliti senior dari Universitas Hasanuddin – Yayasan BaKTI Makassar yang telah bekerja keras untuk terwujudnya laporan ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang berperan penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi seluruh proses pembuatan laporan ini.

Kami mengharapkan bahwa laporan kajian PERA ini dapat berkontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan pemerhati keuangan dan pembangunan daerah demi terwujudnya perbaikan layanan publik melalui kebijakan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di Kabupaten Raja Ampat.

Direktur Program



**Jessica Ludwig-Maarooft**

# Kata Pengantar Bupati Raja Ampat

Pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana yang tertuan dalam Visi Pembangunan 2010-2015: Mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari Menuju Masyarakat yang Sehat, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan yang menjadi visi pembangunan Kabupaten Raja Ampat 2010-2015. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyadari bahwa upaya perbaikan-perbaikan di ketiga sektor tersebut perlu berjalan secara terpadu dimana peningkatan pendapatan diharapkan dapat berkontribusi kepada peningkatan status kesehatan dan pendidikan. Demikian pula sebaliknya, dengan pendidikan dan kesehatan yang baik akan tercipta angkatan kerja yang sehat dan berkualitas.

Disadari bahwa sebagai kabupaten yang relatif muda, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu berupaya lebih keras dan inovatif untuk mencapai visi pembangunan. Berbagai upaya telah diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Pemanfaatan potensi pariwisata, perikanan, dan kelautan untuk pemberdayaan ekonomi telah diinisiasi sejak beberapa tahun lalu. Perbaikan di sektor kesehatan dan pendidikan telah dimulai dengan melakukan penambahan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyadari bahwa perbaikan pada aspek pengelolaan keuangan daerah memegang peran penting dalam peningkatan kinerja di sektor-sektor prioritas. Untuk itu kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan AIPD bersama DJPK Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta UNIPA dan Yayasan BaKTI dalam melakukan Kajian Pendapatan dan Belanja Publik serit memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Raja Ampat. Kajian ini sangat membantu Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam melihat aspek-aspek pengelolaan keuangan daerah yang membutuhkan perhatian dan kerja keras.

Akhir kata, semoga publikasi ini dapat dijadikan salah satu referensi penting oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya-upaya yang mendukung terciptanya cita-cita Mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari Menuju Masyarakat yang Sehat, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Waisai, Desember 2013  
Bupati Raja Ampat



Drs. Marcus Wanma, M.Si

# Daftar Isi

	Halaman
<i>Acknowledgement/ Disclaimer</i>	ii
Kata Pengantar Direktur Program AIPD	iii
Kata Sambutan Bupati Raja Ampat	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Singkatan	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Karakteristik Daerah	2
1.2. Kinerja Ekonomi Makro	3
1.3. Kinerja Pembangunan Sosial	4
1.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	6
<b>BAB 2 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>7</b>
2.1. Analisis Perencanaan dan Penganggaran	8
2.2. Analisis Pelaksanaan Anggaran: Manajemen Kas, Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen Aset, Akuntansi dan Pelaporan, Hibah dan Investasi	9
2.3. Analisis <i>Oversight</i> dan <i>Accountability</i>	11
2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	11
<b>BAB 3 PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>13</b>
3.1. Stuktur Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat	14
3.2. Stuktur Pendapatan Asli Daerah	14
3.3. Stuktur Dana Perimbangan	17
3.4. Pembiayaan Daerah	21
3.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	22
<b>BAB 4 BELANJA DAERAH</b>	<b>23</b>
4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat	24
4.2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi	26
4.3. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Sektor	27
4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	28
<b>BAB 5 SEKTOR STRATEGIS</b>	<b>29</b>
5.1. Sektor Pendidikan	30
5.1.1. Belanja Sektor Pendidikan	30
5.1.2. Kinerja Luaran dan Hasil Sektor Pendidikan	31
5.1.3. Kesimpulan Rekomendasi	34
5.2. Kesehatan	34
5.2.1. Belanja Sektor Kesehatan	34
5.2.2. Kinerja Luaran dan Hasil Sektor Kesehatan	35
5.2.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	37
5.3. Sektor Infrastruktur	37
5.3.1. Belanja Sektor Infrastruktur	37
5.3.2. Kesimpulan dan Rekomendasi	38
5.4. Sektor Pariwisata, Perikanan dan Kelautan	39
5.4.1. Belanja Sektor Pariwisata, Perikanan dan Kelautan	39
5.4.2. Kinerja Luaran dan Hasil Sektor Pariwisata, Kelautan dan Perikanan	40
5.4.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	41
<b>BAB 6 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</b>	<b>43</b>
6.1. Analisis Kemiskinan dan Gender	44
6.2. Dana Otonomi Khusus	45

6.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	52
Lampiran	53
Lampiran A: Matriks Kesimpulan dan Rekomendasi	54
Lampiran B: Master Tabel	57
Lampiran C: Catatan Metodologi PERA	60

## Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Administratif Kabupaten Raja Ampat	2
Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2011	3
Gambar 1.3. Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB	3
Gambar 1.4. Komposisi Sektor dan Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier	3
Gambar 1.5. Perkembangan PDRB Riil Perkapita Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4
Gambar 1.6. Komposisi Penduduk Tahun 2011	4
Gambar 1.7. Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Gender	4
Gambar 1.8. TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Gambar 1.9. Nilai IPM Kabupaten Raja Ampat , Provinsi Papua Barat dan Indonesia, 2007-2011	5
Gambar 2.1. Kinerja PKD Kabupaten Raja Ampat	8
Gambar 3.1. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011 <sup>14</sup>	
Gambar 3.2. Postur Pendapatan Asli Daerah Ril Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011	15
Gambar 3.3. Postur Pajak Daerah Ril Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011	15
Gambar 3.4. Perbandingan Tren PAD Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten lainnya di Papua Barat	16
Gambar 3.5. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Ril Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat	16
Gambar 3.6. Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah Ril Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat	17
Gambar 3.7. Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan Ril Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat	18
Gambar 3.8. Perbandingan Realisasi DAU Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat	18
Gambar 3.9. Perbandingan Realisasi DAK Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat	19
Gambar 3.10. Perbandingan Realisasi Bagi Hasil Pajak Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat	20
Gambar 3.11. Perbandingan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat	20
Gambar 3.12. Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat	21
Gambar 3.13. Perkembangan Surplus/Defisit Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011	22
Gambar 4.1. Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat dan perbandingannya dengan Kabupaten Manokwari, Sorong Selatan, dan Fak-Fak; 2007-2011	24
Gambar 4.2. Perkembangan Rencana, Perubahan dan Realisasi Belanja Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011	24
Gambar 4.3. Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Riil Per Kapita Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2007-2011	25
Gambar 4.4. Dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Raja Ampat, 2011	25
Gambar 4.5. Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Raja Ampat,	26
Gambar 4.6. Komposisi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Raja Ampat	26
Gambar 4.7. Belanja Riil Sektor Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011	27
Gambar 4.8. Komparasi Belanja Riil Sektor Pendidikan Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Daerah lainnya	27
Gambar 5.1. Perkembangan Komposisi Belanja Riil Sektor Strategis Kabupaten Raja Ampat	30
Gambar 5.2. Perkembangan Komposisi Belanja Riil Sektor Pendidikan Kabupaten Raja Ampat	30
Gambar 5.3. Porsi Alokasi Belanja Riil Program Sektor Pendidikan Kabupaten Raja Ampat	31
Gambar 5.4. Tren ratio Murid - Sekolah dan Murid - Guru Kabupaten Raja Ampat	32
Gambar 5.5. Grafik APK dan APM Kabupaten Raja Ampat	32
Gambar 5.6. Angka Partisipasi Sekolah dan Lama Sekolah Kabupaten Raja Ampat	33

Gambar 5.7.	Angka Melek Huruf Kabupaten Raja Ampat	33
Gambar 5.8.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenis Kelamin, 2010	34
Gambar 5.9.	Alokasi Belanja Riil sektor Kesehatan di Kabupaten Raja Ampat	35
Gambar 5.10.	Persentase Balita Gizi Buruk Di Kabupaten Raja Ampat	35
Gambar 5.11.	Persentase Alokasi Belanja Di Kabupaten Raja Ampat	36
Gambar 5.12.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Di Kabupaten Raja Ampat	37
Gambar 5.13.	Persentase Alokasi Belanja Program kesehatan Di Kabupaten Raja Ampat	38
Gambar 5.14.	Persentase Alokasi Belanja Program Infrastruktur Di Kabupaten Raja Ampat	38
Gambar 5.15.	Persentase Alokasi Belanja Sektor Pariwisata, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Raja Ampat	39
Gambar 5.16.	Persentase Alokasi Belanja Sektor Pariwisata, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Raja Ampat	40
Gambar 5.17.	Perbandingan Produksi komoditas Unggulan Di Kabupaten Raja Ampat	40
Gambar 6.1.	Indeks Kemiskinan Kabupaten/Kota/Provinsi di Papua Barat	44
Gambar 6.2.	Indeks Pemberdayaan dan Pembangunan Gender Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, 2007-2010	45
Gambar 6.3.	Jumlah Dana Otonomi Khusus yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011	45
Gambar 6.4.	Tingkat Penyerapan, Pertumbuhan dan Alokasi Dana Otsus Kabupaten Raja Ampat	46
Gambar 6.5.	Proporsi Dana Otonomi Khusus terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011	46
Gambar 6.6.	Porsi Realisasi Dana Otsus untuk Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011	47
Gambar 6.7.	Realisasi Dana Otsus untuk Berbagai Program Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat tahun 2007-2011	47
Gambar 6.8.	Realisasi Dana Otsus untuk Berbagai Program Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan Menengah di Kabupaten Raja Ampat tahun 2007-2011	48
Gambar 6.9.	Nilai Nominal dan Proporsi Dana Otsus Sektor Kesehatan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011	48
Gambar 6.9.	Nilai Nominal dan Proporsi Dana Otsus Sektor Kesehatan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011	48
Gambar 6.10.	Proporsi Belanja Program Kesehatan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011	49
Gambar 6.11.	Proporsi Belanja Program Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat	49
Gambar 6.12.	Nilai Nominal dan Proporsi Dana Otsus Sektor Infrastruktur di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011	50
Gambar 6.13.	Proporsi Dana Otsus Perekonomian Rakyat untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2012	50
Gambar 6.14.	Proporsi Alokasi Dana Otsus Untuk Program Perekonomian Rakyat di Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2012	51
Gambar 6.15.	Proporsi Alokasi Dana Otsus Perekonomian Rakyat untuk Sektor Pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2012	51
Gambar 6.16.	Proporsi Alokasi Belanja Dana Otsus di Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2012	52

## Daftar Tabel

	Halaman	
Tabel 1.1.	Perbandingan Nilai Komponen IPM Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten lainnya serta Provinsi Papua Barat	6
Tabel 2.1.	Skor Penilaian Kerangka Peraturan Perundangan.	8
Tabel 2.2.	Skor Penilaian Perencanaan dan Penganggaran	9
Tabel 2.3.	Skor Penilaian Pelaksanaan Anggaran	9
Tabel 2.4	Skor Penilaian Sistem Akuntansi dan Manajemen	10
Tabel 2.5	Skor Penilaian Pengolahan Aset Daerah	10
Tabel 2.6	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Papua Barat, 2006-2011	11
Tabel 5.1.	Perkembangan Rasio Guru, Murid dan Sekolah Kabupten Raja Ampat Tahun 2007–2011	31
Tabel 5.2.	Sarana dan Prasarana Kesehatan Termasuk Tenaga Kesehatan	36
Tabel 5.3.	Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan Termasuk Tenaga Kesehatan	36



## Daftar Singkatan

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD-P	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APS	= Angka Partisipasi Sekolah
APK	= Angka Partisipasi Kasar
APM	= Angka Partisipasi Murni
AMH	= Angka Melek Huruf
AKI	= Angka Kematian Ibu
AKB	= Angka Kematian Bayi
AHH	= Angka Harapan Hidup
BPK	= Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	= Badan Pusat Statistik
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DAU	= Dana Alokasi Umum
DBH	= Dana Bagi Hasil
DPA SKPD	= Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah
DPPKAD	= Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HIV/AIDS	= Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome
IDG	= Indeks Pemberdayaan Gender
IHK	= Indeks Harga Konsumen
IPG	= Indeks Pembangunan Gender
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
ISPA	= Infeksi Saluran Pernapasan Akut
KIB	= Kartu Inventaris Barang
KIR	= Kartu Inventaris Ruang
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PDB/PDRB	= Produk Domestik Bruto / Produk Domestik Regional Bruto
PERA	= Public Expenditure and Revenue Analysis
PFM/PKD	= Public Finance Management / Pengelolaan Keuangan Daerah
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
PKD	= Pengelolaan Keuangan Daerah
RKA SKPD	= Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah
RKPD	= Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RMG	= Rasio Murid-Guru
RMS	= Rasio Murid-Sekolah
RPJMD	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT	= Rumah Tangga
SD/MI	= Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah
SDM	= Sumberdaya Manusia
SiLPA	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah
SK	= Surat Keputusan
SMA/SMK/MA	= Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah
SMA	= Sekolah Menengah Umum
SMP/MTs	= Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah
SLTP	= Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SOP	= Standar Operasional Prosedur
SPM	= Standar Pelayanan Minimal



# RINGKASAN EKSEKUTIF

**Kabupaten Raja Ampat memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat yang memiliki ratusan pulau dan garis pantai sekitar 753 km, ditambah lagi dengan ketersediaan sumberdaya alam berupa spesies ikan dan moluska yang tidak terdapat ditempat lainnya.** Luasan yang mencapai 8.034,44 km persegi didominasi oleh perairan sehingga memiliki daya tarik tersendiri terlebih pesona lautnya yang telah dikembangkan oleh pemerintah setempat sebagai tujuan wisata bahari sehingga Sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan, merupakan leading sektor perekonomian lokal yang memberikan kontribusi pada struktur penerimaan daerah.

**Pengelolaan sumberdaya kelautan melalui pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperluas ketersediaan lapangan kerja dan juga menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal di Raja Ampat.** Pemerintah Raja Ampat telah menetapkan jejaring enam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) melalui Perda no.27/2008 yang mencakup lebih dari 1,125 juta hektar. Kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan inti (*no-take zones*) mendukung restorasi habitat yang mengalami gangguan, melindungi tempat-tempat pemijahan ikan dan memulihkan populasi ikan sehingga keberlanjutan kegiatan perikanan subsisten dan komersial dalam jangka panjang dapat dipenuhi.

**Walaupun Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat berada dibawah rata-rata provinsi, namun tren pertumbuhannya mengalami peningkatan dengan kontribusi terbesar bersumber dari perikanan dan kelautan.** Berkembangnya sektor leading pariwisata, perikanan dan kelautan, telah memberikan dampak terhadap sektor jasa yang sudah memberikan share yang lebih besar terhadap perekonomian makro Kabupaten Raja Ampat yakni perdagangan hotel restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa lainnya yang mencapai 10 persen dari total output. Penataan terhadap pengembangan sektor leading tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi kabupaten Raja Ampat. Peningkatan peran leading sektor tersebut harus disertai dengan perbaikan infrastruktur yang ada sehingga secara terintegrasi akan mendorong sektor-sektor lainnya untuk berkembang dan di aspek lain akan memacu penyerapan tenaga kerja bagi sektor-sektor tersebut. Kondisi ini untuk menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan IPM Kabupaten masih berada dibawah Provinsi Papua Barat. Peningkatan IPM dapat dilakukan melalui peningkatan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan peningkatan perolehan pendapatan bagi masyarakat juga kesempatan akses terhadap sumberdaya alam yang tersedia oleh masyarakat lokal.

**Pentingnya sektor perikanan kelautan dan pariwisata maka perencanaan penganggaran untuk menunjang sektor tersebut perlu didukung dengan mekanisme penganggaran yang tepat dengan didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Raja Ampat.** Dalam pengalokasian penganggaran, proses pengelolaan keuangan daerah sebagai rangkaian dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan secara umum mencapai 65 persen. Pembenahan secara terintegrasi terhadap semua aspek perencanaan penganggaran daerah dapat dilakukan dengan memprioritaskan pada sektor ekonomi yang potensial sehingga akan diperoleh output pendapatan daerah yang semakin meningkat. Mekanisme ini perlu dilakukan mengingat Pendapatan riil Kabupaten Raja Ampat terhadap Provinsi Papua Barat cenderung menurun dan diikuti oleh penurunan PAD. Perolehan dana perimbangan secara umum cenderung meningkat dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2011. Porsi dana bagi hasil sumberdaya alam yang cenderung meningkat hingga tahun 2010 menunjukkan terjadi eksploitasi sumberdaya alam yang lebih besar pada kurun waktu tersebut. Kapasitas fiskal kabupaten Raja Ampat tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya terlebih yang berasal dari Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam kondisi ini akan memperparah eksploitasi sumberdaya Alam di Raja Ampat, sehingga dipandang penting untuk melakukan praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang lebih mengarah ke konsep *sustainability*.

**Total belanja yang cenderung defisit sepanjang tahun karena alokasi belanja pegawai dan belanja barang yang cenderung meningkat, dan hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan penganggaran perlu diperbaiki lagi sehingga pengalokasian belanja tepat sasaran.** Belanja langsung mendominasi alokasi belanja dari total belanja daerah. Rata-rata kontribusi dari belanja tidak langsung sebesar 23 persen dari total belanja daerah, dengan rata-ratanya sebesar Rp. 153 milyar, sedangkan belanja langsung sebesar 77 persen dari total belanja daerah, dengan rata-ratanya sebesar Rp. 502 milyar. Belanja riil berdasarkan klasifikasi ekonomi alokasi belanja daerah didominasi oleh belanja modal sebesar 49 persen. Selama lima tahun pertumbuhan alokasi belanja modal berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, sedangkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya mengalami fluktuasi serta cenderung stabil. Belanja Barang dan jasa mencapai 26 persen, belanja pegawai mencapai 21 persen dan sisanya sebesar 5 persen. Walaupun infrastruktur memiliki komposisi terbesar namun sejak tahun 2008

belanja riilnya mengalami penurunan dari Rp 311,6 milyar menjadi Rp 99,86 milyar ditahun 2011. Sektor pariwisata, perikanan dan kelautan yang merupakan leading sektor hanya memperoleh belanja riil sebesar 2 dan 3 persen dari total belanja Kabupaten Raja Ampat. Sektor strategis pendidikan hanya memperoleh 15 persen, kesehatan 9,5 persen, dan sektor infrastruktur sebesar 19,6 persen. Sektor utama tersebut harus memperoleh perhatian khusus sehingga dampaknya akan mempengaruhi kinerja ekonomi di Kabupaten Raja Ampat.

**Terbatasnya tenaga pengajar tidak hanya karena persoalan sedikitnya jumlah guru tetapi juga komitmen guru.** Banyak tenaga pengajar yang kurang komitmen terhadap tanggungjawab yang diberikan sehingga pada beberapa tempat proses belajar mengajar terbengkalai. Pada aspek lainnya terjadi beban tanggungjawab yang lebih besar pada sebagian guru, sehingga pada beberapa kasus dijumpai ketidak efektifan seorang guru yang harus berada pada beberapa kelas dalam waktu bersamaan. Ditinjau dari kondisi geografis jumlah sarana sudah tergolong cukup baik untuk gedung sekolah SD, SMP dan SMK tetapi perbandingan tenaga pengajar kurang memadai, bahkan terdapat gedung sekolah yang belum memiliki tenaga guru yang tetap. Untuk anak pra sekolah (TK) belum mendapatkan porsi yang cukup apabila dibandingkan dengan jumlah distrik di Raja Ampat.

**Kesehatan masyarakat kurang terlayani dengan baik ditinjau dari keharusan pemerintah daerah dalam penyediaan Standart Pelayanan Minimum.** Peningkatan perbaikan kesehatan dari dana tersebut masih tergolong rendah karena perbandingan jumlah penduduk, tenaga kesehatan serta sarana kesehatan belum memadai, sebaran dokter dan tenaga medis belum merata. Idealnya di setiap puskesmas tersedia dokter dan di setiap kampung tersedia tenaga bidan, akibatnya masyarakat yang mengalami sakit harus berobat ke kota lain yang biayanya cukup tinggi atau setidaknya keterpaksaan dengan cara tradisional, sehingga Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Raja Ampat sebesar 65,75 persen, berada dibawah rata-rata Provinsi. Pada aspek lainnya Kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Raja Ampat secara umum belum berjalan secara maksimal, umumnya masyarakat belum dapat terlayani secara maksimal oleh pelayanan kesehatan sebab kurangnya tenaga medis, peralatan kesehatan dan sulitnya medan pelayanan.

**Ketersediaan sarana dan prasarana masih minim khususnya bagi kepentingan masyarakat.** Kapal merupakan salah satu alat transportasi utama masyarakat walaupun sangat minim, dan jenis transportasi umum semacam angkola (angkutan laut) yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dari distrik ke distrik bahkan antar pulau biayanya cukup tinggi.

Sektor perikanan perlu dikembangkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mendorong perekonomian (dibold). Sebagian besar penduduk Raja Ampat bekerja di sektor perikanan, untuk itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pemerintah perlu melakukan beberapa strategi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemasaran perikanan. Akses pemasaran hasil perikanan juga perlu di tata karena kesejahteraan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi namun juga hasil perikanan. Informasi mengenai pariwisata masih terbatas pada keindahan alamnya, namun penataan infrastruktur belum dilakukan dengan memadai.

**Tingkat kemiskinan di Kabupaten Raja Ampat mencapai 23,6 persen dan berada lebih rendah dari Provinsi Papua Barat.** Walaupun berada pada level bawah, namun selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan indeks kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Raja Ampat berada di bawah rata-rata Provinsi Papua Barat. Jumlah penduduk miskin di Papua Barat sebanyak 10 ribu jiwa dari 212,2 ribu jiwa. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa Kabupaten Raja Ampat menduduki peringkat dua terendah .

**Alokasi dana otonomi khusus di Kabupaten Raja Ampat selama tahun 2007 hingga tahun 2011 mengalami fluktuasi setiap tahunnya.** Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, menyebabkan pengelolaan dana otonomi khusus tidak hanya di lakukan oleh pemerintah Provinsi Papua tetapi juga oleh pemerintah Provinsi Papua Barat yang mulai mengelola dana otsus sejak tahun 2009 hingga saat ini.

Walaupun Kabupaten Raja Ampat memiliki penduduk miskin dibawah rata-rata Provinsi Papua Barat yang mencapai 14,3 persen dan tingkat pengangguran terbuka yang cukup sebesar 5,53 persen namun memiliki IPM yang tergolong rendah diwilayah Papua Barat. Pada aspek lainnya tingkat keterlibatan perempuan mengalami peningkatan walaupun terjadi peningkatan kualitas di tahun 2011. Dalam menunjang kesejahteraan masyarakat program-program pendidikan dan kesehatan dan ekonomi kerakyatan belum

mampu menyentuh sasarannya apalagi dengan adanya tambahan dana Otsus Papua. Pengalokasi belanja untuk menunjang pembangunan di kabupaten Raja Ampat melalui perencanaan penganggaran belum dilakukan secara memadai sehingga pada setiap tahunnya antara rencana dan realisasi memiliki perbedaan yang cukup besar bahkan bisa melebihi dari rencana anggaran. Tambahan dana Otsus Papua rata-rata melebihi dari rencana semula walaupun terdapat 3 tahun yang tidak mencapai target, bahkan peruntukannya belum sesuai dengan Undang-undang Otsus Papua, terlebih lagi dari sisi pelaporan keuangan daerah masih mengalami keterlambatan sehingga pencairan dana tahap berikutnya mengalami keterlambatan.

**Rekomendasi yang dapat diambil untuk menanggulangi hal seperti tersebut diatas antara lain :**

- Perencanaan yang terintegrasi berdasarkan RPJMD harus didukung oleh tim perencana yang fleksibel yang tidak ego sektoral sehingga masing-masing urusan atau SKPD dalam merencanakan programnya terfokus pada RPJMD tersebut.
- Peningkatan kemampuan perencanaan penganggaran daerah harus dilakukan mengingat SDM yang tersedia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang tugas.
- Kelengkapan Dokumen Tupoksi masing-masing SKPD harus dibenahi sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggungjawab.
- Penyusunan masterplan pengentasan kemiskinan dapat menjadi acuan setiap SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD dapat mengacu kepada dokumen tersebut.
- Prioritas alokasi otonomi khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan, perlu dibenahi lagi dan lebih difokuskan pada wilayah yang sulit dijangkau. Sehingga dengan adanya otonomi khusus maka keterjangkauan wilayah dapat diakses dan aktivitas perekonomian akan berjalan dengan baik tanpa adanya kepincangan distribusi pendapatan, pendidikan, kesehatan.

1

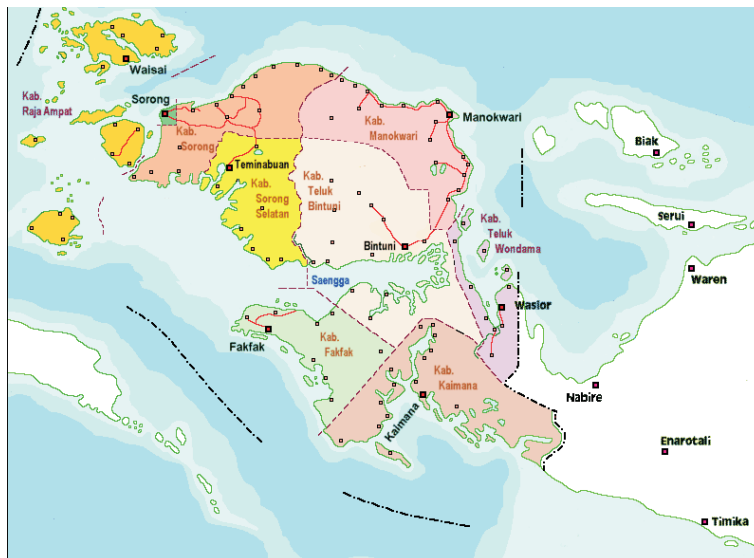


# PENDAHULUAN

## 1.1. Karakteristik Daerah

Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas empat pulau besar dan 610 pulau kecil. Dari jumlah tersebut, 35 pulau diantaranya berpenghuni. Sebagian pulau bahkan belum memiliki nama. Kabupaten Raja Ampat memiliki panjang garis pantai mencapai 753 km. Kabupaten Raja Ampat terdiri atas 24 kecamatan dengan luas wilayah 8.034,440 Km<sup>2</sup>. Empat pulau besar di Kabupaten Raja Ampat adalah Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati dan Pulau Misool. Pulau Waigeo memiliki topografi bergunung dan berbukit pada bagian poros tengah sampai ke daerah pesisir, dan terdiri atas batu karang dan pasir, serta dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau Batanta memiliki topografi pegunungan dan perbukitan yang memanjang dari bagian tengah sampai pesisir. Pulau Salawati dikelilingi oleh pulau-pulau kecil terutama pada bagian selatan dan timur, dan pada daratan bagian tengah sampai pesisir dikelilingi gunung dan perbukitan yang membujur ke semua arah. Pulau Misool memiliki topografi yang hampir sama dengan ke tiga pulau besar lainnya dimana pada bagian barat dan selatan dikelilingi oleh pulau-pulau kecil dan pada bagian tengah terdapat pegunungan sedangkan di bagian barat dan selatan merupakan perbukitan bebatuan.

Gambar 1.1. Peta Administratif Kabupaten Raja Ampat



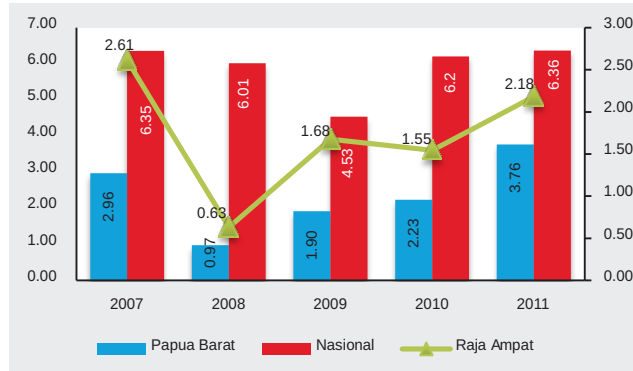
Potensi keanekaragaman biota dan sumber daya laut Kabupaten Raja Ampat telah menjadi obyek penelitian. Jhon Veron (ahli karang Australia), Gerry Allen (Conservation International) dan Fred Wells (ahli Moluska Australia) dibantu oleh staff P2O LIPI Biak, telah mengidentifikasi kekayaan biota laut Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jumlah spesies yang ditemukan sebanyak 1.104 jenis ikan dan 699 jenis moluska (hewan lunak) serta 537 jenis hewan karang. Biota laut dan keanekaragaman terumbu karang, hamparan padang lamun, hutan mangrove dan pantai tebing yang berbatu indah merupakan bagian dari kekayaan yang banyak dikenal. Kekayaan tersebut telah menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi kalangan perguruan tinggi maupun peneliti, sehingga pengembangan laboratorium alam sebagai pusat ilmu pengetahuan akan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Raja Ampat.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 adalah “Mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari Menuju Masyarakat yang Sehat, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan”. Salah satu aspek yang menjadi prioritas adalah meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi bahari dan sumberdaya lainnya. Ini sesuai dengan kondisi masyarakat Raja Ampat yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam, terutama sumberdaya kelautan. Pesona alam Raja Ampat terutama pesona lautnya yang didukung oleh keberagaman potensi seni dan budaya masyarakat merupakan keunggulan yang dimiliki Raja Ampat yang dikembangkan sebagai tujuan wisata bahari. Sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan, merupakan *leading sector* perekonomian lokal yang memberikan kontribusi pada penerimaan daerah.

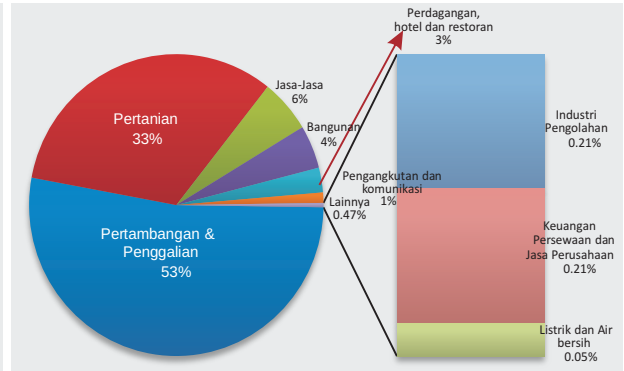
## 1.2. Kinerja Ekonomi Makro

**Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Raja Ampat relatif rendah dan cenderung berfluktuasi selama lima tahun terakhir.** Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,97 persen dan berada di bawah kabupaten lainnya, provinsi maupun Nasional. Namun pada tahun 2009 mulai mengalami peningkatan hingga tahun 2011. Capaian pada tahun 2011 bahkan telah melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat walaupun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional.

Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2011



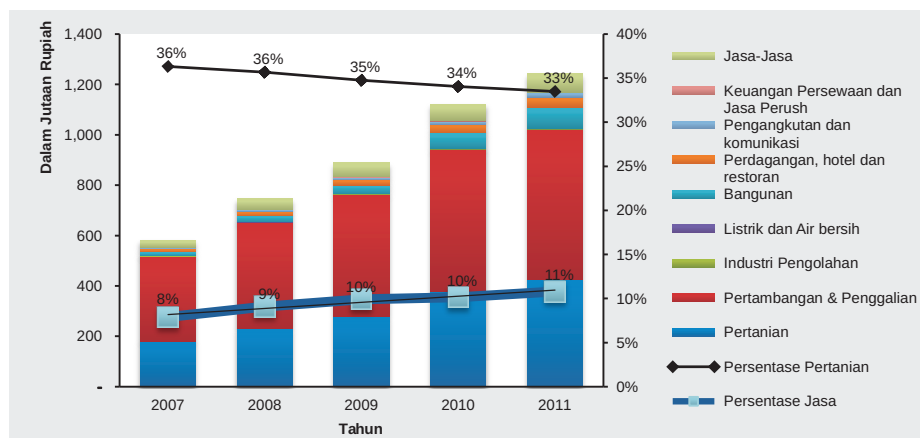
Gambar 1.3. Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

**Sektor pertanian pertumbuhannya mulai menurun sedangkan secara perlahan sektor jasa mengalami pertumbuhan.** Sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Raja Ampat dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 33,0 persen dan 53 persen selama lima tahun terakhir. Sektor tersier yaitu sektor jasa yang terdiri atas sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan dan jasa lainnya hanya sekitar 11 persen dari total PDRB. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan dari 36 persen menjadi 33 persen, dan sebaliknya, sektor jasa mengalami peningkatan dari 8 persen menjadi 11 persen selama periode 2007-2011. Ini menandakan terjadinya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor jasa, meskipun relatif lambat. Pergeseran tersebut berlangsung akibat berkembangnya sektor jasa sebagai respons dari perkembangan aktivitas di sektor pariwisata dan sektor perikanan dan kelautan. Kondisi ini telah berdampak terhadap terjadinya migrasi tenaga kerja ke Kabupaten Raja Ampat untuk bekerja pada sektor jasa, dan pada saat yang sama, terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor tersier. Pada aspek lain, berkembangnya sektor tersier juga terkait dengan keberadaan 7 (tujuh) kawasan konservasi, yaitu KKPD Ayau-Asia, KKPD Wayag-Sayang, KKPD Teluk Mayalibit, KKPD Selat Dampire, KKPD Kofiau, KKPD Misool Timur Selatan, dan KKPD Waigeo Barat Daya. Ditetapkannya ketujuh kawasan konservasi ini, telah mengurangi aktivitas eksploitasi terhadap sumberdaya kelautan.

Gambar 1.4. Komposisi Sektor dan Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier.

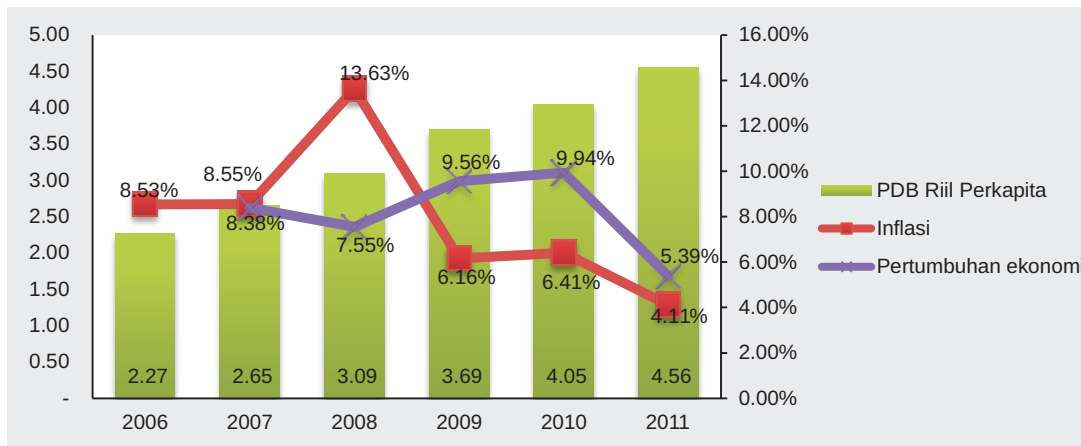


Sumber : BPS Papua Barat 2007 – 2011



**PDRB perkapita selama lima tahun cenderung meningkat akibat peningkatan PDRB yang bergerak lebih cepat ketimbang peningkatan jumlah penduduk.** Selama periode 2007-2011, PDRB meningkat rata-rata 1,8% persen per tahun, sedangkan jumlah penduduk meningkat rata-rata 1,5 persen per tahun. Akibatnya, PDRB per kapita rata-rata meningkat 15% persen per tahun. Secara riil, PDRB per kapita juga cenderung meningkat akibat menurunnya tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Kabupaten Raja Ampat relatif lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat.

Gambar 1.5. Perkembangan PDRB Riil Perkapita Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah



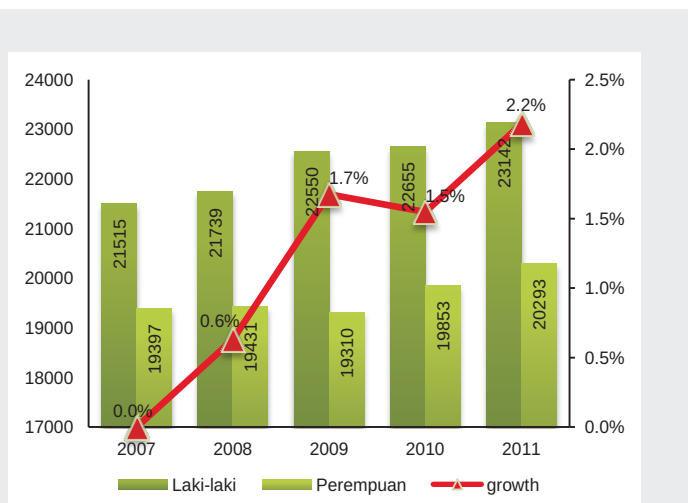
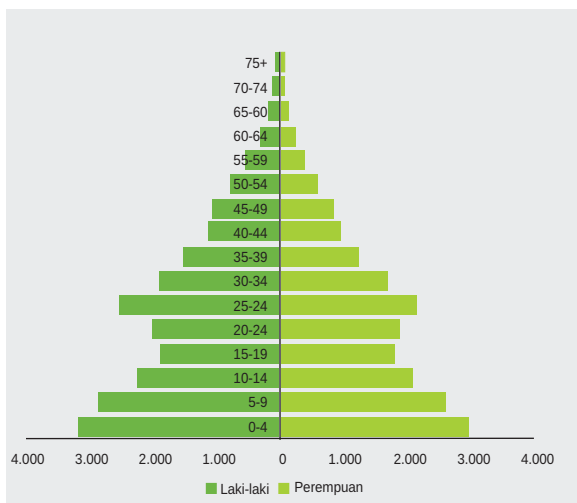
Sumber: BPS, terbitan 2006-2012, data diolah

### 1.3. Kinerja Pembangunan Sosial

Sejak dibentuknya Kabupaten Raja Ampat sebagai wilayah otonomi baru, jumlah penduduk cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat sebesar 40.912 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 43.436 jiwa pada tahun 2011 atau meningkat rata-rata 1,5 persen pertahun. Dari jumlah tersebut, 46 persen perempuan dan 54 persen laki-laki. Berdasarkan komposisi umur penduduk, kelompok umur 0-4 tahun mencapai 14,5 persen, anak usia sekolah (SD dan SMP) mencapai 23,1 persen dan kelompok usia kerja dan pencari kerja (20 s.d 29 tahun) mencapai 20,3 persen atau sekitar seperlima dari total penduduk. Peningkatan jumlah penduduk seiring dengan peningkatan jumlah rumah tangga. Pada tahun 2011, jumlah rumah tangga telah mencapai 9.746 KK. Peningkatan yang tajam terjadi pada 2009 yaitu sebanyak 1.122, yang didominasi oleh migran. Setiap rumah tangga rata-rata terdiri atas 4-5 orang. Fenomena migran masuk di Kabupaten Raja Ampat terjadi pada kelompok usia 20-30 tahun sebagai tenaga kerja.

Gambar 1.6. Komposisi Penduduk Tahun 2011

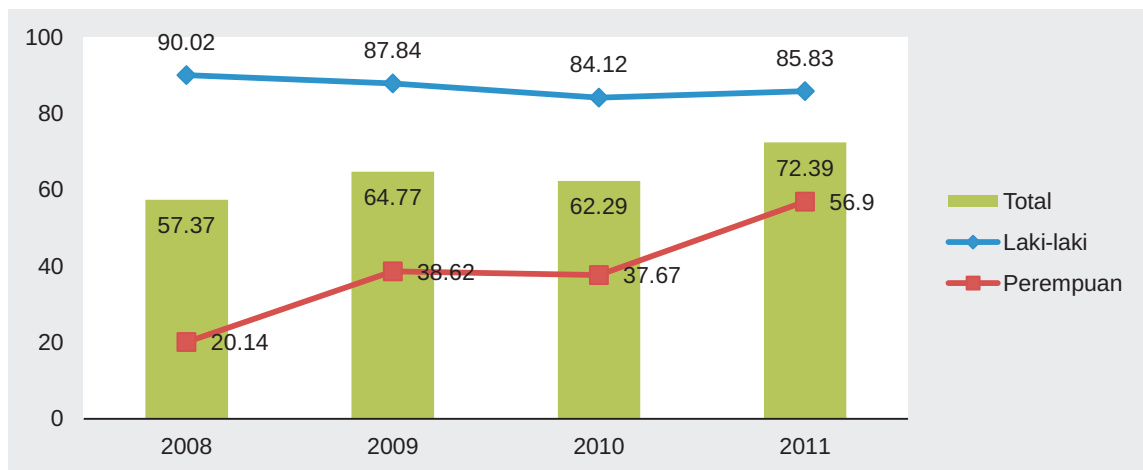
Gambar 1.7. Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Gender



Sumber: BPS, terbitan 2007- 2011, data diolah

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir.** Ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja dan siap untuk memasuki pasar kerja. TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan, namun TPAK perempuan meningkat signifikan terutama pada tahun 2011, dan sebaliknya, TPAK laki-laki cenderung menurun. Berkembangnya sektor jasa, yang memiliki kecenderungan untuk menyediakan kesempatan kerja bagi perempuan, telah memberi dampak terhadap peningkatan TPAK perempuan. Kecenderungan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja perempuan melalui lembaga-lembaga formal maupun non-formal.

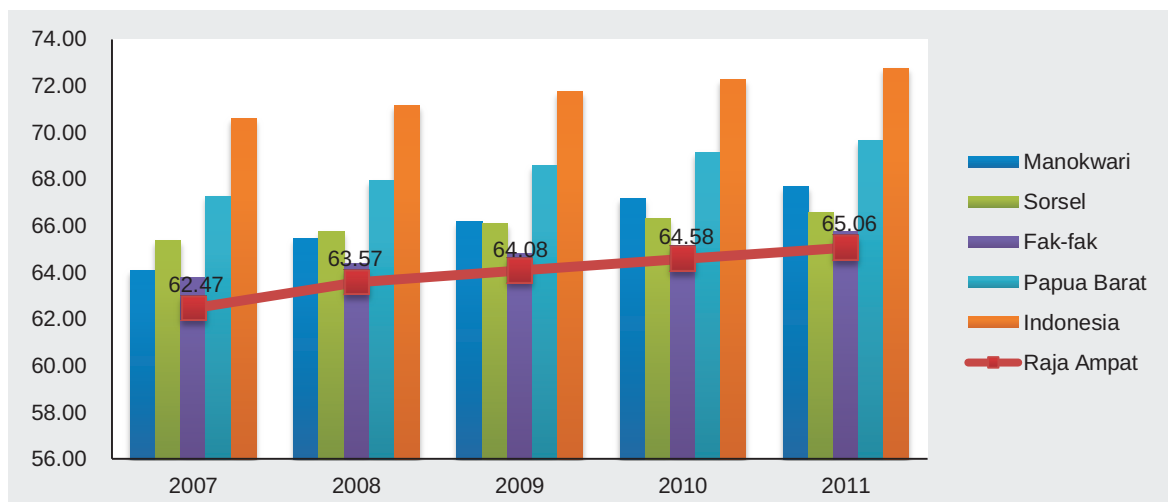
Gambar 1.8. TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

**Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Raja Ampat relatif rendah.** Pada periode 2007-2011, nilai IPM Kabupaten Raja Ampat berada di bawah Nasional, Provinsi Papua Barat dan tiga kabupaten lain wilayah kerja AIPD. IPM Kabupaten Raja Ampat juga mengalami peningkatan yang relatif lambat. Selama periode 2007-2011, IPM Kabupaten Raja Ampat hanya meningkat 2,59 poin. Jika diamati komponen pembentuk IPM Kabupaten Raja Ampat, maka angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat masih lebih rendah dari kabupaten lainnya dan provinsi. Namun angka melek huruf sudah lebih tinggi dari provinsi dan kabupaten lainnya. Oleh karena itu upaya peningkatan IPM dapat dilakukan melalui peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Gambar 1.9. Nilai IPM Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dan Indonesia tahun 2007-2011



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

Tabel 1.1. Perbandingan Nilai Komponen IPM Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten lainnya serta Provinsi Papua Barat

Kabupaten	AHH (tahun)		AMH (%)		MYS (tahun)		PPP (Rp.000)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Fakfak	70,52	70,88	97,46	98,13	9,27	9,37	589,06	592,30
Manokwari	68,00	68,29	87,79	88,77	8,37	8,43	588,30	589,12
Sor Sel	66,66	66,82	88,32	88,43	7,98	8,06	588,85	590,23
<b>Raja Ampat</b>	<b>66,17</b>	<b>66,50</b>	<b>93,62</b>	<b>94,13</b>	<b>7,35</b>	<b>7,43</b>	<b>560,70</b>	<b>562,22</b>
Papua Barat	68,51	68,81	93,19	93,39	8,21	8,26	596,08	599,28

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2012

## 1.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang berpotensi memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah melalui sektor pariwisata dan perikanan dan kelautan. Dengan dikukuhkannya Raja Ampat sebagai bagian dari “*Triangle Coral*” Dunia telah memicu meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan domestik dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini telah mendorong berkembangnya sektor jasa seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Akibatnya, perekonomian Kabupaten Raja Ampat mengalami pergeseran struktur dari sektor primer ke sektor jasa, dan pada gilirannya, meningkatkan TPAK, khususnya perempuan.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia menjadi salah satu tantangan utama pembangunan Kabupaten Raja Ampat. Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat menempati posisi kedua terbawah setelah Kabupaten Tamborai. Rendahnya IPM Kabupaten Raja Ampat dikontribusi oleh rendahnya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu memberi perhatian serius terhadap peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

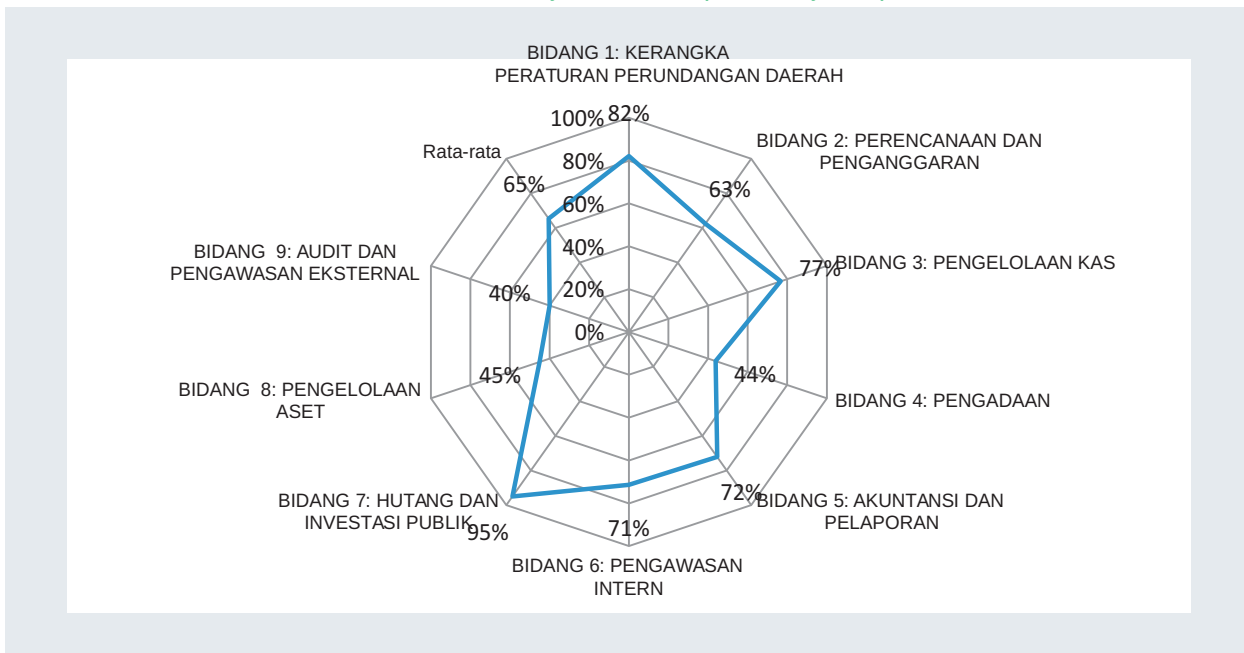
2



## **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Secara umum pengelolaan keuangan daerah (PKD) di Kabupaten Raja Ampat yang mencakup aspek perencanaan & penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan akuntabilitas keuangan telah terlaksana dengan cukup baik. Penilaian terhadap seluruh aspek PKD menghasilkan skor rata-rata sebesar 65% (kategori cukup baik). Aspek yang memperoleh penilaian paling lemah adalah audit dan pengawasan eksternal dengan skor 40%, selanjutnya pengadaan barang dan jasa dengan skor 40% dan pengelolaan aset skor 45%, sedangkan aspek lainnya pada kisaran angka antara 63% sampai 77%. Capaian tersebut di atas mengindikasikan masih perlu dilakukan pembenahan secara terintegrasi terhadap sebagian besar aspek PKD agar dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

Gambar 2.1. Kinerja PKD Kabupaten Raja Ampat



Sumber: Hasil Survey Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Raja Ampat (2012)

## 2.1. Analisis Perencanaan dan Penganggaran

Kerangka peraturan perundangan yang mendukung perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien sudah cukup memadai. Kerangka perundangan yang mendukung perencanaan dan penganggaran sudah terpenuhi sebanyak 18 indikator dari 21 indikator yang dipersyaratkan. Walaupun Perkada mengalami keterlambatan pengesahan, namun RKA selalu mengacu pada peraturan yang dibuat. Peraturan perundangan daerah tentang transparansi dan partisipasi masyarakat dan akses masyarakat terhadap sidang-sidang DPRD belum dipenuhi. Belum efektifnya fungsi organisasi pengelolaan keuangan daerah sehingga ketentuan tentang transparansi dan partisipasi masyarakat belum dapat dipenuhi.

Tabel 2.1 Skor Penilaian Kerangka Peraturan Perundangan.

OUTCOMES	Total Angka Sasaran	Total Angka pencapaian	Persentase pencapaian
Kerangka Peraturan Perundangan pengelolaan keuangan daerah	15	13.25	88%
Peraturan Perundangan Penegakan Hukum dan Struktur Organisasi	3	3.00	100%
Peraturan Perundangan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat	3	1.00	33%
Rata-rata	21	17,25	74%

Sumber: Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

Penyusunan anggaran yang realistis sudah dilakukan secara komprehensif namun masih perlu dibenahi pada aspek sinkronisasi perencanaan dan penganggaran multi tahun dengan kebijakan umum anggaran (KUA). Indikator perencanaan dan penganggaran multi-tahun belum sepenuhnya disinkronkan dengan Kebijakan Umum APBD. Sinkronisasi penyusunan anggaran berdasarkan kinerja dapat

dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, dan analisis standar biaya serta SPM. SPM dan analisis standar biaya dapat memberikan kesinambungan penganggaran yang jelas dan realistis terhadap sasaran, program dan penganggaran multi-tahun. Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dilakukan secara memadai sehingga kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS masih perlu diperbaiki.

Tabel 2.2 Skor Penilaian Perencanaan dan Penganggaran

OUTCOMES	Total Angka Sasaran	Total Angka Pencapaian	Persentase Pencapaian
Tersusunnya perencanaan dan penganggaran multi-tahun	6	4.5	75%
Target Anggaran yang Layak dan Realistis	5	4.5	90%
Sistem Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif yang Komprehensif	5	1	20%
Rata-rata		3.3	62%
TOTAL	16	10	63%

Sumber: Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

## 2.1. Analisis Pelaksanaan Anggaran: Manajemen Kas, Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen Aset, Akuntansi dan Pelaporan, Hibah dan Investasi

Secara umum pelaksanaan anggaran yang meliputi pengelolaan kas, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, akuntansi dan pelaporan serta investasi, hibah dan hutang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Indikator pelaksanaan anggaran yang unsurnya meliputi pengadaan barang dan jasa; investasi, hibah dan hutang; akuntansi dan pelaporan; manajemen aset; serta manajemen kas dengan indikator sebanyak 95 item, sudah dapat terpenuhi sebanyak 62 indikator atau 65 persen. Kondisi ini menyebabkan praktik pelaksanaan anggaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel dapat dilakukan dengan baik walaupun masih perlu pembenahan terhadap beberapa komponen dari aspek pelaksanaan anggaran.

Pendapatan dan pengeluaran kas telah dikelola dengan cukup efisien, namun masih perlu pembenahan kearah yang lebih baik. Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang optimal mensyaratkan pemenuhan 30 indikator, namun untuk kondisi di Kabupaten Raja Ampat baru terpenuhi sebanyak 23 indikator atau dengan skor 77%. Pengelolaan kas yang perlu ditingkatkan seperti peningkatan penanganan penerimaan dan pembayaran kas. Anggaran kas yang dibuat didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) namun belum dilengkapi dengan analisis potensi PAD yang memadai. Peningkatan kapasitas terhadap staf pengelola keuangan sering dilakukan namun belum disinkronkan dengan tupoksi. Pengelolaan kas dapat menjadi efisien dengan menyusun anggaran kas yang baik, sehingga dapat diketahui kapan dan untuk apa dana perlu dikeluarkan serta kapan dan dari mana dana akan diterima.

Tabel 2.3 Skor Penilaian Pelaksanaan Anggaran

OUTCOMES	Total Angka Sasaran	Total Angka Pencapaian	Persentase pencapaian
Kebijakan, Prosedur, dan Pengendalian untuk Mendorong Pengelolaan Kas	11	9	82%
Penerimaan Kas, Pembayaran Kas, Serta Surplus Kas Temporer Dikelola dan Dikendalikan Secara Efisien	7	4.5	64%
Terdapat Sistem Penagihan dan Pemungutan Pendapatan Daerah yang Efisien	7	6.5	93%
Peningkatan dan Penanganan Manajemen Pendapatan	5	3	60%
Rata-rata			75%
TOTAL	30	23	77%

Sumber: Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

**Pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Raja Ampat memiliki kinerja yang relatif kurang baik. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat belum menerapkan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa seperti belum menerapkan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).** Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah: a) setiap panitia pengadaan barang dan jasa harus memiliki sertifikat pengadaan; b) pengumuman tender dilakukan melalui koran lokal dan atau LPSE daerah; c) harus ada informasi daftar hitam rekanan yang nakal. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum transparan dan pengawasan yang belum optimal menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Sistem informasi akuntansi dan manajemen belum terintegrasi secara memadai sehingga belum menjamin terlaksananya pencatatan seluruh transaksi secara akurat dan tepat waktu.** Transaksi keuangan yang diproses melalui penerapan sistem akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, wajar, dan tepat waktu. Ada 19 indikator yang disyaratkan, namun hanya bisa dipenuhi 13 atau hanya 72 persen. Kondisi ini disebabkan oleh kapasitas SDM dan kelembagaan fungsi akuntansi dan keuangan belum memadai. Fungsi akuntansi dan keuangan SKPD belum berjalan sesuai dengan sistem akuntansi karena, staf penatausahaan akuntansi masih memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi teknis di bidang akuntansi.

**Tabel 2.4 Skor Penilaian Sistem Akuntansi dan Manajemen**

OUTCOMES	Total Angka Sasaran	Total Angka Pencapaian	Persentase Pencapaian
Kapasitas SDM dan Kelembagaan yang Memadai	5	2	40%
Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen	4	4	100%
Transaksi dan Saldo Keuangan Pemerintah Daerah Dicatat Secara Akurat dan Tepat Waktu	5	5	100%
Terdapat Laporan Keuangan dan Informasi Manajemen Anggaran	5	2.7	54%
Rata-rata			74%
TOTAL	19	13.7	72%

Sumber: Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

**Pengelolaan aset daerah melalui perencanaan dan pengelolaan aset jangka panjang belum efektif. Efektivitas pengolahan aset dalam menjamin terciptanya layanan terbaik dalam mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan dapat dipenuhi melalui 20 indikator yang disyaratkan, namun hanya 9 yang terpenuhi atau sebesar 45 persen.** Kebijakan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, kebijakan dan prosedur pemeliharaan aset serta kebijakan, sistem, dan prosedur pencatatan, perolehan, penilaian, pemindahtanganan dan penghapusan dan pelaporan barang daerah belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menjadikan pemanfaatan aset bagi kepentingan pemerintah daerah belum optimal.

**Tabel 2.5 Skor Penilaian Pengolahan Aset Daerah.**

OUTCOMES	Total Angka Sasaran	Total Angka Pencapaian	Persentase Pencapaian
Terdapat kebijakan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset daerah	7	5	71%
Kebijakan dan prosedur pemeliharaan aset dilakukan dan terintegrasi	4	3	75%
Terdapat kebijakan, sistem dan prosedur	9	1	11%
Rata-rata			53%
TOTAL	20	9	45%

Sumber: Data Kuesioner PFM, data diolah (2013)

**Kebijakan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset daerah belum sepenuhnya mendukung tertib pengelolaan aset daerah.** Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang mengatur hasil pemanfaatan atau penggunaan barang dan sanksi terhadap pengelola aset yang merugikan Negara/Daerah belum tersedia. Tidak adanya pedoman penatausahaan dan tidak dilakukannya sosialisasi Perda pengelolaan

barang ke seluruh SKPD menyebabkan nilai riil dari aset belum dapat diketahui. Pencatatan barang daerah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR) belum dilakukan secara baik. Laporan barang pengguna semesteran dan tahunan, serta laporan barang yang disiapkan oleh pengelola barang daerah belum merupakan sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah.

## 2.3. Analisis Oversight dan Accountability

**Kinerja Oversight dan Accountability Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah terlaksana dengan cukup efektif. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dicapai melalui adanya audit internal dan audit eksternal.** Berdasarkan hasil audit, yang harus dibenahi meliputi : penyampaian laporan keuangan ke BPK tepat waktu, publikasi laporan keuangan, akses masyarakat pada sidang-sidang pembahasan rencana dan pertanggungjawaban keuangan di DPRD, informasi LPPD dipublikasikan pada media massa setempat, jumlah staf Inspektorat yang memiliki Jabatan Fungsional Auditor dan berlatar belakang akuntansi ditambah, sistem pengendalian intern diperkuat, program dan prosedur audit secara reguler perlu dikaji ulang dan direvisi.

**Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Raja Ampat belum mengalami perbaikan secara signifikan dalam dua tahun terakhir.** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Raja Ampat belum mengalami perbaikan yang berarti selama periode 2011-2012 setelah sebelumnya memperoleh opini WDP.

Tabel 2.6 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Papua Barat, 2006-2011

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Opini BPK/Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01.	Prov. Papua Barat	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
02.	Kab. FakFak	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP	TMP
03.	Kab. Manokwari	TMP	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP
04.	Kab. Raja Ampat	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP	TMP
05.	Kab. Sorong Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP	TMP

## 2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Raja Ampat, diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

Kerangka peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah masih perlu dibenahi sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien masih perlu ditingkatkan dengan cara melakukan sinergitas program dan kegiatan pada masing-masing SKPD. Karena itu disarankan agar: a) penyusunan anggaran yang layak dan realistis, harus memperhitungkan tingkat pemenuhan SPM dibidang pendidikan, kesehatan dan infratstruktur, penggunaan analisis standar harga, biaya dan belanja; b) keterlibatan masyarakat dalam evaluasi yang bersifat partisipatif; dan c) perencanaan dan penganggaran multi-tahun dan proses perencanaan anggaran yang terintegrasi pada masing-masing SKPD.

Penerimaan dan pembayaran kas serta surplus kas belum dikelola secara optimal. Pengadaan barang dan jasa perlu ditingkatkan koordinasi dan transparansinya agar dapat menjamin akuntabilitas dan mendukung terciptanya *good governance*. Sistem akuntansi dan manajemen belum terintegrasi secara baik sehingga pemrosesan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, wajar, dan tepat waktu masih mengalami kendala. Untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka direkomendasikan agar: a) peningkatan kapasitas keahlian bagi pejabat dan personil dibidang penatausahaan akuntansi perlu dilakukan secara intensif, setiap penanganan belanja terdata secara teratur berdasarkan tingkat akurasi data akuntansi, penyediaan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program dibuat secara teratur bagi kepentingan pelaporan akuntansi, penyusunan laporan kinerja bagi setiap SKPD secara teratur. Prosedur dan pengelolaan investasi daerah dan hibah telah dilaksanakan namun belum didukung oleh kebijakan pengelolaan hutang dan investasi yang sesuai dengan kerangka kebijakan nasional. Mengacu pada kerangka kebijakan maka perlu disusun dan ditetapkan regulasi daerah tentang Pinjaman



Daerah dan Investasi Daerah yang mengacu pada PP. No. 54 Tahun 2005, bahkan perlu adanya regulasi daerah mengenai Penerimaan, Pencatatan, Pengelolaan dan Pelaporan Hibah.

Perencanaan dan pengelolaan aset jangka panjang yang menunjang kelancaran aktivitas pemerintah belum ditangani secara efektif seperti kebijakan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset daerah yang mendukung tertib pengelolaan belum dilengkapi dengan sejumlah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. Kondisi seperti ini mengakibatkan pemanfaatan aset daerah belum optimal dan transparan, kebijakan dan prosedur pemeliharaan aset belum terintegrasi dengan proses perencanaan daerah menyangkut kebijakan, sistem dan prosedur pencatatan, perolehan, penilaian, pemindahtanganan dan penghapusan dan pelaporan barang daerah. Pembenahan penanganan aset daerah dapat dilakukan melalui: Penyusunan kebijakan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan aset; Penataan kebijakan dan prosedur pemeliharaan aset, serta kebijakan, sistem dan prosedur pencatatan, perolehan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan serta pelaporan aset untuk menjamin pengamanan aset dengan baik; Penilaian aset untuk memastikan nilai dan status kepemilikan aset secara jelas; Penataan kebijakan dan prosedur pemeliharaan aset yang terintegrasi dengan proses perencanaan daerah; Penyusunan secara teratur tentang laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang daerah oleh pengelola barang daerah sebagai sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah.

DPRD telah melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, namun belum diimbangi oleh akuntabilitas pemerintah terhadap publik secara memadai. Pembenahan atas pengawasan dan akuntabilitas pemerintah terhadap publik dilakukan melalui: a) publikasi laporan keuangan pada media yang dapat diakses oleh publik; b) pemberian akses masyarakat pada sidang-sidang pembahasan rencana dan pertanggungjawaban keuangan di DPRD.

3

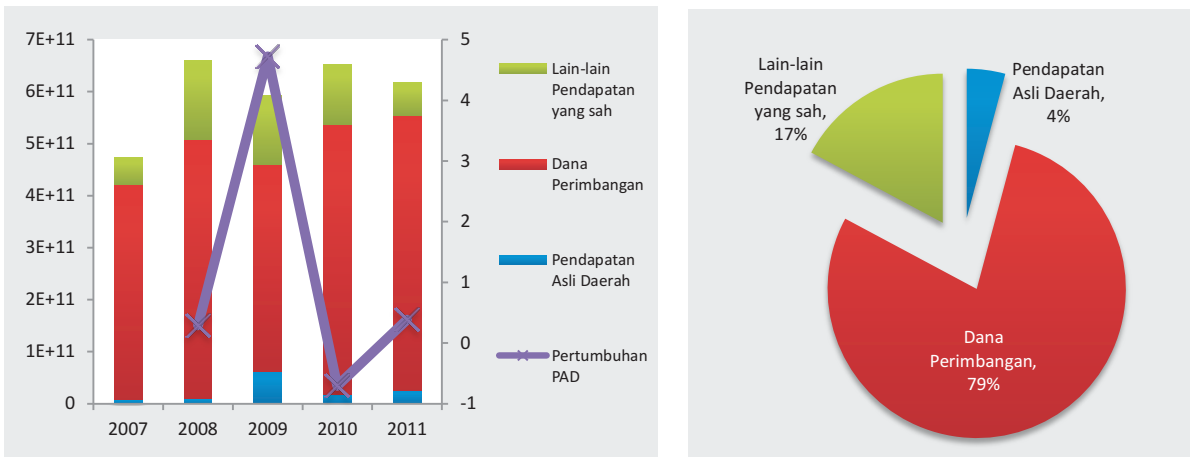


## PENDAPATAN DAERAH

### 3.1. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat

**Kemandirian fiskal daerah Kabupaten Raja Ampat masih rendah dan berfluktuasi dalam lima tahun terakhir.** Postur pendapatan daerah riil selama periode 2007-2011 masih didominasi oleh dana perimbangan. Rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah mencapai 79 persen, PAD hanya berkontribusi 4 persen dan selebihnya 17 persen dikontribusi oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain kontribusi PAD yang rendah, realisasi nilai PAD juga nampak berfluktuasi dan tidak menunjukkan kinerja peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Selama periode 2007-2011, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan hingga 4,7 persen ditahun 2009 namun tahun 2010 mengalami penurunan dan mulai membaik lagi di tahun berikutnya, hal ini disebabkan penerimaan pajak daerah yang berfluktuatif, sehingga penanganan terhadap pajak daerah perlu dibenahi yaitu pada mekanisme terhadap potensi-potensi PAD. Dana perimbangan selama kurun waktu tersebut mengalami penurunan di tahun 2009 hal ini karena bertambahnya kabupaten pemekaran sehingga secara rasional akan memperbesar pembagi DAU yang berdampak terhadap penurunan porsi DAU Kabupaten maupun Provinsi. Pada aspek lainnya di tahun tersebut peningkatan PAD merupakan yang paling tinggi sehingga ketika PAD meningkat maka bobot PAD pada formula DAU menjadi kecil konsekuensinya DAU yang diperoleh pasti akan mengalami penurunan. Fakta ini mengindikasikan lemahnya perencanaan dan implementasi mobilisasi PAD dalam mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian fiskal daerah. Akibatnya, tingkat ketergantungan fiskal, khususnya ketergantungan terhadap dana perimbangan cenderung tidak mengalami perbaikan dalam lima tahun terakhir.

Gambar 3.1. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011

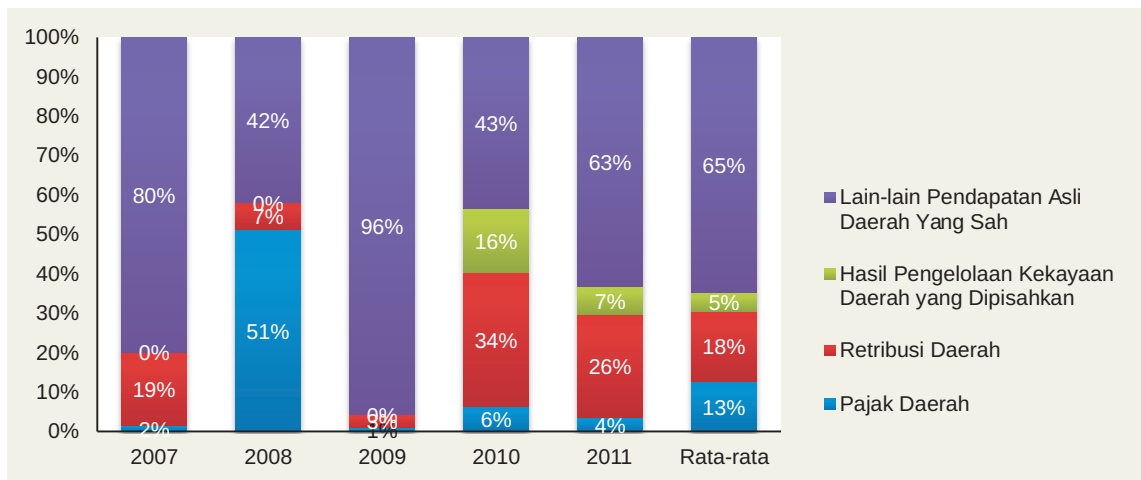


Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

### 3.2. Struktur Pendapatan Asli Daerah

**Struktur Pendapatan Asli Daerah Riil meskipun tidak menunjukkan pola yang konsisten, selama periode 2007-2011 posturnya didominasi oleh lain-lain PAD yang sah.** Rata-rata 65 persen PAD dikontribusi oleh komponen lain-lain PAD yang sah selama periode 2007-2011. Bahkan pada tahun 2009 ketergantungan PAD Kabupaten Raja Ampat terhadap lain-lain PAD yang sah mencapai 96 persen, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 42 persen, serta kembali mengalami penurunan tajam pada tahun 2010 hanya berkontribusi 43 persen. Selama periode yang sama Pajak Daerah hanya 13 persen dan Retribusi Daerah hanya 18 persen. Pajak daerah yang merupakan sumber utama sebagai ukuran berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat justru kurang berkontribusi dalam pembentukan PAD. Bahkan pada tahun 2009 kedua komponen tersebut, pajak dan retribusi daerah kontribusinya tidak mencapai 5 persen terhadap pembentukan PAD, itupun dari pajak daerah tersebut yang berkontribusi hanya sebatas pada komponen pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran dan pajak penggalian bahan galian Gol. C. Retribusi daerah berkontribusi lebih lebih besar terhadap PAD dibandingkan pajak daerah.

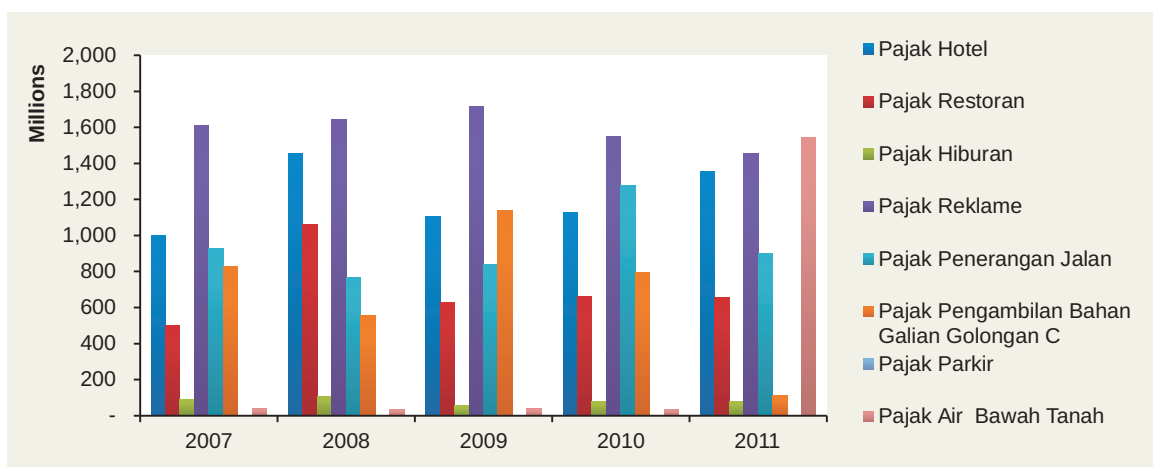
Gambar 3.2. Postur Pendapatan Asli Daerah Ril Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

**Postur pajak daerah didominasi oleh pajak reklame dan pajak hotel pada tahun 2007 hingga 2010, dan pajak air bawah tanah mendominasi pada tahun 2011.** Selama tahun 2007 hingga 2010, hanya pajak reklame dan pajak hotel yang menunjukkan penerimaan pajak lebih dari Rp 1 milyar, selain komponen restoran pada tahun 2008 dan pajak pengambilan bahan galian Gol. C pada tahun 2009, serta pajak penerangan jalan pada tahun 2010. Komponen pajak daerah lainnya menunjukkan penerimaan di bawah Rp 1 milyar selama periode 2007-2010. Memasuki tahun 2011, seiring dengan terbitnya Perda pajak air bawah tanah, komponen pajak daerah ini langsung menunjukkan dominasinya, bahkan merupakan yang terbesar, melampaui pajak reklame dan pajak hotel. Potensi pajak daerah yang juga nampak potensial tetapi belum menunjukkan penerimaan yang optimal dan konsisten setiap tahunnya adalah pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian gol. C. Jika intensifikasi pajak daerah pada keempat komponen ini, dapat dipastikan bahwa penerimaan pajak daerah ke depan akan berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD khususnya, dan secara umum akan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Penting untuk segera mengambil langkah strategis pemerintah daerah untuk mempersiapkan naskah akademik untuk mendukung penerbitan perundangan yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terutama menyangkut komponen pajak dan retribusi daerah yang sangat potensial di Kabupaten Raja Ampat yang selama ini tidak dapat dipungut karena terkendala perundangan, antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, BPHTB, retribusi jasa umum, jasa usaha selain retribusi perizinan tertentu yang selama ini menjadi andalan daerah ini dalam penerimaan retribusi daerah.

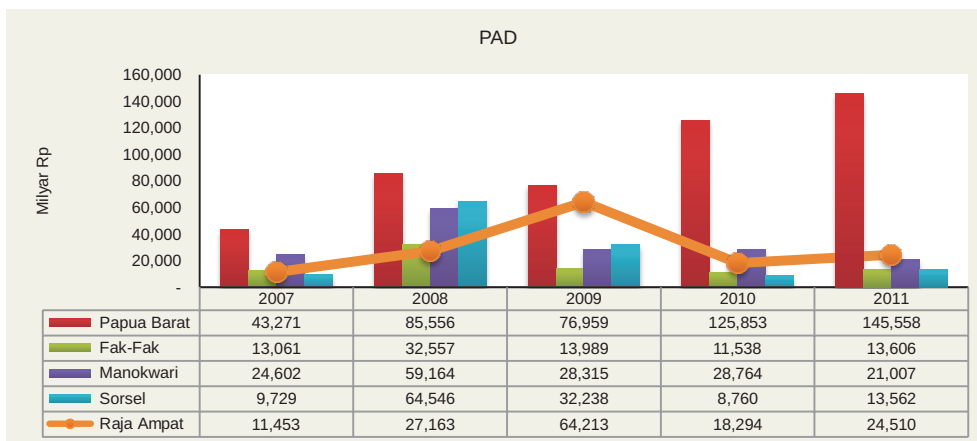
Gambar 3.3. Postur Pajak Daerah Ril Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011

Bila dibandingkan dengan tiga kabupaten (Sorong Selatan, Manokwari dan Fakfak), pendapatan daerah dari PAD Kabupaten Raja Ampat merupakan yang tertinggi pada tahun 2009 dan 2011. Pada tahun 2007, PAD Raja Ampat hanya lebih tinggi Sorsel, dan lebih rendah dari Manokwari dan Fakfak. Bahkan pada tahun 2008, meskipun mengalami peningkatan, tetapi PAD daerah ini merupakan yang terendah dari tiga daerah lainnya. Capaian PAD Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp 64,2 milyar dicapai pada tahun 2009 merupakan yang tertinggi dari tiga kabuoaten lainnya. Pada tahun 2011 meskipun menurun menjadi hanya Rp 24,5 milyar, tetap yang tertinggi dari tiga kabupaten lainnya. Fluktuasi nilai ril PAD Kabupaten Raja Ampat ini mengindikasikan belum kuatnya kelembagaan pemerintah daerah dalam menjadi optimalisasi PAD, sehingga perlu menjadi perhatian penting pemerintah daerah, termasuk mempersiapkan dukungan perundangan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang potensial.

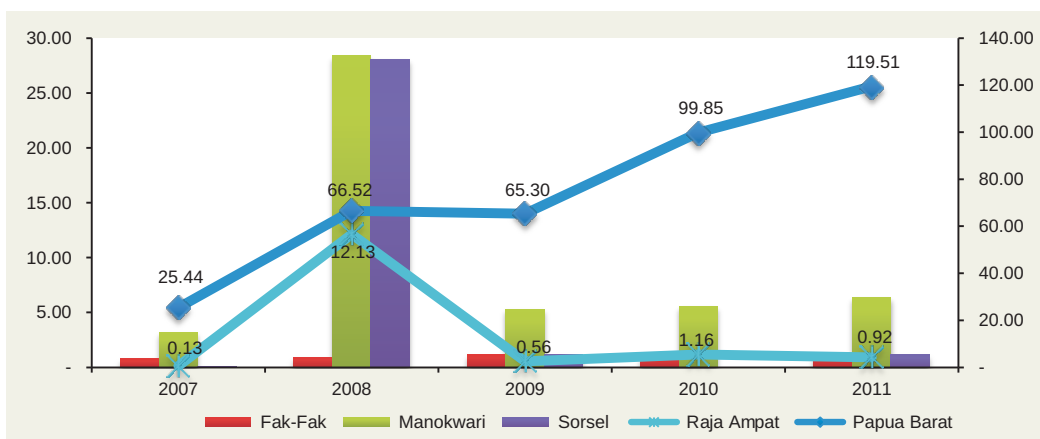
Gambar 3.4. Perbandingan Tren PAD Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten lainnya di Papua Barat



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Manokwari, Sorsel, dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

Penerimaan Pajak Daerah ril Kabupaten Raja Ampat, selain cenderung konstan sejak tahun 2009 hingga 2011 juga tergolong relatif rendah dibandingkan dengan Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Pada tahun sebelumnya perolehan pajak daerah mengalami peningkatan, hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten lainnya kecuali Kabupaten Fakfak, sedangkan Provinsi cenderung mengalami peningkatan. Fakta ini menunjukkan bahwa perolehan pajak riil daerah yang cenderung konstan menunjukkan bahwa penanganan sumber pajak belum dilakukan secara optimal, sehingga nampak tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

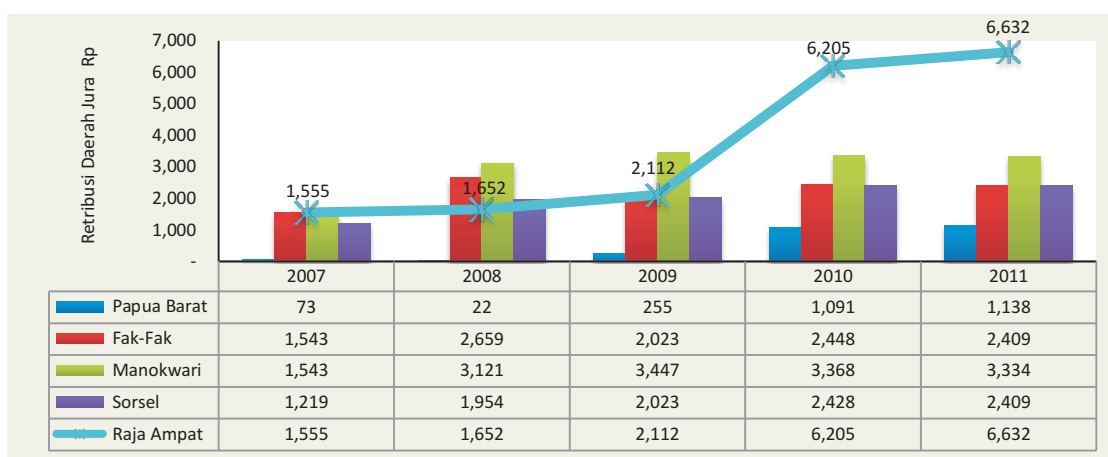
Gambar 3.5. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Ril Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Manokwari, Sorsel dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

**Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dan tertinggi dibandingkan tiga kabupaten lainnya, bahkan lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat.** Dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, Raja Ampat termasuk Kabupaten yang memiliki penerimaan retribusi daerah yang meningkat signifikan bahkan melebihi dari semua daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh Retribusi Jasa Umum, jasa usaha dan perijinan yang terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa aktivitas usaha mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Tantangannya, pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat harus mampu menjaga tren pertumbuhan peningkatan retribusi daerah tersebut, seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang banyak didorong oleh sektor basis, antara lain bidang usaha perikanan dan kelautan, industri pariwisata dan beberapa sektor potensial lainnya.

**Gambar 3.6. Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah Riil Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat**

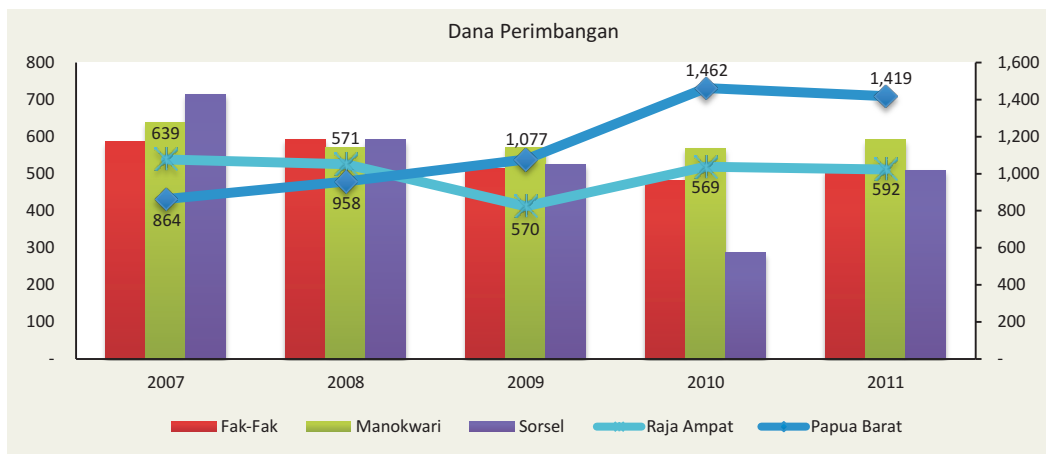


Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Manokwari, Sorsel dan Provinsi Papua Barat 2007-2011

### 3.3. Stuktur Dana Perimbangan

**Dana Perimbangan Kabupaten Raja Ampat relatif konstan dalam lima tahun terakhir dan lebih rendah dari Provinsi Papua Barat setelah tahun 2008.** Selain itu, dalam lima terakhir dana perimbangan Kabupaten Raja Ampat selalu lebih rendah dari Kabupaten Manokwari. Relatif konstannya pendapatan daerah dari dana perimbangan ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Kabupaten Raja Ampat meskipun masih relatif besar, tetapi tidak menunjukkan kondisi yang semakin memburuk. Perolehan dana perimbangan Raja Ampat mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten lainnya kecuali Sorong Selatan yang mengalami penurunan hingga tahun 2010 dan Provinsi yang terus meningkat. Penyebab perubahan perolehan dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Ke depan, setelah UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah diterapkan secara penuh, pendapatan daerah dari dana perimbangan akan semakin menurun, terutama karena sebagian dari obyek pajak yang akan beralih menjadi pajak daerah, juga karena faktor pembagi daerah otonom yang semakin banyak. Untuk itu, agar potensi penerimaan pajak daerah, khususnya dari peralihan obyek pajak bagi hasil dapat dioptimalkan, pemerintah daerah harus mempersiapkan perangkat kebijakan dan perundangan daerah, bukan hanya terkait teknis pemungutannya, tetapi juga menyangkut analisis potensi dan optimalisasi penerimaan dari obyek pajak bersangkutan.

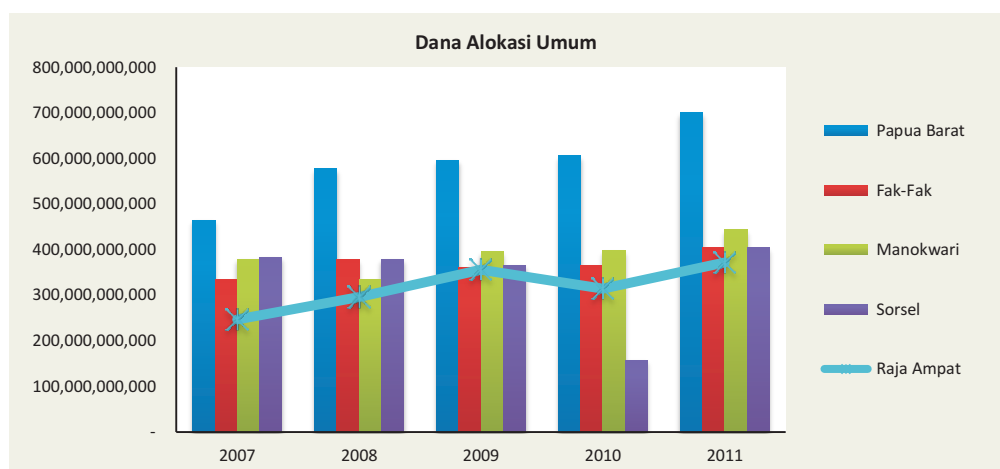
Gambar 3.7. Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan Ril Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Manokwari, Sorsel dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

**Postur dana perimbangan Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dalam lima tahun pengamatan terakhir.** Dalam kurun waktu 2007-2011, perolehan DAU mengalami peningkatan, dengan kontribusi rata-rata sebesar 69 persen terhadap total dana perimbangan. Meskipun dengan persentase yang besar, nilai DAU Raja Ampat tersebut merupakan yang terendah dibandingkan tiga kabupaten lainnya, kecuali pada tahun 2010 mengalahkan DAU Kabupaten Sorong Selatan. Nilai DAU Raja Ampat yang berada dalam kisaran Rp 250 milyar hingga hampir Rp 400 milyar, menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pendapatan daerah berasal dari DAU. Fakta ini menunjukkan besarnya ketergantungan fiskal daerah pada DAU, sehingga jika ada perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan desentralisasi fiskal akan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam realisasi program-program pembangunan daerahnya. Kekhawatiran ketidakpastian kemampuan fiskal dalam merealisasikan program-program pembangunan akan lebih nampak lagi jika dikaitkan dengan postur belanja daerah, terutama perbandingan antara alokasi belanja pegawai dan belanja modal. Semakin besar alokasi belanja pegawai, maka akan semakin kecil DAU yang dapat dimanfaatkan untuk alokasi belanja modal, sehingga dikhawatirkan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui alokasi APBD akan semakin menurun.

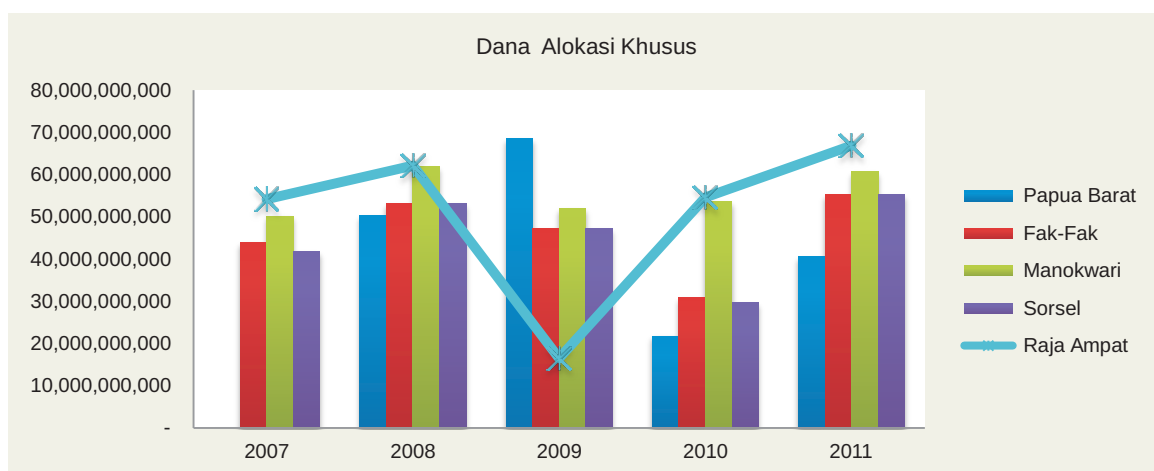
Gambar 3.8. Perbandingan Realisasi DAU Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Manokwari, Sorsel dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

**Pendapatan daerah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) selain berfluktuasi tajam juga menunjukkan kontribusi yang relatif kecil dalam lima tahun pengamatan.** Meskipun nilai DAK Kabupaten Raja Ampat nampak lebih besar dari daerah lainnya, kecuali pada tahun 2009, tetapi kontribusi DAK Kabupaten Raja Ampat terhadap dana perimbangan rata-rata hanya 11,05 persen selama periode 2007-2011. Tren penurunan DAK Kabupaten Raja Ampat dialami selama periode 2007-2009, dan kembali menunjukkan tren peningkatan pada dua tahun berikutnya. Artinya, secara umum selama periode pengamatan, DAK Kabupaten Raja Ampat menunjukkan tren peningkatan, dari Rp 54,1 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 66,8 milyar pada tahun 2011, tetapi secara rata-rata perolehannya berada di bawah penerimaan DAK Kabupaten Manokwari yang cukup stabil dan tidak mengalami penurunan tajam pada tahun 2009.

**Gambar 3.9. Perbandingan Realisasi DAK Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat**

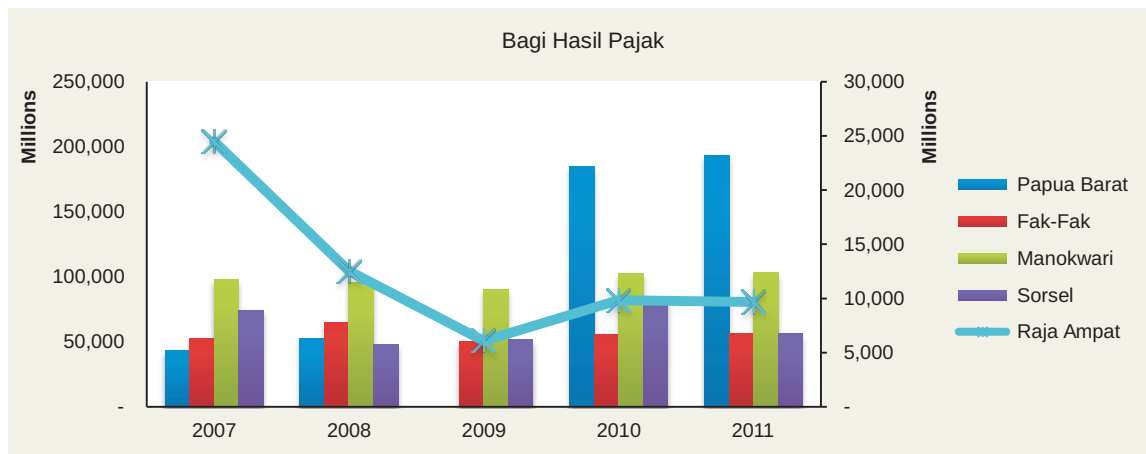


Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Manokwari, Sorsel dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

**Kontribusi dana bagi hasil pajak paling kecil terhadap dana perimbangan dan cenderung mengalami penurunan selama periode 2007-2011.** Sumber pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak Kabupaten Raja Ampat mengalami tren penurunan selama periode 2007-2011, menurun dari Rp 24,49 milyar pada 2007 menjadi hanya Rp 9,6 milyar pada tahun 2011. Selain tren penurunan tersebut, kontribusi dana bagi hasil pajak terhadap dana perimbangan Kabupaten Raja Ampat merupakan yang terkecil, yakni hanya 2,72 persen dari total dana perimbangan daerah ini. Fakta ini mengindikasikan bahwa ke depan sumber pendapatan daerah bagi hasil pajak ini akan semakin kecil, terutama seiring penerapan UU No. 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah, dimana sumber dana bagi hasil pajak terbesar telah dialihkan menjadi pajak daerah, yaitu PBB dan BPHTB. Pengalihan ini akan memberi keuntungan besar jika mampu dikelola secara baik, demikian juga sebaliknya.



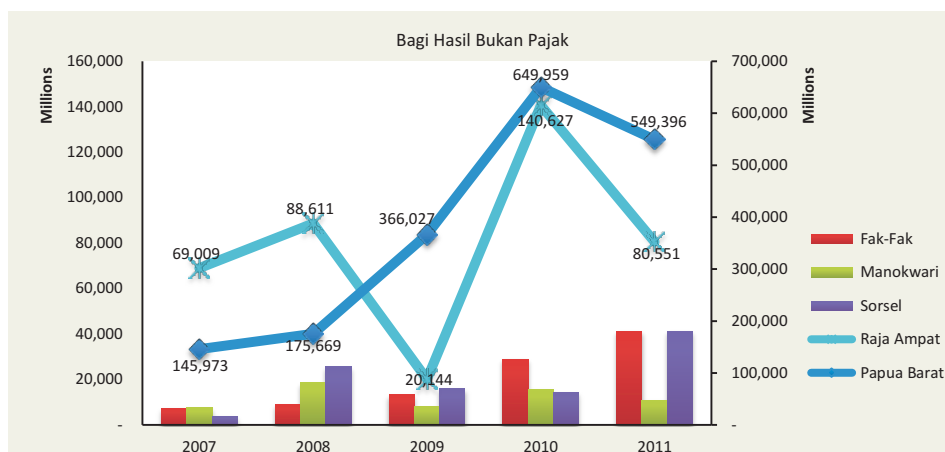
Gambar 3.10. Perbandingan Realisasi Bagi Hasil Pajak Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Manokwari, Sorsel dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

**Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami fluktuasi tajam selama periode 2007 hingga tahun 2011.** Nilai bagi hasil sumberdaya alam Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp 69 milyar pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 90 milyar pada tahun 2008. Penerimaan dana bagi hasil bukan pajak kembali mengalami penurunan tajam pada tahun 2009 hingga hanya mencapai Rp 20 milyar, serta kembali meningkat tajam menjadi Rp 140,6 milyar pada tahun 2010. Fluktuasi terus berlanjut hingga tahun 2011, dimana kembali menurun menjadi hanya Rp 80 milyar. Fluktuasi ini mengindikasikan pengelolaan sumberdaya alam yang dibagi-hasilkan di Kabupaten Raja Ampat, selain dikelola secara temporer dan sporadis, juga mengindikasikan kurag stabilnya perencanaan investasi daerah yang menjadi penggerak utama pengelolaan sumberdaya alam yang dibagi-hasilkan di Kabupaten Raja Ampat.

Gambar 3.11. Perbandingan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat

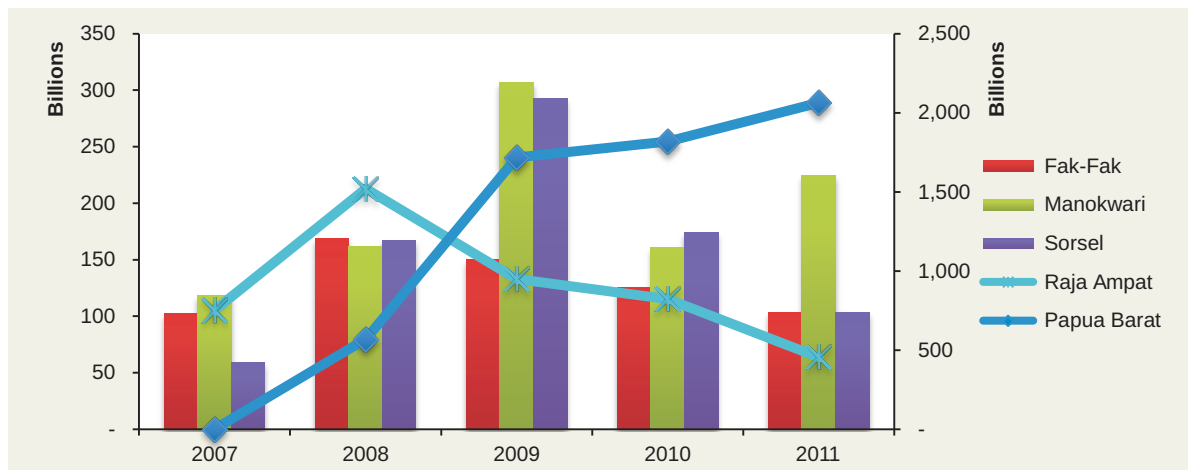


Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Manokwari, Sorsel dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

**Meskipun berhasil meningkat tajam lebih dua kali lipat pada tahun 2008, pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Raja Ampat terus mengalami penurunan tajam hingga tahun 2011.** Sumber utama pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Raja Ampat ini adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi. Ketergantungan pada dana penyesuaian dan otonomi khusus ini menjadi penyebab utama pola tren pendapatan lain-lain daerah yang sah pada kabupaten lainnya menjadi relatif sama, meskipun mengalami penurunan pada periode yang sedikit berbeda. Pola yang relatif sama ini mengindikasikan adanya penurunan

alokasi dana penyesuaian dan otonomi khusus yang diterima setiap kabupaten di Provinsi Papua Barat karena adanya sejumlah daerah otonom baru yang dimekarkan pada periode tersebut. Pada saat yang sama pemerintah daerah kabupaten, termasuk Kabupaten Raja Ampat belum mampu menemukan sumber pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah lainnya yang potensial dan berkesinambungan.

Gambar 3.12. Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Tiga Kabupaten Lainnya di Papua Barat

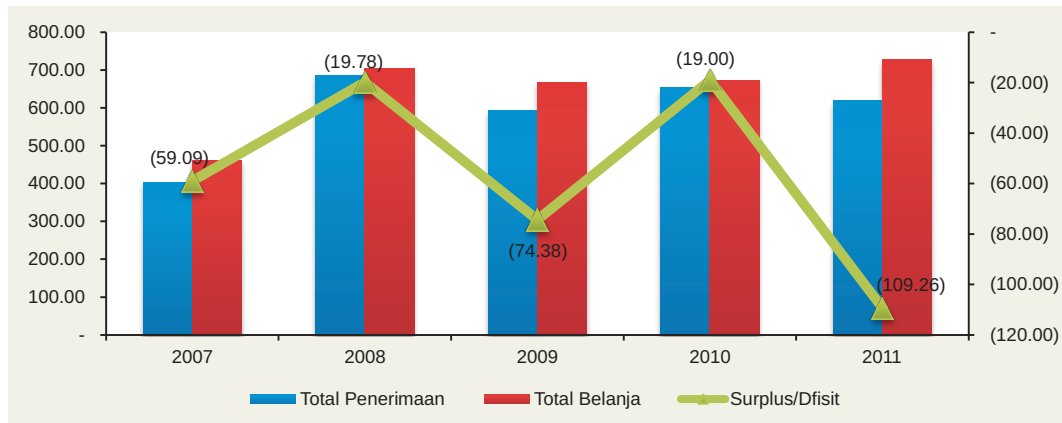


Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Manokwari, Sorsel dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

### 3.4. Pembiayaan Daerah

**Pembiayaan daerah Kabupaten Raja Ampat menganut penganggaran defisit dengan fluktuasi tajam selama periode 2007-2011.** Pada tahun 2007 defisit mencapai Rp 59 milyar, menurun menjadi hanya Rp 19,8 milyar pada tahun 2008, tetapi kembali meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp 74,4 milyar. Defisit terendah dicapai pada tahun 2010, hanya sebesar Rp 19 milyar, tetapi pada tahun 2011 menunjukkan defisit anggaran terbesar, mencapai Rp 109,3 milyar. Rata-rata defisit anggaran selama lima tahun pengamatan tersebut sebesar Rp 56 milyar, dimana rasio defisit anggaran terhadap total pendapatan/APBD mencapai 9 persen per tahunnya, melebihi ketentuan perundangan maksimal 3 persen dari APBD. Semua defisit anggaran tersebut kemudian dibebankan pada tahun anggaran berikutnya. Hal ini yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan anggaran di Kabupaten Raja Ampat. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) Kabupaten Raja Ampat selama kurun waktu 2007-2011 semuanya mengalami defisit. Dalam kurun waktu 2009-2011, defisit anggaran Kabupaten Raja Ampat memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan defisit ini dipengaruhi oleh peningkatan komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Artinya, prinsip penganggaran defisit sebagai sebuah kebijakan ekspansi fiskal daerah di Kabupaten Raja Ampat tidak nampak, karena penyebab defisit lebih disebabkan oleh alokasi belanja pegawai dibandingkan alokasi belanja modal yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya melalui pengembangan ekonomi daerah. Ke depan, penting untuk mengendalikan pembiayaan defisit ini, karena dapat berdampak pada beban keuangan daerah khususnya dan memberikan tekanan pada perekonomian daerah Kabupaten Raja Ampat secara umum.

Gambar 3.13. Perkembangan Surplus/Defisit Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

### 3.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi ketergantungan terhadap dana perimbangan masih sangat besar, pada saat yang pendapatan dari PAD cenderung mengalami penurunan dan tidak stabil. Proporsi DAU masih mendominasi bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kapasitas fiskal yang tersedia bagi kabupaten Raja Ampat dalam bentuk PAD mencaai 25 milyar di tahun 2011 dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 9 milyar pada tahun 2011 serta Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam mencapai Rp 80 milyar pada tahun 2011. Kecenderungan peningkatan penerimaan bagi hasil sumberdaya alam/bagi hasil pajak yang fluktuatif mengindikasikan bahwa eksploitasi sumberdaya alam mengalami peningkatan. Rekomendasi yang menarik dilakukan seiring dengan semakin bertambahnya investasi privat maupun publik di Kabupaten Raja Ampat adalah perlu mengoptimalkan penerimaan Pajak dan Retribusi daerah, dengan cara mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah yang sudah ada, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame dan pajak parker. Mengintensifkan sumber-sumber retribusi daerah, seperti retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu.

Pembiayaan defisit Kabupaten Raja Ampat selama periode 2007-2011 cenderung melampaui ketentuan perundangan. Rekomendasi yang penting diajukan antara lain pemerintah daerah perlu menelusuri sumber defisit, salah satunya karena faktor belanja pegawai yang meningkat pesat. Penganggaran defisit harus dilakukan secara terencana dan detail, dan harus diarahkan pada alokasi belanja daerah yang produktif, misalnya untuk alokasi belanja modal daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

4

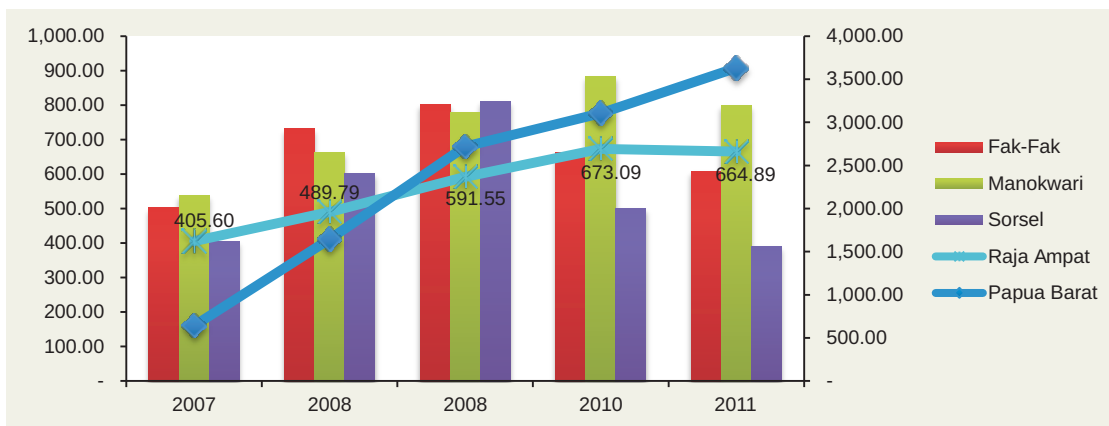


## BELANJA DAERAH

## 4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat

Pada periode 2007-2011, total belanja daerah Kabupaten Raja Ampat mengalami peningkatan hingga tahun 2010 kemudian menurun menjadi 664 milyar pada tahun 2011. Selama periode tersebut rata-rata belanja pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp 564,98 miliar atau bertumbuh lambat dengan rata-rata 12,52 persen per tahun. Dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, Kabupaten Raja Ampat memiliki tren belanja yang sama dengan Kabupaten Manokwari yang mengalami penurunan di tahun 2011 sedangkan total belanja Provinsi Papua Barat meningkat di tahun tersebut.

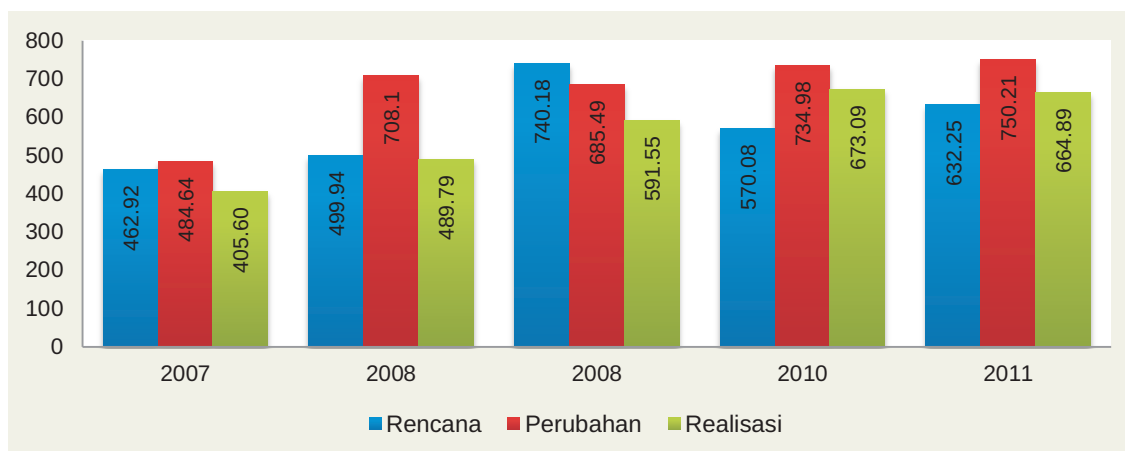
Gambar 4.1. Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat dan perbandingannya dengan Kabupaten Manokwari, Sorong Selatan, dan Fak-Fak; 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

Dalam kurun waktu tersebut, daya serap anggaran masih tergolong rendah. Pada tahun 2007, daya serap belanja hanya sekitar 87,6 persen dan semakin menurun hingga tahun 2009 hanya sebesar 79,9 persen. Pada tahun 2010-2011, terlihat realisasi melebihi rencana anggaran. Hal ini berarti terdapat perubahan anggaran di tahun tersebut. Namun jika dibandingkan antara perubahan anggaran dengan realisasi, kemampuan daya serapnya juga belum mencapai 100 persen. Pertumbuhan realisasi anggaran cenderung menurun dengan pola yang stabil sedangkan pertumbuhan rencana anggaran dan perubahan anggaran berfluktuasi. Rendahnya daya serap belanja menunjukkan kemampuan kapasitas SDM dalam mengelola keuangan daerah khususnya dalam belanja daerah masih relative rendah.

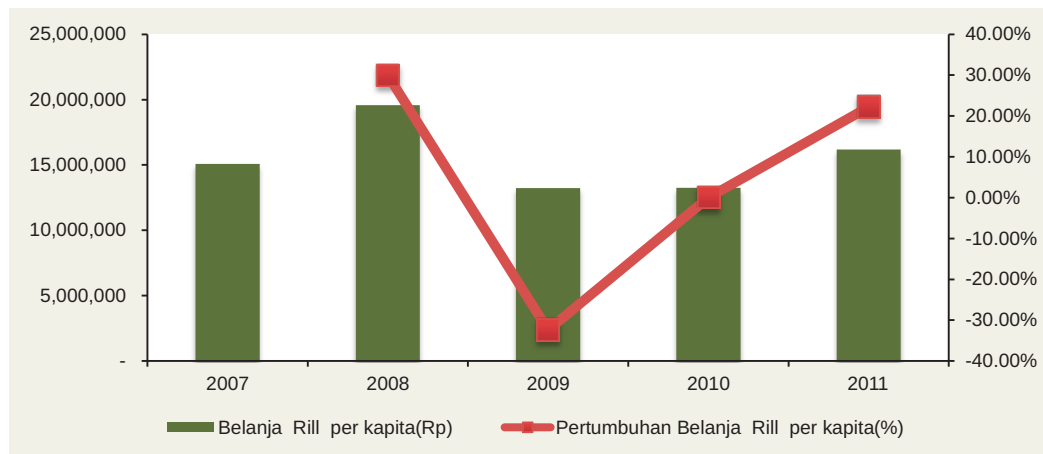
Gambar 4.2. Perkembangan Rencana, Perubahan dan Realisasi Belanja Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

**Belanja riil per kapita Kabupaten Raja Ampat kurun waktu 2007-2011 menurun di tahun 2009, namun tiga dua tahun berikutnya kembali meningkat.** Kecenderungan peningkatan belanja per kapita pada tahun terakhir seiring dengan peningkatan total belanja daerah yang cukup cepat dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Raja Ampat. Meskipun terdapat peningkatan belanja per kapita pada dua tahun terakhir sebesar Rp 16,1 juta per penduduk, namun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2008 yang mencapai Rp 19,5 juta per penduduk. Besarnya belanja riil perkapita selama 5 tahun rata-rata Rp. 15.460.941 perkapita. Kondisi ini menggambarkan bahwa setiap penduduk memperoleh alokasi belanja dalam bentuk pelayanan publik rata-rata per penduduk Rp 15,4 juta.

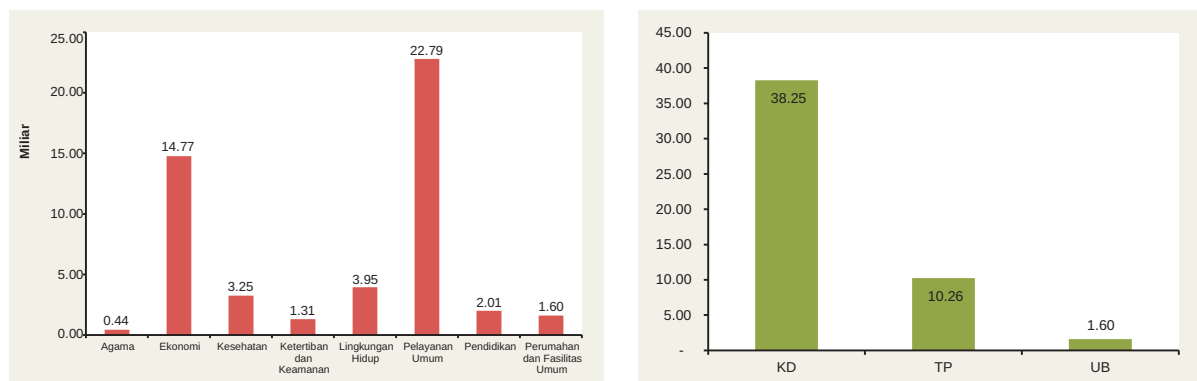
**Gambar 4.3. Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Riil Per Kapita Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011**



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

**Dana APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp 50,1 miliar pada tahun 2011.** Dana tersebut terdistribusi pada tiga lembaga yaitu Kantor Daerah, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. Belanja pusat terbesar di daerah dikelola oleh Kantor Daerah mencapai 38,25 miliar dari Rp 50,1 miliar di Kabupaten Raja Ampat atau sekitar 76,33 persen, selebihnya dikelola oleh tugas pembantuan dan urusan bersama dengan porsi yang lebih kecil. Belanja pemerintah pusat di kabupaten ini dimaksudkan untuk mendorong perekonomian dan peningkatan pelayanan publik di daerah sehingga terlihat bahwa dana yang paling besar dialokasikan pada fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum masing-masing 29 persen dan 45 persen dari total belanja pusat di kabupaten Raja Ampat. Selebihnya pengalokasian belanja terdistribusi pada fungsi-fungsi yang lain seperti agama, kesehatan, pendidikan, dsb dengan porsi yang lebih kecil.

**Gambar 4.4. Dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Raja Ampat, 2011**



Sumber: Kementerian Keuangan, DJPK, 2013

## 4.2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

**Belanja langsung mendominasi struktur total belanja Kabupaten Raja Ampat.** Rata-rata kontribusi dari belanja tidak langsung sebesar 23 persen dari total belanja daerah, dengan rata-rata sebesar Rp. 153 milyar, sedangkan belanja langsung sebesar 77 persen dari total belanja daerah, dengan rata-rata sebesar Rp. 502 milyar. Besarnya belanja tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai 80 persen kemudian hibah /subsidi sebesar 11 persen, bantuan sosial 6 persen. Besarnya belanja langsung didominasi oleh belanja modal sebesar 62 persen kemudian belanja barang dan jasa sebesar 34 persen dan belanja pegawai sebesar 4 persen.

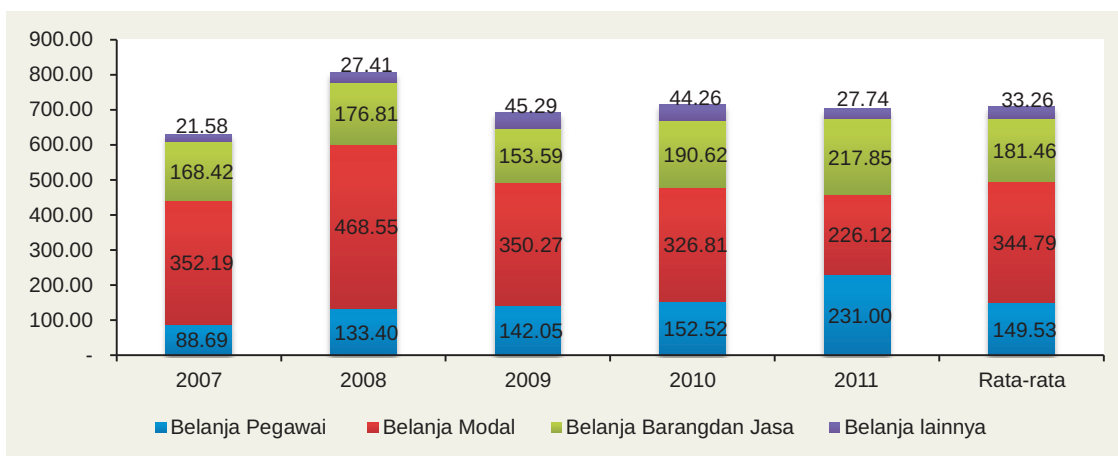
Gambar 4.5. Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

**Berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja daerah di Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh belanja modal dengan rata-rata 49 persen per tahun atau Rp 344,79 miliar per tahun.** Selama lima tahun pengamatan, belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2008, namun kecenderungan menurun hingga tahun 2011. Penurunan alokasi belanja modal menambah alokasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Proporsi belanja pegawai rata-rata 21 persen per tahun dan belanja barang dan jasa 26 persen per tahun, selebihnya 5 persen untuk belanja lainnya.

Gambar 4.6. Komposisi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011

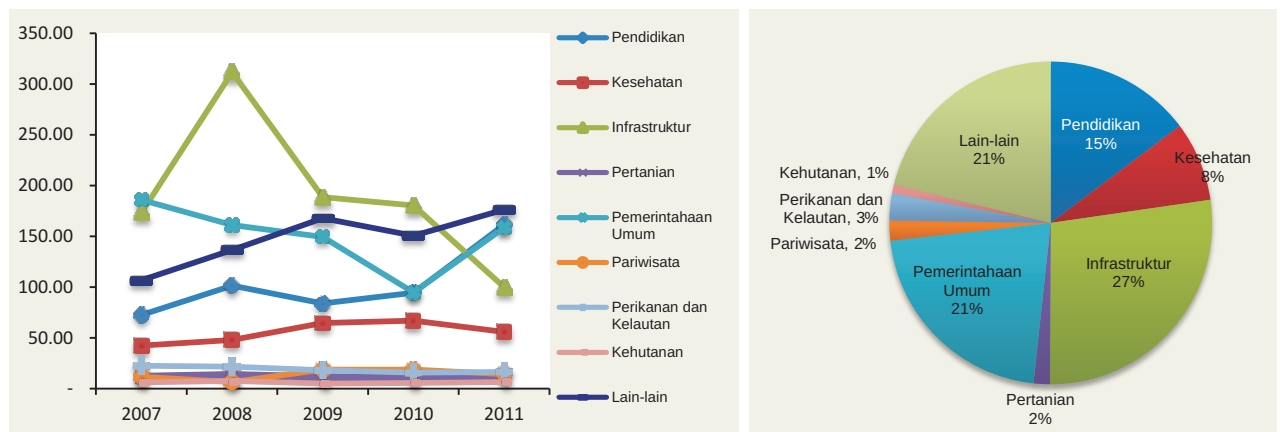


Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

### 4.3. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Sektor

Proporsi belanja terbesar berdasarkan klasifikasi sektor ditempati oleh sektor infrastruktur dengan rata-rata 27 persen per tahun selama 2007-2011. Walaupun belanja infrastruktur memiliki proporsi terbesar secara rata-rata, namun sejak tahun 2008 alokasi belanja riilnya mengalami penurunan drastis dari Rp 311,6 milyar menjadi Rp. 99.86 milyar ditahun 2011. Sektor pariwisata, perikanan dan kelautan yang merupakan leading sektor hanya memperoleh belanja riil sebesar 2 dan 3 persen dari total belanja Kabupaten Raja Ampat. Oleh karena itu ketiga sektor utama tersebut harus memperoleh perhatian khusus sehingga dampaknya akan mempengaruhi kinerja ekonomi di Kabupaten Raja Ampat.

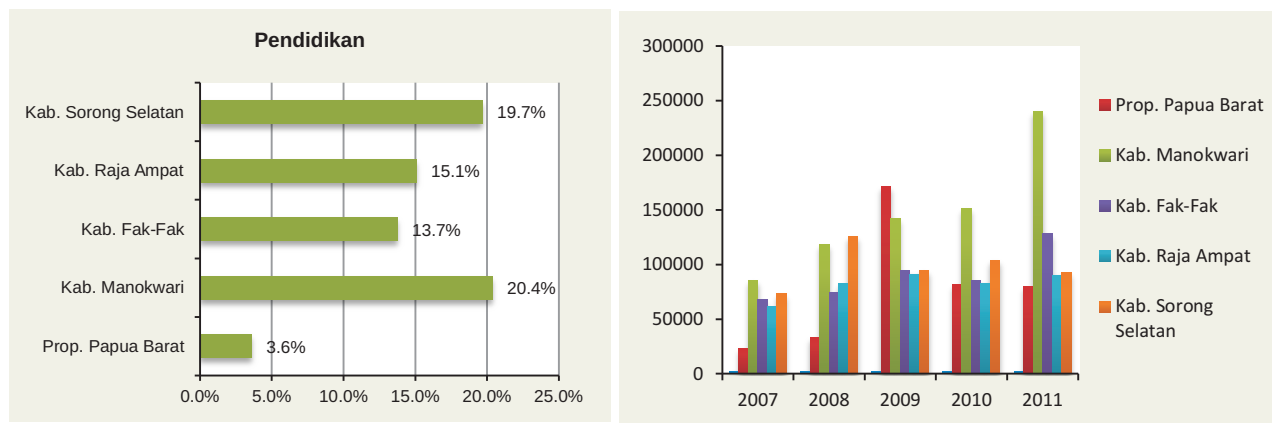
Gambar 4.7. Belanja Riil Sektoral Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

Alokasi belanja untuk sektor pendidikan di Kabupaten Raja Ampat rata-rata 15 persen per tahun selama periode 5 tahun pengamatan. Kondisi ini berarti pemerintah daerah belum memenuhi regulasi 20 persen dari total APBD. Namun demikian, jika dilihat dari perkembangannya, terdapat peningkatan yang cukup tajam selama periode tersebut. Hal ini berarti upaya untuk memperbaiki alokasi sektor pendidikan semakin membaik. Alokasi belanja pendidikan Kab Raja Ampat masih lebih tinggi dari alokasi belanja Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Fak-Fak, kecuali kabupaten Manokwari dan kabupaten Sorong Selatan.

Gambar 4.8. Komparasi Belanja Riil Sektor Pendidikan Kabupaten Raja Ampat dengan Provinsi dan Daerah lainnya



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah



**Alokasi belanja untuk sektor Pemerintahan Umum menempati urutan kedua terbesar dengan rata-rata 21 persen per tahun.** Jumlah anggaran yang teralokasi pada sektor pemerintahan umum selama 5 tahun rata-rata Rp 139 milyar. Penurunan drastis alokasi belanja sektor infrastruktur di tahun 2011 berimplikasi terhadap alokasi belanja untuk sektor-sektor yang lain. Sektor yang memperoleh alokasi belanja terbesar adalah sektor pemerintahan umum.

#### **4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi**

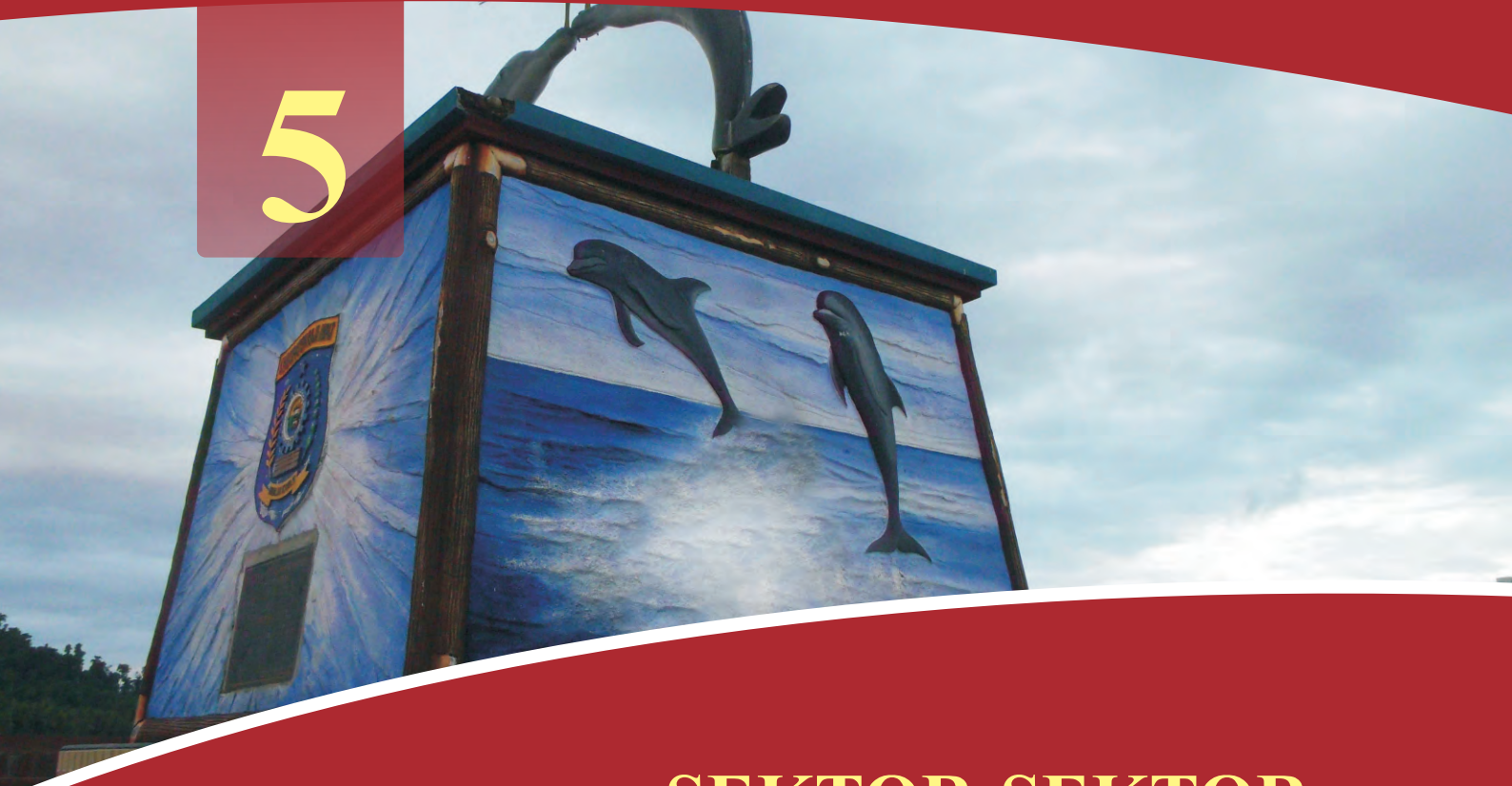
Selama periode 2007-2011, total belanja pemerintah Kabupaten Raja Ampat bertumbuh 12,52 persen per tahun atau rata-rata Rp 564,98 miliar per tahun. Tingkat Efektifitas pengelolaan belanja daerah masih tergolong rendah yang terlihat dari masih adanya gap antara rencana dengan realisasi belanja. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan rencana anggaran belum optimal. Terkait dengan kondisi tersebut, ke depan diharapkan agar pengelolaan belanja daerah mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga pada pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas SDM aparat pemerintah daerah.

Belanja modal mendominasi struktur belanja klasifikasi ekonomi, namun perkembangannya per tahun menurun. Kondisi yang sama untuk sektor infrastruktur. Proporsi belanja sektor pendidikan cenderung meningkat tetapi belum memenuhi regulasi pemerintah 20%. Ke depan, direkomendasikan agar pemerintah daerah menetapkan kebijakan anggaran yang pro terhadap sektor-sektor yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Peningkatan proporsi belanja infrastruktur dan belanja sektor strategis lainnya seperti sektor pariwisata, perikanan dan kelautan sebagai leading sektor
2. Pembenahan terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran
3. Mensinkronkan dokumen perencanaan daerah dengan pengalokasian belanja terhadap sektor yang menjadi prioritas utama.
4. Proporsi belanja pendidikan ditingkatkan hingga mencapai 20 persen sesuai dengan regulasi nasional.
5. Menekan komponen-komponen belanja pegawai dan barang dan jasa yang tidak prioritas.

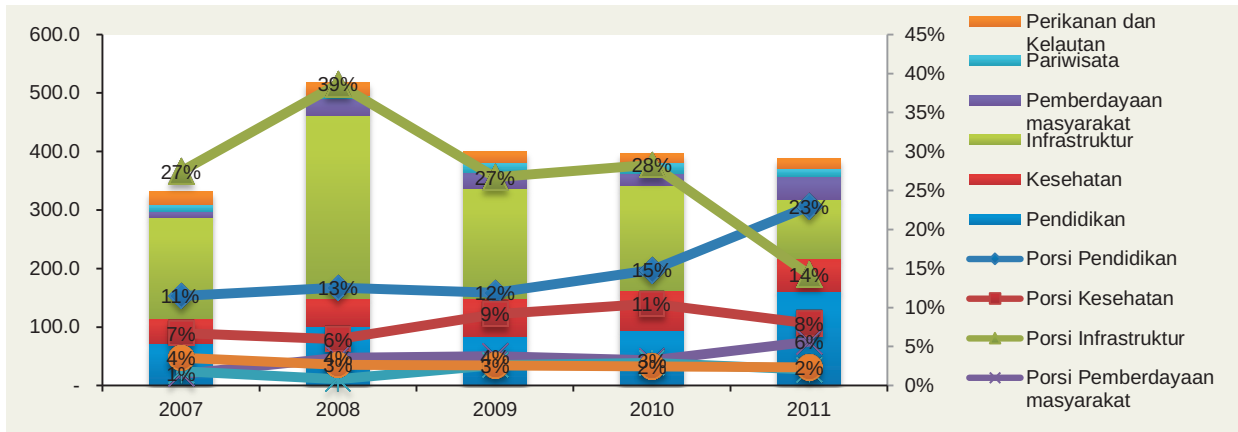
5

## SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS



Sektor strategis yang menjadi prioritas di Kabupaten Raja Ampat, adalah sektor Pariwisata, disusul sektor Perikanan dan Kelautan. Sektor infrastruktur mendapatkan bagian tertinggi di tahun 2008 yang mencapai 39%, kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 14% di tahun 2011. Sektor Pendidikan cenderung meningkat dari 11% menjadi 23% di tahun 2011. Sektor kesehatan mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2010 mencapai 11% dari total belanja daerah kemudian mengalami penurunan porsi menjadi 8% pada tahun berikutnya dan sektor pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari 1% menjadi 6% pada tahun 2011. Sektor pariwisata, perikanan dan kelautan hanya memperoleh porsi belanja masing-masing 2% dan 3%.

Gambar 5.1. Perkembangan Komposisi Belanja Riil Sektor Strategis Kabupaten Raja Ampat



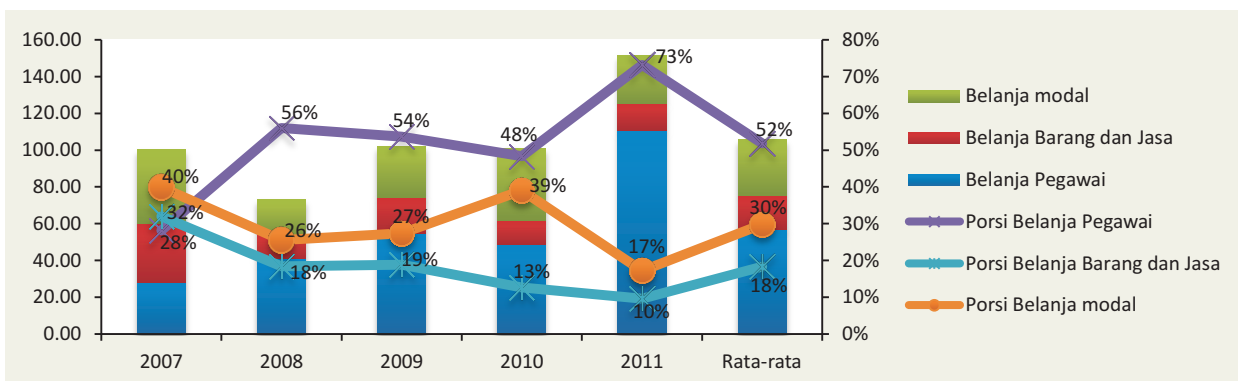
Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

## 5.1. Sektor Pendidikan

### 5.1.1. Belanja Sektor Pendidikan

Alokasi belanja riil untuk menunjang sektor pendidikan selama kurun waktu lima tahun berfluktuasi. Sementara itu, belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi, terdiri atas belanja modal sebesar 30%; belanja pegawai yang sebesar 52% dan belanja barang dan jasa 18%. Tren belanja riil pegawai dan porsinya terhadap belanja lainnya tampak tidak konsisten ditinjau dari sisi mekanisme perencanaan penganggaran sektor pendidikan sehingga perlu dilakukan pembenahan perencanaan anggaran yang lebih memadai.

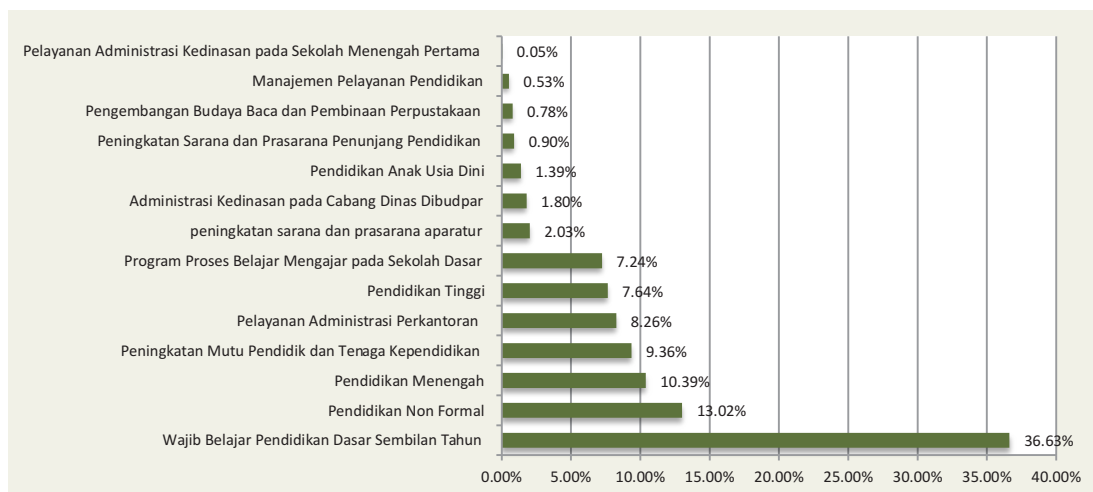
Gambar 5.2. Perkembangan Komposisi Belanja Riil Sektor Pendidikan Kabupaten Raja Ampat



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

Alokasi biaya pada program Prioritas yang dilakukan di sektor pendidikan difokuskan pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang mencapai 36,63%. Program lainnya yang diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi belanja yang lebih besar masing-masing pendidikan non formal mencapai 13% dan pendidikan menengah sebesar 10,39%.

Gambar 5.3. Porsi Alokasi Belanja Riil Program Sektor Pendidikan Kabupaten Raja Ampat



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

### 5.1.2. Kinerja Luaran dan Hasil Sektor Pendidikan

Kabupaten Raja Ampat masih menghadapi keterbatasan dukungan sarana dan prasarana fisik sekolah, dan penyediaan tenaga pengajar. Berdasarkan kondisi geografis jumlah sarana sudah tergolong cukup baik untuk gedung sekolah SD, SMP dan SMK. Pendidikan anak pra sekolah (TK) belum mendapatkan porsi yang cukup jika dilihat dari distrik di Raja Ampat, karena hanya tersedia 10 TK.

Tabel 5.1. Perkembangan Rasio Guru, Murid dan Sekolah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007–2011

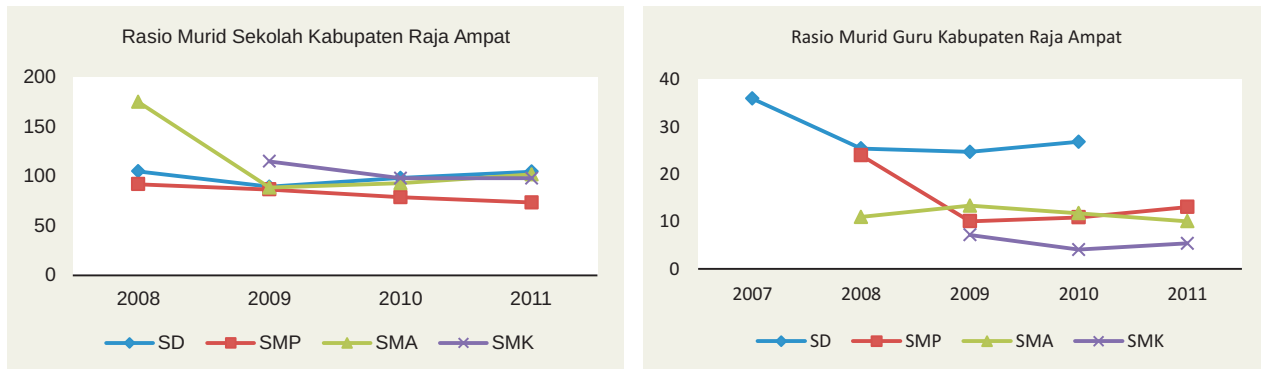
Uraian Ratio		2008	2009	2010	2011
Guru Sekolah	T K	1	1	1	1
	S D	4	4	4	4
	S M P	10	9	9	9
	S M A	11	7	7	7
	S M K		11	11	11
Guru Murid	S D	36	25	25	27
	S M P	24	10	11	13
	S M A	11	13	12	10
	S M K		7	4	5
Murid sekolah	S D	105	90	98	105
	S M P	92	87	79	74
	S M A	175	89	93	102
	S M K		115	98	98

Sumber: RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2010-2015

Kedepan, Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan dan yang utama adalah alokasi belanja sektor pendidikan dengan persentase yang lebih konsisten dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan kinerja luaran dan hasil. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain; cara menambah tenaga pengajar, gedung sekolah, pengadaan *meubelair*, mess sekolah, buku pelajaran, pengembangan SMA unggulan dan ketrampilan tenaga pendidik. Sementara itu, rata-rata rasio guru murid dan rasio murid sekolah cenderung stabil, namun menurun untuk tingkat SD, SMP dan SMA.

Sementara itu, rasio murid-guru pada tingkat SD dan SMP cenderung menurun, walau kembali meningkat di tahun 2011 dan tingkat SMA dan SMK cenderung berfluktuasi. Selanjutnya, rasio murid sekolah pada tingkat SD dan SMP terjadi perubahan sepanjang tahun. Jika melihat alokasi belanja untuk sektor pendidikan yang terus meningkat sejak tahun 2007 sampai tahun 2011, ternyata capaian kinerja hasil seperti rasio murid sekolah justru memperlihatkan keadaan sebaliknya. Kondisi yang sama juga terjadi pada rasio murid guru, dimana nilai yang ditunjukkan cenderung menurun yang disebabkan oleh peningkatan jumlah sekolah tidak diimbangi oleh penambahan tenaga guru.

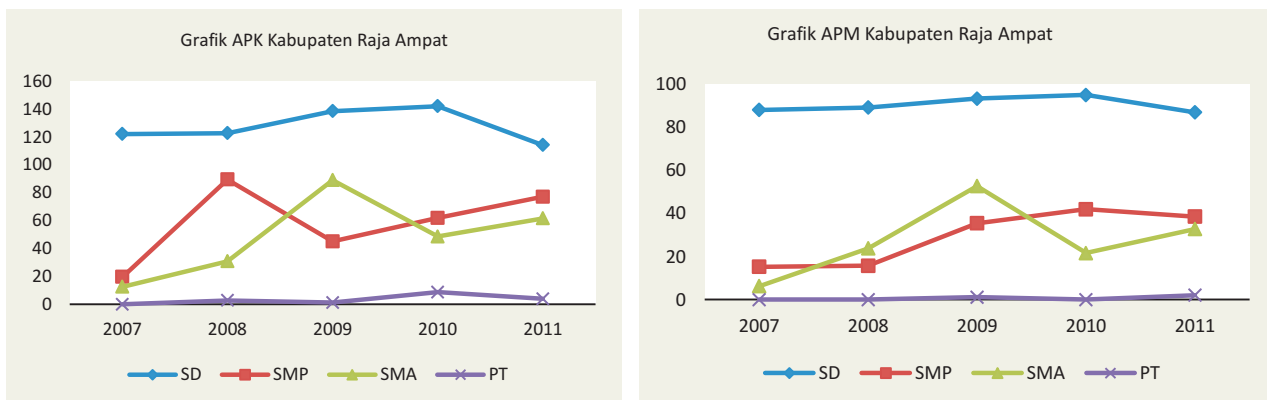
Gambar 5.4. Tren Ratio Murid - Sekolah dan Murid - Guru Kabupaten Raja Ampat



Sumber: RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2010-2015

Angka partisipasi sekolah masih relatif rendah untuk sekolah tingkat lanjut. Angka partisipasi kelas tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Raja Ampat lebih tinggi dari tingkat Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi. Angka partisipasi kelas tingkat Sekolah Dasar mengalami peningkatan hingga tahun 2010 kemudian di tahun berikutnya mengalami penurunan. Pada tingkat sekolah menengah APK cenderung meningkat dan peningkatan tertinggi untuk SMP terjadi di tahun 2008 dan untuk SMA di tahun 2009. Angka Partisipasi Murid tingkat Sekolah Dasar hingga tahun 2010 meningkat dan mengalami penurunan di Tahun 2011. APM tingkat SMP selama lima tahun cenderung meningkat sedangkan tingkat SMA meningkat hingga tahun 2009 dan mengalami penurunan di tahun berikutnya.

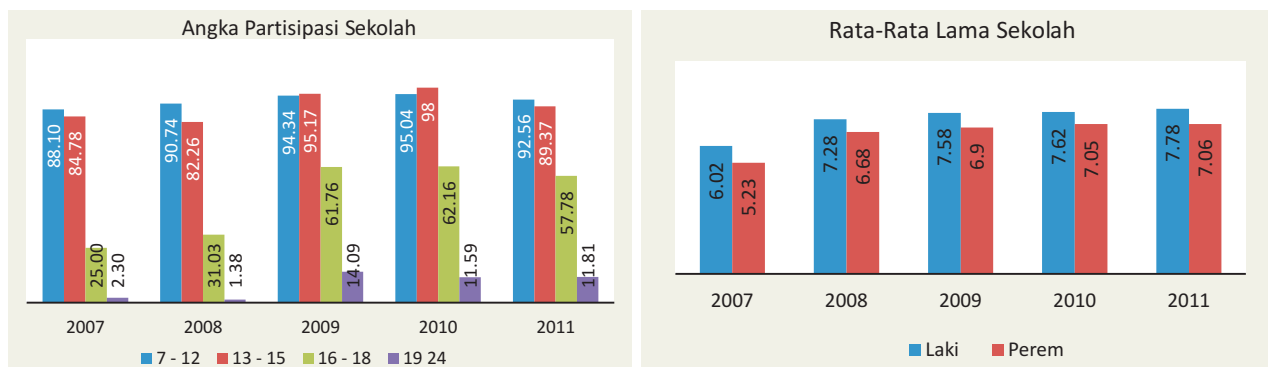
Gambar 5.5. Grafik APK dan APM Kabupaten Raja Ampat



Sumber: RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2010-2015

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang 7-12 dan 13-15 memiliki nilai yang tinggi bila dibandingkan dengan jenjang 16-18 dan jenjang 19-24. APS jenjang 7-12 cenderung meningkat hingga tahun 2010 kemudian mengalami penurunan. Pada jenjang 13-15 cenderung meningkat dan mengalami penurunan di tahun 2011, sedangkan jenjang 19-24 berfluktuasi hingga tahun 2011. Selanjutnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki tampak lebih panjang dibandingkan dengan RLS perempuan walau mengalami peningkatan hingga tahun 2011.

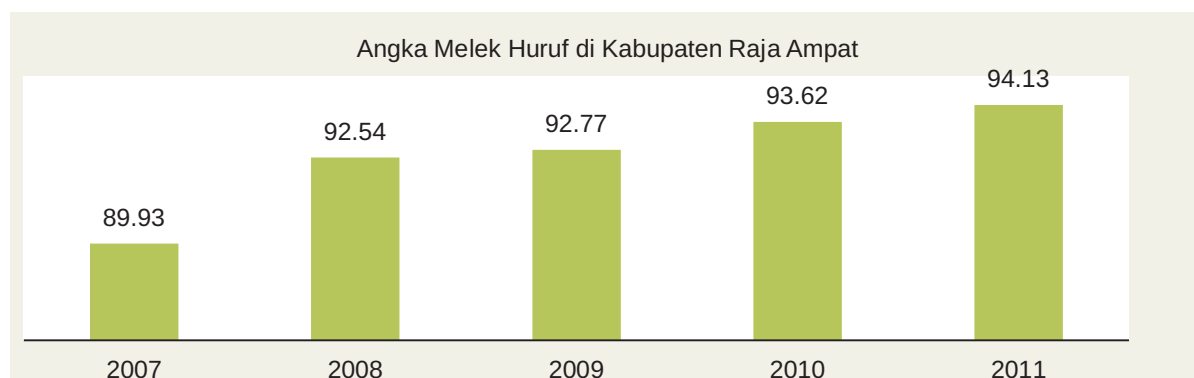
Gambar 5.6. Angka Partisipasi Sekolah dan Lama Sekolah Kabupaten Raja Ampat



Sumber: RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2010-2015

**Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.** Tingkat pendidikan yang tinggi pada seseorang akan bermanfaat bagi kemudahan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta menyerap kemajuan teknologi. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia diharapkan akan mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dampak positifnya adalah kesejahteraan masyarakat. Angka melek huruf usia 10 tahun ke atas telah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2009 dimana AMH laki-laki meningkat dari 77,02% tahun 2010 menjadi 95,43% dan AMH perempuan meningkat dari tahun 2009 sebesar 79,16% menjadi 92,99% pada tahun 2010.

Gambar 5.7. Angka Melek Huruf Kabupaten Raja Ampat

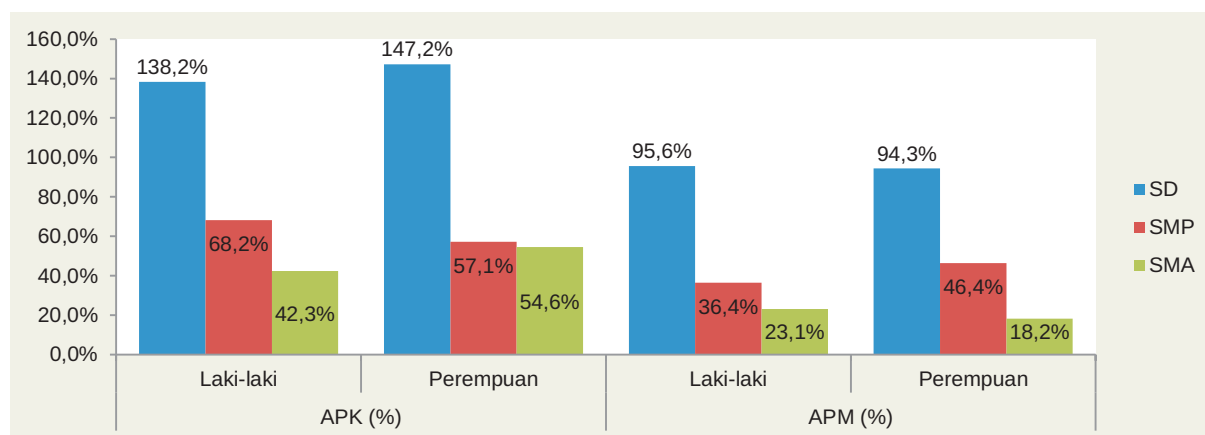


Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

**Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2010 anak laki-laki sekolah SD 95,59% SMP 36,36% dan SMA 23,08 sedangkan anak perempuan SD 94,34% SMP 46,43% dan SMA 18,18%.** APM merupakan alat ukur untuk mengetahui besarnya proporsi anak yang bersekolah tepat waktu yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Secara umum APM penduduk Kabupaten Raja Ampat mengalami peningkatan.

Sementara itu, **Angka Partisipasi Kasar (APK)** oleh *The UN Guidelines Indicators for Monitoring The Millenium Development Goals (MDGs)* dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian partisipasi kesetaraan gender pada bidang pendidikan. APK diperlukan karena adanya perbedaan yang relative besar antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki sehingga rasio jumlah siswa saja tidak cukup untuk menggambarkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. APK penduduk Kabupaten Raja Ampat untuk anak laki-laki SD sebesar 138,24% SMP 68,18% dan SMA 42,31% sedangkan untuk anak perempuan SD 147,17% dan SMP 57,14% dan SMA 54,55%. Secara umum kesetaraan dan keadilan gender pada anak sekolah telah mengalami peningkatan ditinjau dari perbandingan persentase pendidikan anak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase anak laki-laki.

Gambar 5.8. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenis Kelamin, 2010



Sumber: BPS, 2011

### 5.1.3. Kesimpulan Rekomendasi

Terbatasnya tenaga pengajar tidak hanya karena persoalan sedikitnya jumlah guru tetapi juga komitmen guru. Banyak tenaga pengajar yang kurang komitmen terhadap tanggungjawab yang diberikan sehingga pada beberapa tempat proses belajar mengajar terbengkalai. Pada aspek lainnya terjadi beban tanggungjawab yang lebih besar pada sebagian guru, sehingga pada beberapa kasus dijumpai ketidak efektifan seorang guru yang harus berada pada beberapa kelas dalam waktu bersamaan. Ditinjau dari kondisi geografis jumlah sarana sudah tergolong cukup baik untuk gedung sekolah SD, SMP dan SMK tetapi perbandingan tenaga pengajar dengan murid masih kurang memadai, bahkan terdapat gedung sekolah yang belum memiliki tenaga guru yang tetap. Untuk anak pra sekolah (TK) belum mendapatkan porsi yang cukup apabila dibandingkan dengan jumlah distrik di Raja Ampat, dimana dari 124 kampung hanya ada 10 TK. Upaya Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana dan jumlah tenaga pengajar terus dilakukan. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan cara menambah tenaga pengajar, gedung sekolah, pengadaan *meubelair*, mess sekolah, buku pelajaran, pengembangan SMA unggulan dan ketrampilan tenaga pendidik. Kedepan, perencanaan penganggaran terhadap program-program kegiatan pendidikan harus dibenahi sehingga alokasi anggaran maupun outputnya bisa sejalan dengan kebutuhan sektor pendidikan.

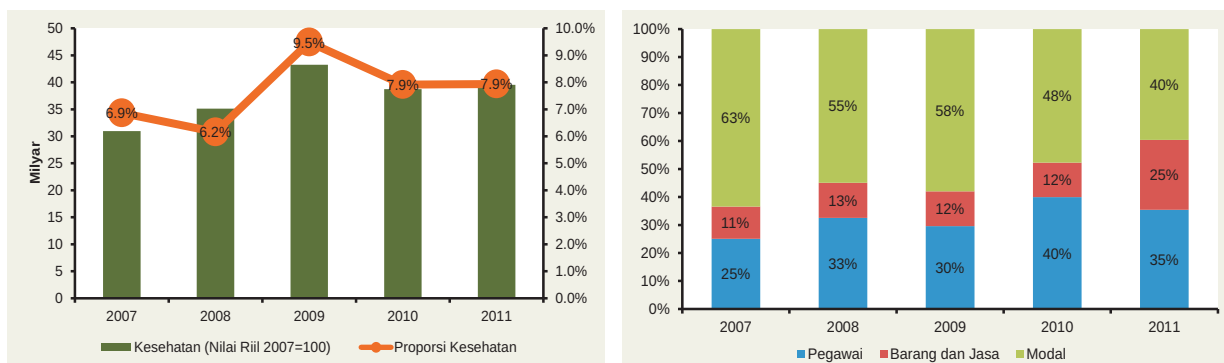
## 5.2. Kesehatan

### 5.2.1. Belanja Sektor Kesehatan

**Proporsi belanja sektor kesehatan terhadap total belanja daerah di Kabupaten Raja Ampat masih rendah di bawah 10%.** Secara rata-rata, proporsi realisasi belanja sektor kesehatan sepanjang 2007-2011 hanya 7,7% per tahunnya. Sedangkan tren proporsi belanja berfluktuasi, yaitu sempat mengalami kenaikan dari 6,2% pada tahun 2008 menjadi 9,5% pada 2009. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya jumlah perawat dan posyandu yang signifikan pada tahun 2009. Namun, proporsi tersebut kemudian turun menjadi 7,9% pada 2010 dan konstan di tahun berikutnya 2011 seiring dengan berkurangnya jumlah sarana dan prasarana kesehatan seperti posyandu serta tenaga medis seperti dokter di Kabupaten Raja Ampat.

**Sebagian besar belanja kesehatan di Raja Ampat digunakan untuk belanja modal.** Pada tahun 2007-2011, rata-rata proporsi belanja modal yaitu mencapai 53%, belanja pegawai 33%, dan belanja barang dan jasa 15% terhadap total belanja sektor kesehatan. Berdasarkan tren, terjadi perubahan proporsi yang signifikan pada tahun 2010, yaitu belanja modal turun sebesar 10% dan belanja pegawai naik 10%, sedangkan belanja barang dan jasa konstan. Kemudian, pada tahun 2011 walaupun terjadi sedikit penurunan proporsi belanja modal dan pegawai namun belanja barang dan jasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dua kali lipat dibandingkan tahun 2010.

Gambar 5.9. Alokasi Belanja Riil sektor Kesehatan di Kabupaten Raja Ampat

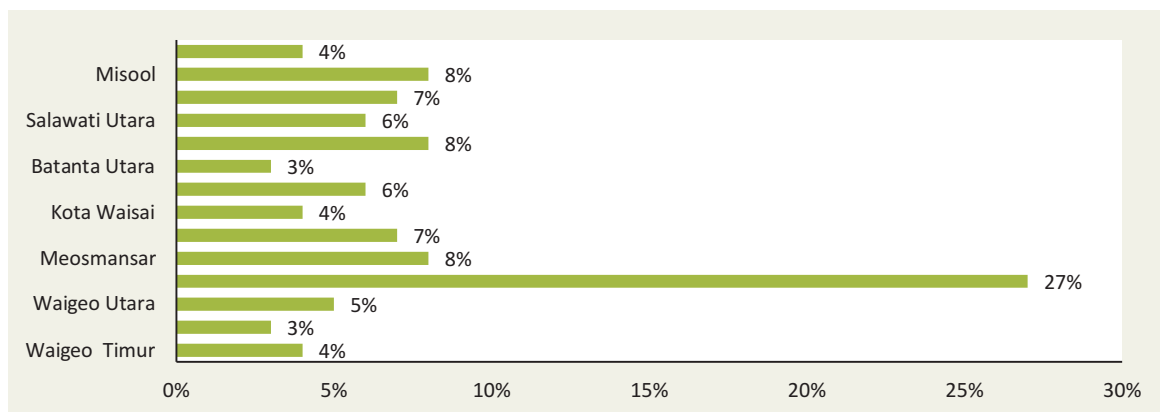


Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2011, data diolah

## 5.2.2. Kinerja Luaran dan Hasil Sektor Kesehatan

**Kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten raja Ampat masih tergolong rendah.** Penyakit yang umumnya dijumpai seperti malaria, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, campak dan diare pada anak-anak bayi. Beberapa penyebab utama seperti kondisi lingkungan pemukiman yang kurang sehat, minimnya sumber air bersih, sanitasi yang buruk, cara hidup masyarakat yang jauh dari pola hidup sehat, dan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan mengancam kondisi Gizi Balita pada beberapa distrik di Kabupaten Raja Ampat, dan yang paling parah di Wagio Barat yang mencapai 27 persen.

Gambar 5.10. Persentase Balita Gizi Buruk Di Kabupaten Raja Ampat



Sumber: RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2010-2015

**Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan untuk peningkatan pelayanan..** Selama periode 2007 hingga 2011 rumah sakit hanya 1 unit, puskesmas bertambah 2 unit, puskesmas pembantu sudah bertambah dari 23 unit menjadi 35 unit di tahun 2010, namun pada tahun berikutnya berkurang menjadi 33 unit, hal serupa juga terjadi pada posyandu. Jumlah Dokter tahun 2009 meningkat hingga 15 orang namun pada tahun berikutnya mulai berkurang hingga tahun 2011 tersisa 2 orang dokter. Jumlah perawat meningkat dari 84 perawat tahun 2007 menjadi 141 perawat tahun 2009, dan jumlah tersebut tidak berubah hingga tahun 2011. Pertambahan penduduk selama periode tersebut mengakibatkan daya tampung sarana kesehatan semakin bertambah sehingga perlu pembenahan perencanaan penganggaran urusan kesehatan yang lebih memadai sehingga pelayanan kesehatan akan lebih optimal. Penurunan belanja modal dan belanja barang mengindikasikan bahwa perencanaan untuk penunjang fasilitas kesehatan kurang mendapat perhatian.



Tabel 5.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan Termasuk Tenaga Kesehatan

	2007	2008	2009	2010	2011
Rumah Sakit	0	0	0	1	1
Puskesmas	15	13	13	15	19
Pukesmas Pembantu	23	33	33	35	33
Posyandu	91	69	106	69	69
Polindes	16	7	16	16	16
Puskesmas keliling	3	22	22	22	22
Jumlah dokter	11	11	15	13	2
Perawat	84	84	141	141	141
Bidan	57	57	57	57	57
Jumlah Penduduk	40912	41170	41860	42507	43435

Sumber :RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2010-2015, dan BPS Kabupaten Raja Ampat

**Kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang memadai.** Jumlah penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan sarana penunjang dan tenaga kesehatan. Setiap Puskesmas harus melayani lebih dari 2 juta penduduk setiap tahunnya, belum lagi dengan dokter yang tersedia dan perawat, sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga kesehatan di Raja Ampat memiliki beban pelayanan yang cukup tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyediaan tenaga kesehatan yang memadai perlu diupayakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

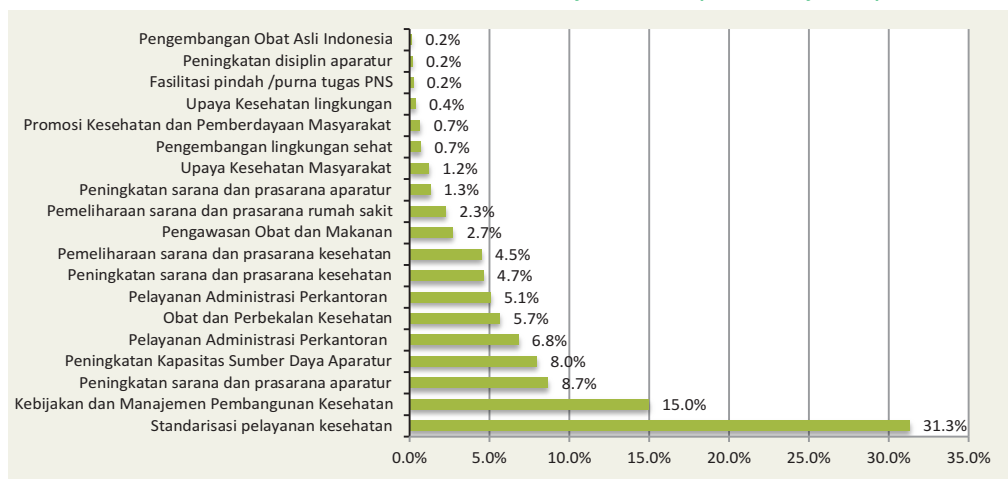
Tabel 5.3. Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan Termasuk Tenaga Kesehatan

	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Rasio Puskesmas-Penduduk	2,727	3,167	3,220	2,834	2,286	2847
Rasio Dokter-Penduduk	3,719	3,743	2,791	3,270	21,718	7048
Rasio Perawat-Penduduk	718	722	734	746	762	736

Sumber: RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2010-2015

**Standarisasi pelayanan kesehatan memperoleh porsi terbesar dalam pengalokasian program kerja Sektor kesehatan di Kabupaten Raja Ampat.** Terdapat 31,3% alokasi dana belanja kesehatan diperuntukan kepada standarisasi pelayanan kesehatan karena tenaga kesehatan yang masih terlalu minim. Kebijakan manajemen pembangunan memperoleh alokasi belanja sebesar 15% dan 8% untuk sarana dan prasarana aparatur serta kemampuan aparatur pada sektor kesehatan. Perencanaan di sektor kesehatan perlu dibenahi sehingga output kesehatan dapat lebih memadai lagi.

Gambar 5.11 Persentase Alokasi Belanja Di Kabupaten Raja Ampat



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat , terbitan 2007-2012, data diolah

### 5.2.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

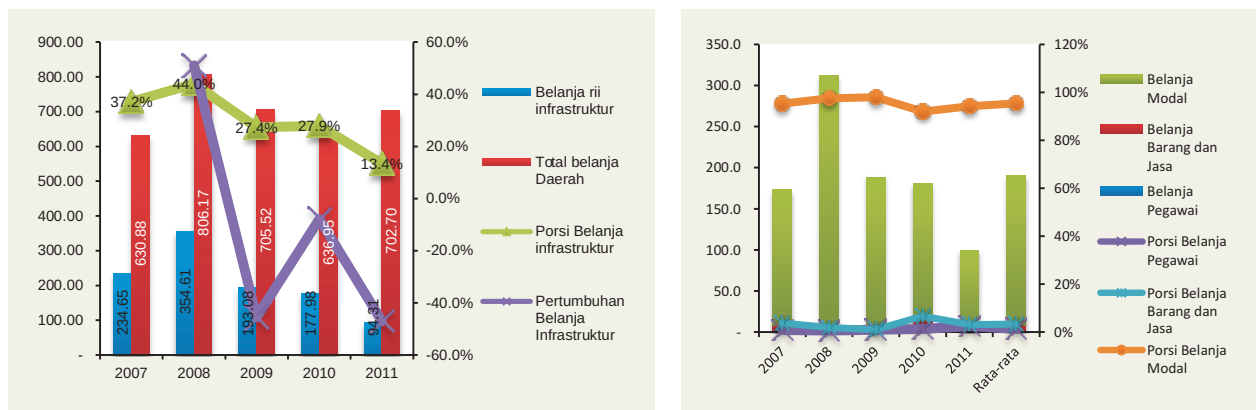
Kesehatan masyarakat kurang terlayani dengan baik ditinjau dari keharusan pemerintah daerah dalam penyediaan Standar Pelayanan Minimum. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2007 hingga 2011 alokasi anggaran untuk kesehatan dari 46 milyar di tahun 2007 dan mengalami penurunan jumlah menjadi 33 milyar di tahun 2011. Peningkatan perbaikan kesehatan dari dana tersebut masih tergolong rendah karena perbandingan jumlah penduduk, tenaga kesehatan serta sarana kesehatan belum memadai, sebaran dokter dan tenaga medis belum merata. Idealnya di setiap puskesmas tersedia dokter dan di setiap kampung tersedia tenaga bidan, akibatnya masyarakat yang mengalami sakit harus berobat ke kota lain yang biayanya cukup tinggi atau setidaknya keterpaksaan dengan cara tradisional, sehingga Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Raja Ampat sebesar 65,75%, berada dibawah rata-rata provinsi. Pada aspek lainnya kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Raja Ampat secara umum belum berjalan secara maksimal, umumnya masyarakat belum dapat terlayani secara maksimal oleh pelayanan kesehatan sebab kurangnya tenaga medis, peralatan kesehatan dan sulitnya medan pelayanan. Rumah sakit yang dimiliki 1 rumah sakit, belum mampu menangani rujukan dari sejumlah jenis penyakit yang di derita oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan rumah sakit yang ada di kabupaten lain dalam hal penanganan pasien secara khusus seperti penyakit dalam dan penanganan tulang. Alokasi belanja yang cenderung menurun mengindikasikan bahwa mekanisme perencanaan penanggulangan perlu di benahi dengan melihat sasaran pokok yang ingin dicapai.

## 5.3. Sektor Infrastruktur

### 5.3.1. Belanja Sektor Infrastruktur

Sektor infrastruktur mengalami tren penurunan alokasi belanja sejak periode 2008 hingga 2011. Alokasi belanja riil infrastruktur di Kabupaten Raja Ampat rata-rata mencapai 30%. Porsi alokasi belanja riil infrastruktur selama lima tahun cenderung menurun hingga tahun 2011 mencapai 13,4%. Berdasarkan pengalokasian tersebut, alokasi untuk belanja modal rata-rata mencapai 95,4%, belanja barang 21% dan belanja pegawai 3,3%. Walaupun terjadi penurunan alokasi belanja modal di tahun 2010, namun porsinya selalu diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan belanja modal tidak dipengaruhi oleh jumlah belanja daerah yang cenderung menurun sepanjang tahun.

Gambar 5.12 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Di Kabupaten Raja Ampat



Sumber: APBD KAbupaten Raja Ampat , terbitan 2007-2012, data diolah

**Alokasi belanja sektor infrastruktur, telah berhasil menambah panjang jalan hingga mencapai 220,54 kilometer.** Menurut jenis permukaan, bentangan jalan beraspal sepanjang 8,62 kilometer, batu kerikil sepanjang 121,97 kilometer, jalan tanah sepanjang 73,25 kilometer dan tidak dirinci (*non-detailed*) sepanjang 16,7 kilometer. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan di Kabupaten Raja Ampat hingga tahun 2010 sebesar 0,13%, sedangkan jumlah orang perbarang yang terangkut dengan angkutan umum sebanyak 12.750 orang.

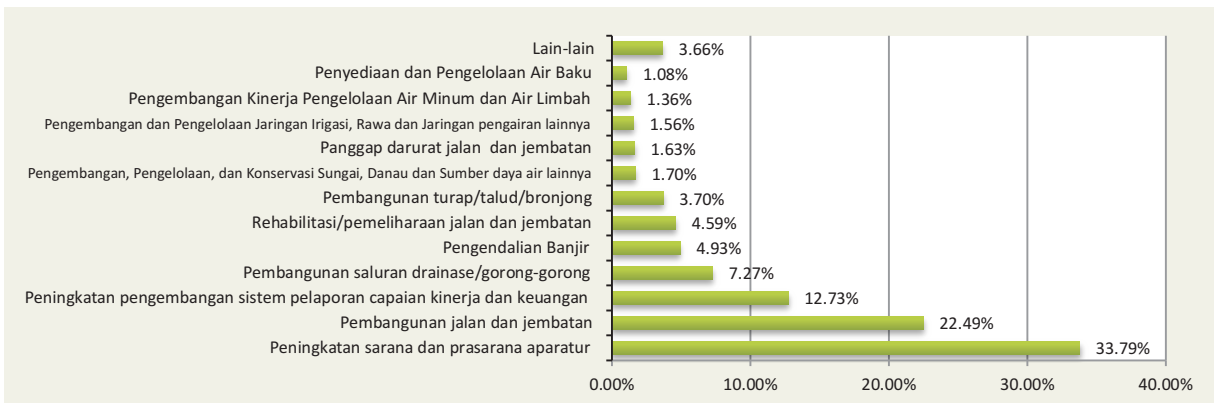
Gambar 5.13 Persentase Alokasi Belanja Program kesehatan Di Kabupaten Raja Ampat



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

Berdasarkan alokasi belanja sektor infrastruktur tahun 2007 hingga 2011, program pembangunan jalan dan jembatan mencapai 22,49%. Besarnya alokasi dana peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki porsi tertinggi hingga 33,79%, sebab pada tahap awal Kabupaten Raja Ampat setelah dimekarkan dari Kabupaten Sorong sehingga alokasi untuk perkantoran lebih diprioritaskan. Dalam perencanaan penganggaran berikutnya fokus kebijakan pembangunan di sektor diarahkan pada kegiatan yang dapat menunjang leading sektor (Sektor Pariwisata, Perikanan dan Kelautan) di Kabupaten Raja Ampat.

Gambar 5.14 Persentase Alokasi Belanja Program Infrastruktur di Kabupaten Raja Ampat



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

### 5.3.2. Kesimpulan dan Rekomendasi

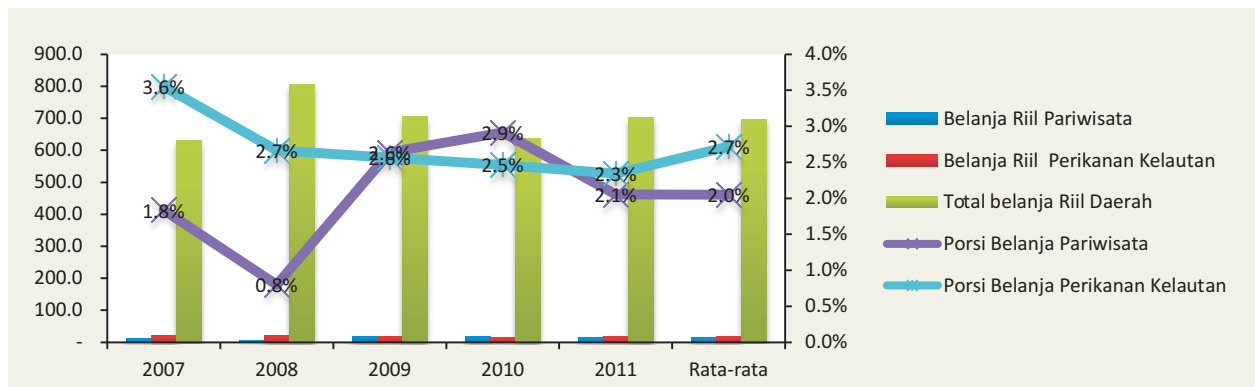
Ketersediaan sarana dan prasarana masih minim khususnya bagi kepentingan masyarakat. Penyediaan yang lebih memadai dapat dibenahi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang pengembangannya meliputi: (1) transportasi darat, laut dan udara; (2) sumberdaya air (3) sarana jaringan telekomunikasi; (4) sumber-sumber energi listrik teknologi mikro hidro dan (5) pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan. Kapal merupakan salah satu alat transportasi utama masyarakat walaupun sangat minim, dan jenis transportasi umum semacam angkola (angkutan laut) yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dari distrik ke distrik bahkan antar pulau biayanya cukup tinggi. Pengembangan infrastruktur terutama difokuskan pada jalan-jalan yang berupa pasir batu di hampir semua distrik, kemudian penyediaan armada transportasi laut. Kelengkapan sistem jaringan dan komunikasi elektronik akan memberikan kemudahan akses bagi penduduk untuk pengembangan informasi dan ekonomi bagi kepentingan masyarakat dan aparat pemerintah.

## 5.4. Sektor Pariwisata, Perikanan dan Kelautan

### 5.4.1. Belanja Sektor Pariwisata, Perikanan dan Kelautan

Pariwisata, perikanan dan Kelautan merupakan **leading sektor yang memberikan dampak terhadap perekonomian wilayah Raja Ampat**. Alokasi belanja riil terhadap sektor ini hanya 2% untuk sektor pariwisata dan 2,7% sektor perikanan dan kelautan dari total belanja riil daerah. Alokasi belanja sektor perikanan sejak tahun 2007 hingga 2011 mengalami penurunan dari 3,6% menjadi 2,7% dari total belanja daerah. Sektor perikanan dan kelautan sejak tahun 2007 berfluktuasi hingga tahun 2011 menjadi 2% dari total belanja daerah. Kecilnya perhatian terhadap kedua sektor tersebut yang ditandai dengan alokasi belanja menunjukkan ketidakkonsistenan perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam menempatkan sektor tersebut sebagai *leading sector*. Sesungguhnya jika alokasi belanjanya rasional dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan maka perekonomian Kabupaten raja Ampat akan cepat berkembang. Dengan menempatkan kedua sektor tersebut sebagai leading sektor secara geografis, sudah sesuai dengan karakteristik sumberdaya yang tersedia namun dari sisi penataan belum dilakukan secara memadai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh kedua sektor tersebut.

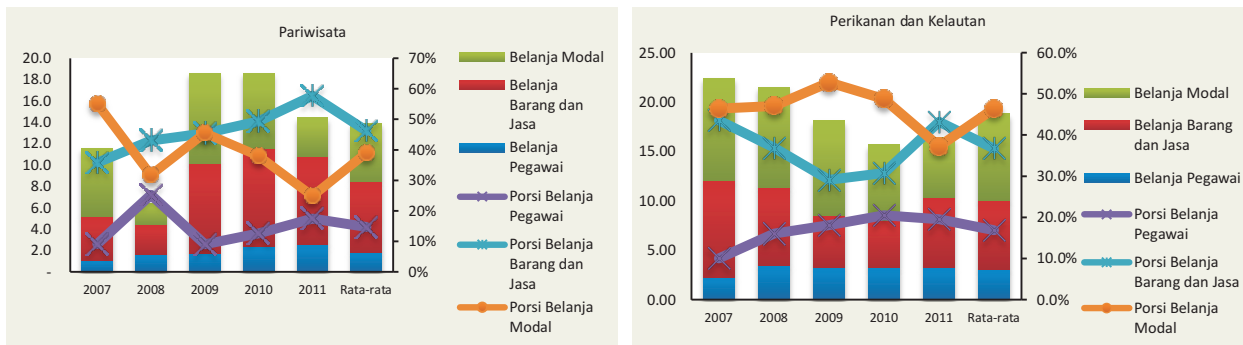
Gambar 5.15 Persentase Alokasi Belanja Sektor Pariwisata, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Raja Ampat



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, terbitan 2007-2012, data diolah

**Walaupun alokasi belanja riil untuk leading sektor hanya 2% dan 3% dari total belanja daerah, namun alokasi untuk belanja modal cukup tinggi yaitu 30% untuk pariwisata dan 46,5% untuk perikanan dan kelautan.** Besarnya porsi untuk belanja modal menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam membenahi kedua *leading sector* tersebut. Dengan mensinergikan sektor pariwisata dan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Raja Ampat, maka akan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Sektor-sektor ekonomi lainnya dapat dipacu menjadi input *intermediate* bagi *leading sector* dan sebaliknya juga *leading sector* dapat menjadi input *intermediate* bagi sektor lainnya. Keterkaitan antar sektor tersebut akan memberikan nilai tambah bagi daerah terutama berupa upah gaji, surplus usaha dan perolehan tambahan pajak bagi daerah. Realitasnya harus dijabarkan dalam program kegiatan pada masing-masing sektor ekonomi yang dibiayai oleh belanja daerah.

Gambar 5.16 Persentase Alokasi Belanja Sektor Pariwisata, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Raja Ampat

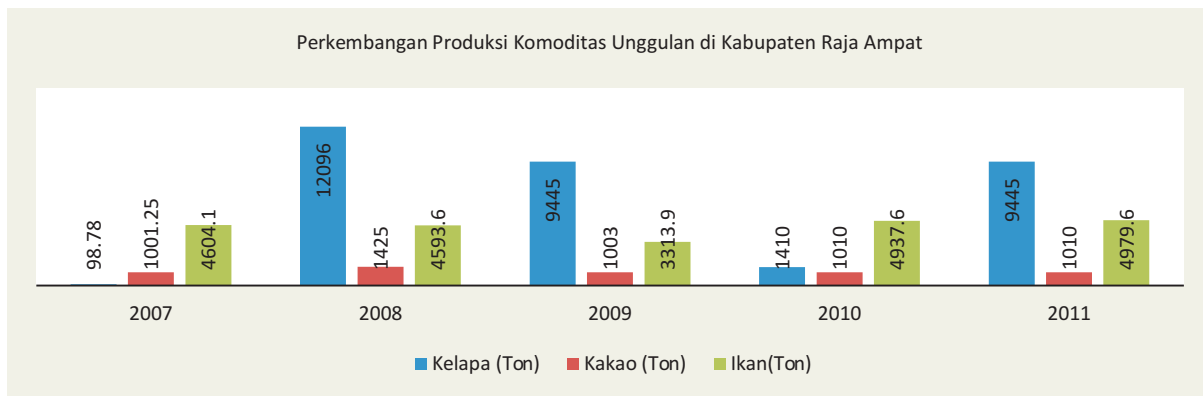


Sumber: APBD Raja Ampat, terbitan 2007-2012, data diolah

### 5.4.2. Kinerja Luaran dan Hasil Sektor Pariwisata, Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan selama tahun 2007 sampai tahun 2011 cenderung stabil bila dibandingkan dengan perkebunan kelapa, kecuali perkebunan kakao. Selain diusahakan oleh para nelayan, terdapat juga perusahaan-perusahaan dari luar Raja Ampat yang mengusahakan jenis-jenis hasil laut untuk di pasarkan di luar Raja Ampat bahkan di ekspor. Penyuluhan perikanan dan penyediaan peralatan perikanan yang cukup memadai bagi masyarakat lokal bisa menjadi pilihan yang baik mengingat sistem perikanan yang digunakan sebagian besar nelayan di Raja Ampat masih sangat tradisional. Akses pemasaran hasil perikanan juga perlu diupayakan pemerintah karena kesejahteraan perikanan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi namun juga hasil perikanan.

Gambar 5.17 Perbandingan Produksi komoditas Unggulan di Kabupaten Raja Ampat



Sumber: BPS, terbitan 2007-2012, data diolah

Penduduk yang bekerja di sektor perikanan cukup tinggi karena sebagian besar penduduknya tersebar di pulau-pulau, sehingga perhatian yang lebih pada sektor tersebut, akan dapat menghasilkan output yang lebih baik. Sektor unggulan lainnya yang dapat dikembangkan seperti pertanian (palawija), perkebunan, kehutanan dalam bentuk rehabilitasi kawasan hutan bahkan yang sedang dikembangkan saat ini berupa mutiara, rumput laut, teripang, kunjungan wisata, hotel/restoran, armada transportasi dan tempat wisata.

### 5.4.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Tingginya penduduk yang bekerja di sektor perikanan mengharuskan diberikan perhatian lebih pada sektor ini sehingga perikanan yang ada di Raja Ampat dapat berkembang. Penyuluhan perikanan dan penyediaan peralatan perikanan bisa menjadi pilihan bagi sebagian besar nelayan di Raja Ampat yang masih sangat tradisional. Akses pemasaran hasil perikanan juga perlu dipikirkan pemerintah karena kesejahteraan perikanan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi namun juga hasil perikanan. Informasi mengenai pariwisata masih terbatas pada keindahan alamnya, namun penataan infrastruktur belum dilakukan dengan baik sehingga wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat memilih base di Kota Sorong. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan, diperlukan perencanaan yang detail dan matang. Sering kali terlihat dengan jelas pembangunan-pembangunan sebelum ini tidak tepat sasaran dan tanpa perencanaan yang matang. Hal ini menyebabkan pembangunan yang telah dilaksanakan terbengkalai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tentu menimbulkan inefisiensi belanja bahkan kerugian bagi masyarakat. Program-program strategis telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan fokus pada leading sektor, sehingga memberikan dampak kepada sektor ekonomi lainnya.





6

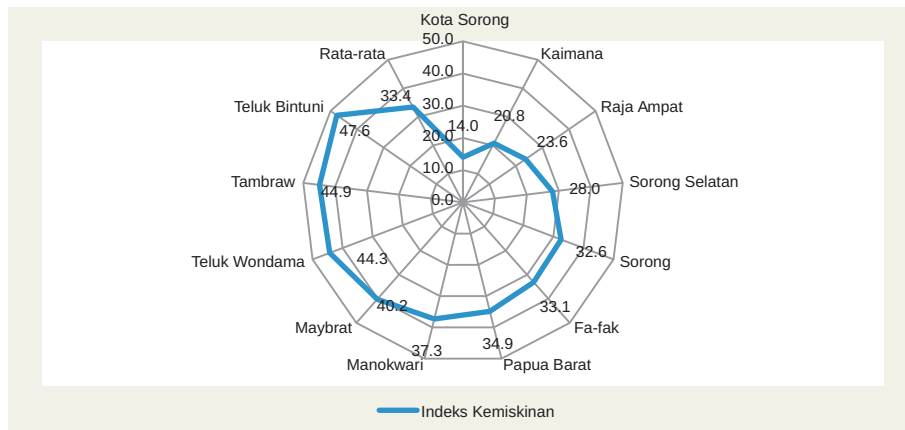
# ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



## 6.1. Analisis Kemiskinan dan Gender

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Raja Ampat mencapai 23,6 persen, tergolong tinggi tetapi masih lebih rendah dari tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Raja Ampat berada di bawah rata-rata Provinsi Papua Barat. Jumlah penduduk miskin di Papua Barat sebanyak 10 ribu jiwa dari 212,2 ribu jiwa. Walaupun tergolong lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lainnya dan bahkan lebih rendah dari tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Raja Ampat cenderung meningkat yang ditunjukkan peningkatan indeks kemiskinan dalam lima tahun terakhir.

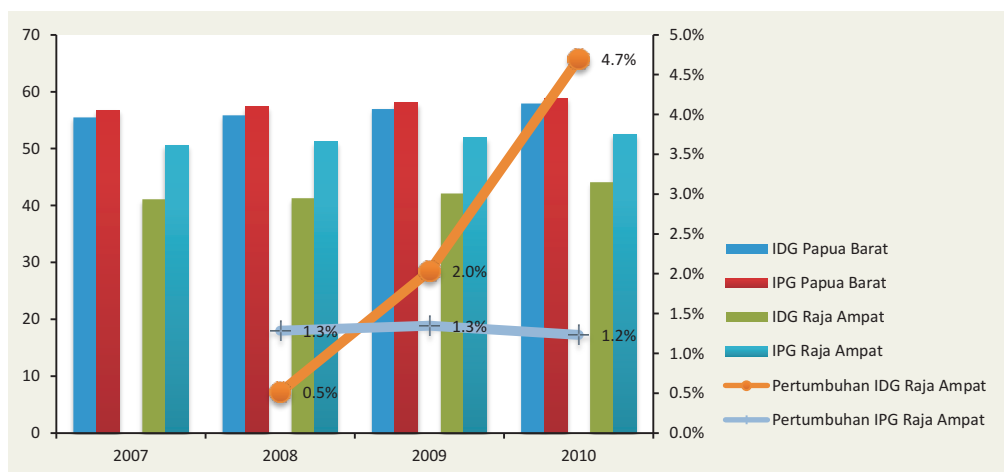
Gambar 6.1. Indeks Kemiskinan Kabupaten/Kota/Provinsi di Papua Barat



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2007-2012

Kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Raja Ampat masih tergolong tinggi. Hal ini nampak pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Untuk indeks IPG dapat dilihat bahwa dari tahun 2007-2010, Kabupaten Raja Ampat merupakan yang terendah di Provinsi Papua Barat dan pada tahun 2010 menjadi urutan ke tiga, namun dari segi nilai tidak mengalami perubahan secara signifikan. Kondisi yang sama terjadi pada indeks IDG Kabupaten Raja Ampat. Pertumbuhan IDG selama periode 2007-2010 mencapai 4,7 persen per tahun, artinya keterwakilan perempuan di parlemen, sebagai angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor nonpertanian mengalami peningkatan. Pada level provinsi, nilai IDG mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,46 persen per tahun dibandingkan dengan kabupaten Raja Ampat hanya 1,2 persen pertahun, yang artinya angka harapan hidup, tingkat melek aksara, angka partisipasi sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan pendapatan untuk kaum perempuan mengalami peningkatan, namun berada di bawah Provinsi Papua Barat. Hal ini nampak dari partisipasi angkatan kerja perempuan yang mengalami peningkatan selama kurun waktu tersebut.

Gambar 6.2. Indeks Pemberdayaan dan Pembangunan Gender Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, 2007-2010

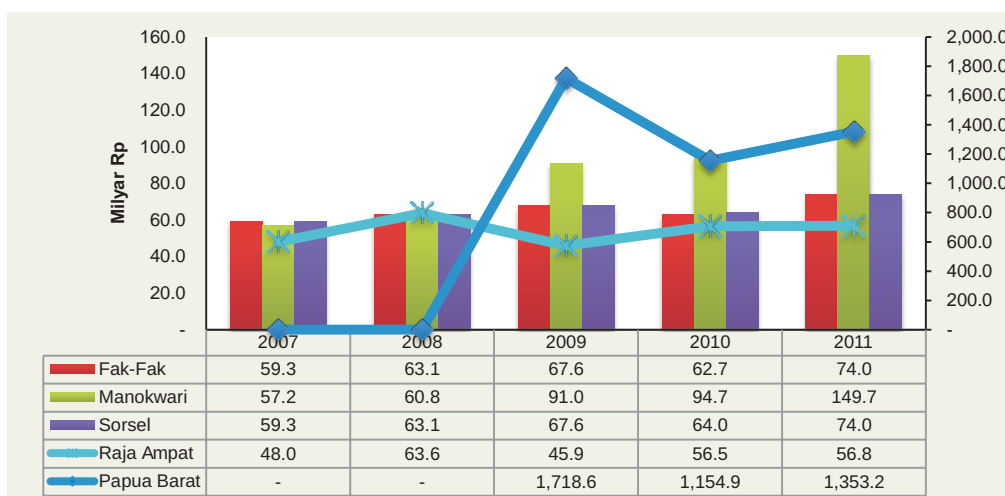


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2009-2012

## 6.2. Dana Otonomi Khusus

**Alokasi dana otonomi khusus ke Kabupaten Raja Ampat berfluktuasi selama periode 2007-2011.** Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, menyebabkan pengelolaan dana otonomi khusus tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua tetapi juga oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Metode pembagian dana otonomi khusus yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat adalah 60:40. Artinya, 60 persen dana otonomi khusus dikelola oleh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat dan 40 persen dikelola oleh pemerintah provinsi. Provinsi Papua Barat mulai mengelola dana otsus sejak tahun 2009 hingga saat ini. Secara umum Dana Otsus Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan alokasi pada setiap tahun di masing-masing Kabupaten dan Provinsi Papua Barat. Peningkatan Alokasi Dana Otsus ini disebabkan karena setiap tahunnya DAU Nasional meningkat, yang merupakan sumber atau porsi dari Dana Otsus. Besarnya Dana Otsus yang dialokasikan di Wilayah Papua dan Papua Barat sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Kebijakan pemerintah untuk Dana Otsus ini disalurkan untuk menopang 4 pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Perekonomian Rakyat.

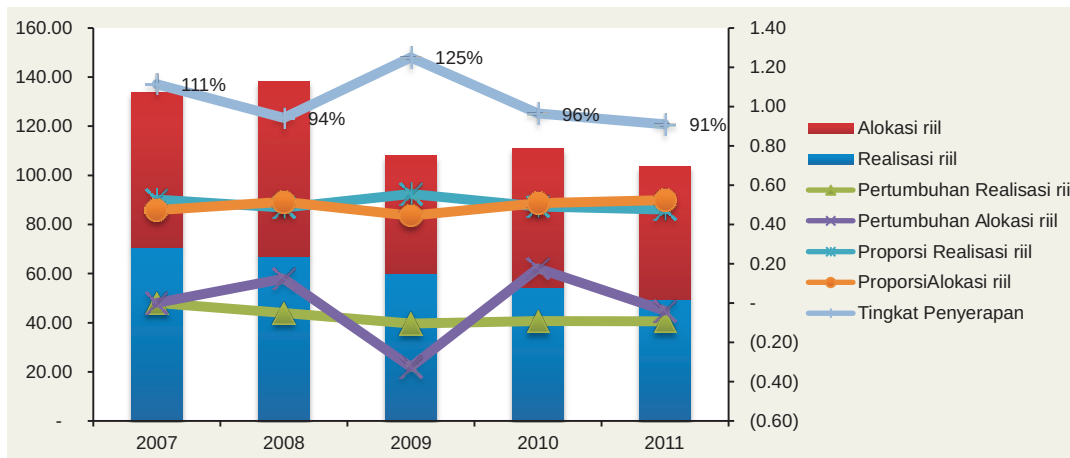
Gambar 6.3. Jumlah Dana Otonomi Khusus yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011



Sumber: APBD Provinsi Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, Manokwari dan Sorsel, 2007-2011

Penyerapan dari alokasi Otsus mencapai lebih dari 100 persen pada tahun 2007 dan 2009, tetapi mengalami penurunan hingga di bawah 100 persen pada tahun 2008, 2010 dan 2011. Realisasi belanja riil yang bersumber dari dana otsus mengalami penurunan nilai belanja dari 74 milyar tahun 2007 menjadi 49 milyar di tahun 2011. Realisasi dari dana otsus yang melebihi dari alokasi namun yang secara nominal mengalami peningkatan nilai alokasi, disebabkan keterlambatan alokasi dari pusat karena harus menunggu laporan relisasi penggunaan Otsus pada setiap semester. Keterlambatan ini mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami penundaan realisasi program yang berdampak pada pembayaran program kegiatan tersebut mengalami penundaan pada tahun berikutnya. Untuk itu perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan yang bersumber dari dana otsus tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi sehingga ke empat pilar utama akan saling mendukung didalam mewujudkan tujuan mensejahterakan masyarakat Papua dapat terwujud.

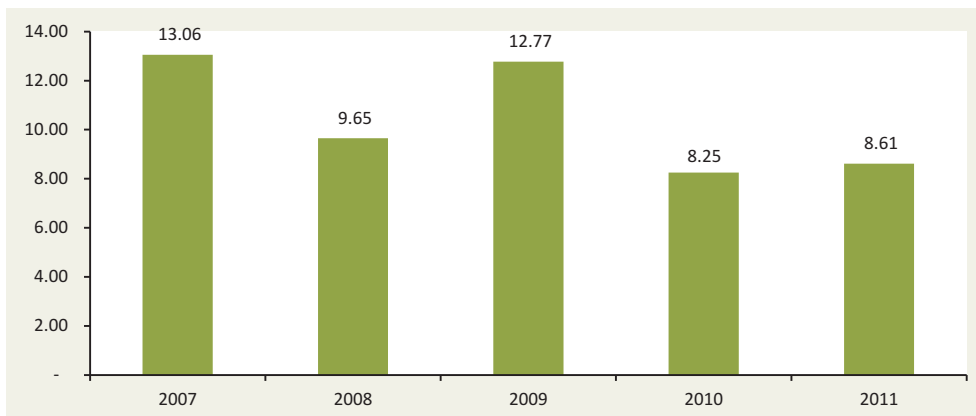
Gambar 6.4. Tingkat Penyerapan, Pertumbuhan dan Alokasi Dana Otsus Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Papua Barat 2012, Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2012

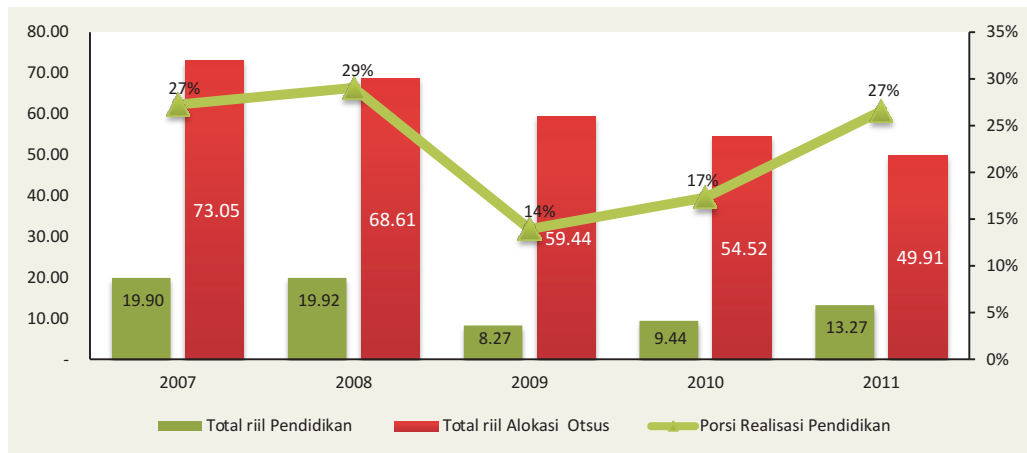
Kontribusi dana otonomi khusus terhadap total pendapatan cukup besar, meskipun berfluktuasi selama periode 2007-2011. Fluktuasi alokasi dana otsus di Raja Ampat ini lebih disebabkan oleh belum adanya format yang baku untuk pembagian dana otonomi khusus antara Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat serta antara kabupaten dan provinsi. Selain itu, munculnya daerah-daerah otonom yang baru menyebabkan penurunan dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah provinsi ke Kabupaten Raja Ampat. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 13,06 persen kemudian mengalami penurunan dan kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan namun tidak sebesar tahun 2007 lalu mengalami penurunan lagi pada tahun 2010 dan peningkatan pada tahun 2011.

Gambar 6.5. Proporsi Dana Otonomi Khusus terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Raja Ampat, 2007-2012

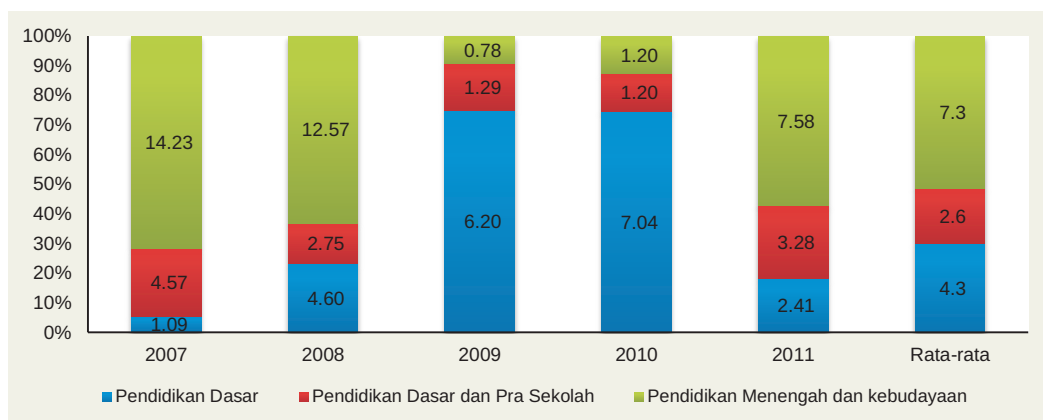
Gambar 6.6. Porsi Realisasi Dana Otsus untuk Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat, 2007-2011



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat

**Fokus utama alokasi dana otsus untuk Pendidikan selama 5 tahun kurang konsisten.** Pada tahun 2007 dan 2008 alokasi belanja difokuskan pada Pendidikan menengah dan kebudayaan, dan pada tahun 2009 dan 2010 difokuskan pada pendidikan dasar kemudian tahun 2011 difokuskan pada pendidikan menengah dan kebudayaan, sehingga selama kurun waktu tersebut telah teralokasi 51 persen untuk pendidikan menengah, 30 persen untuk pendidikan dasar dan 18 persen untuk pendidikan dasar dan pra sekolah.

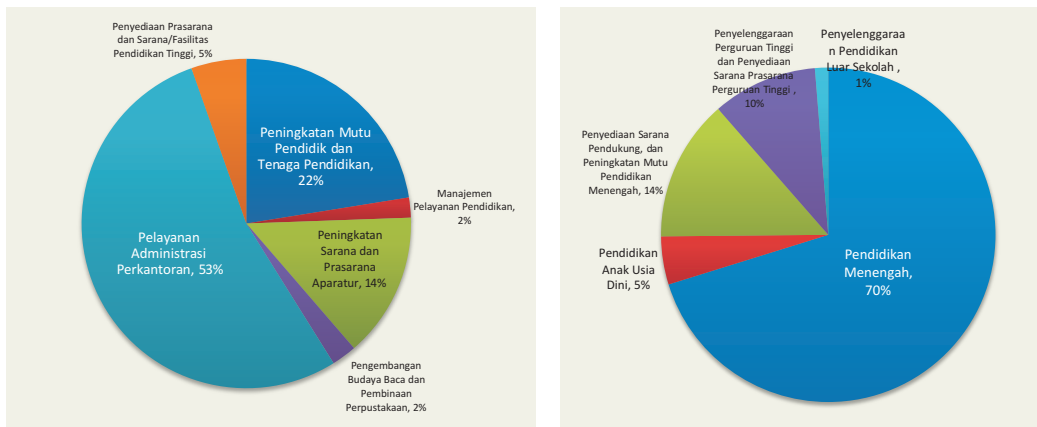
Gambar 6.7. Realisasi Dana Otsus untuk Berbagai Program Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat tahun 2007-2011



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat

**Lebih dari setengah dana Otsus untuk pendidikan dasar di Kabupaten Raja Ampat dipergunakan untuk pelayanan administrasi.** Alokasi untuk pendidikan dasar dialokasikan untuk program pelayanan administrasi mencapai 53 persen, pendidikan mutu pendidik mencapai 22 persen dan peningkatan sarana prasarana pendidikan sebesar 14 persen. Pendidikan menengah dialokasikan untuk program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun dan program Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun sebesar 6 persen dimana sisanya untuk pengadaan buku dan sarana penunjang lainnya. Untuk pendidikan menengah dan kebudayaan dialokasikan untuk program pendidikan menengah sebesar 70 persen dan program peningkatan sarana pendukung sebesar 14 persen sedangkan sisanya untuk penyelenggaraan perguruan tinggi dan pendidikan luar sekolah.

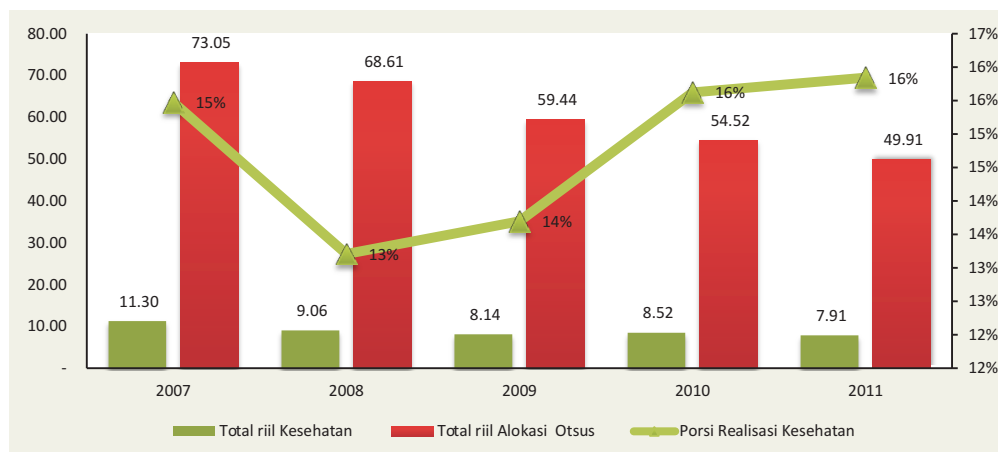
Gambar 6.8. Realisasi Dana Otsus untuk Berbagai Program Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan Menengah di Kabupaten Raja Ampat tahun 2007-2011



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat

**Alokasi Dana Otsus Sektor Kesehatan Kabupaten Raja Ampat cenderung menurun, tetapi dengan proporsi yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir.** Rata-rata perolehan sektor kesehatan selama 5 tahun mencapai 15 persen dari total dana otsus yang diterima. Selama kurun waktu tersebut walaupun penerimaan dana otsus menurun namun porsi untuk kesehatan cenderung meningkat hingga dari 16 persen tahun 2011, setelah hanya 13 persen pada tahun 2008. Peningkatan ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belanja pelayanan kesehatan wilayah kepulauan yang terus mengalami peningkatan di Kabupaten Raja Ampat selama periode tersebut.

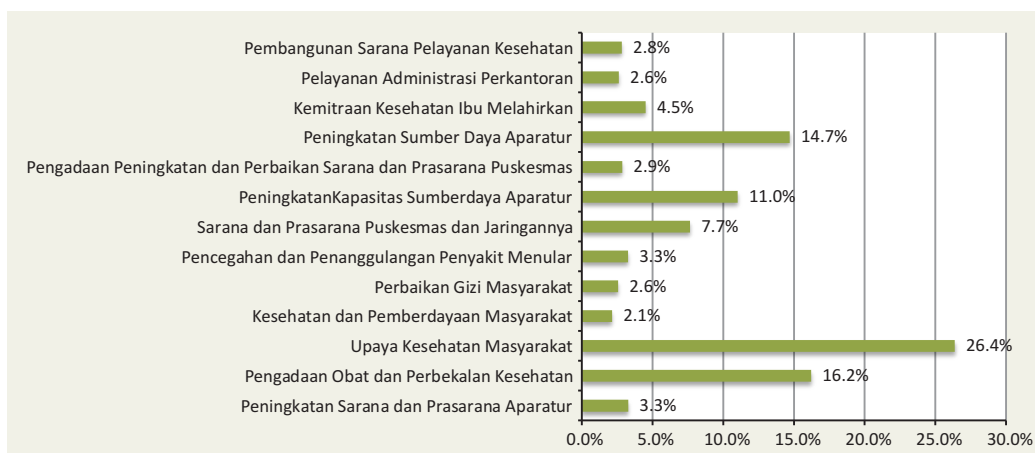
Gambar 6.9. Nilai Nominal dan Proporsi Dana Otsus Sektor Kesehatan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat

**Program upaya kesehatan menjadi fokus belanja program bidang kesehatan dana Otsus Kabupaten Raja Ampat selama periode 2007-2011.** Program upaya kesehatan masyarakat ini memperoleh alokasi anggaran sebesar 26,4 persen dari total belanja program bidang kesehatan dana Otsus Kabupaten Raja Ampat. Program pengadaan obat mencapai 16,2 persen dan peningkatan SDM aparatur dan kapasitas aparatur masing-masing 14,7 persen dan 11 persen. Program kegiatan ini menjadi prioritas bagi pengembangan kesehatan masyarakat. Program upaya kesehatan masyarakat difokuskan pada kegiatan-kegiatan pelayanan di Puskesmas.

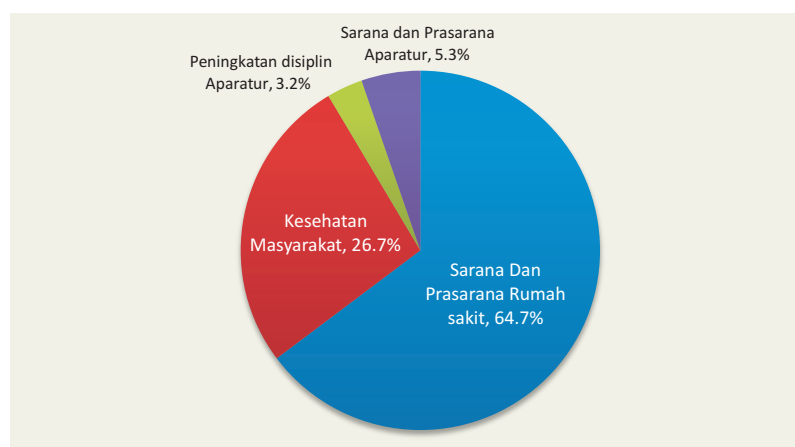
Gambar 6.10. Proporsi Belanja Program Kesehatan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat

Program pelayanan rumah sakit daerah difokuskan pada sarana dan prasarana rumah sakit Kabupaten Raja Ampat selama periode 2007-2011. Alokasi belanja untuk sarana dan prasarana rumah sakit mencapai 64,7 persen dari total belanja dana Otsus untuk RSUD Kabupaten Raja Ampat. Program kesehatan masyarakat mendapat alokasi sebesar 26,7 persen, kemudian sarana dan prasarana aparatur mencapai 5,3 persen dan disiplin aparatur 3,2 persen. Program pelayanan kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah karena untuk melayani masyarakat yang belum dapat terlayani di tingkat puskesmas bahkan untuk urusan rujukan ke Rumah sakit lainnya di luar Kabupaten Raja Ampat.

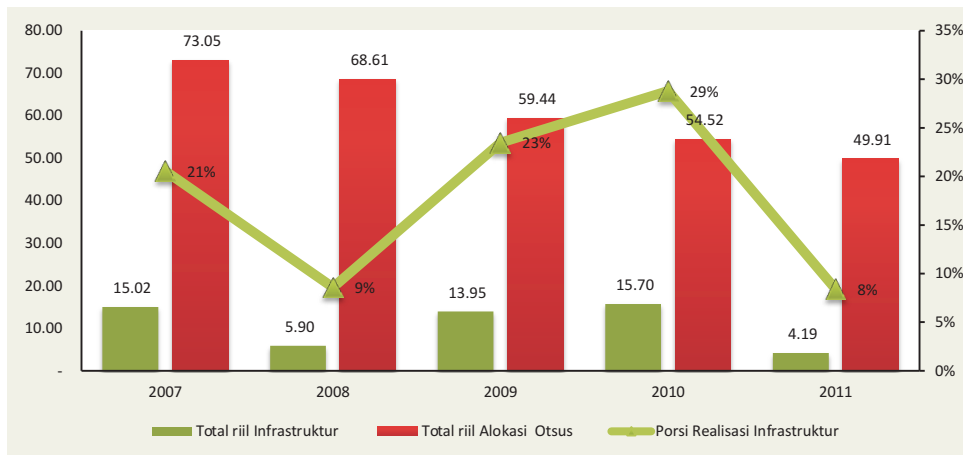
Gambar 6.11. Proporsi Belanja Program Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat

Alokasi dana untuk Infrastruktur mengalami peningkatan selama tahun 2007 hingga 2011 dengan rata-rata alokasi sebesar 18 persen dari total dana otsus. Belanja riil alokasi dana Otsus infrastruktur cenderung berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 29 persen. Peningkatan ini dimaksudkan untuk memenuhi rencana strategis kegiatan yang berkesinambungan yang terukur dalam kurun waktu tertentu atau dalam jangka menengah, maupun jangka panjang. Wujud dari program yang dilakukan yaitu untuk menghubungkan distrik-distrik yang difokuskan pada sentra-sentra aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga akan memudahkan masyarakat untuk mengakses pasar.

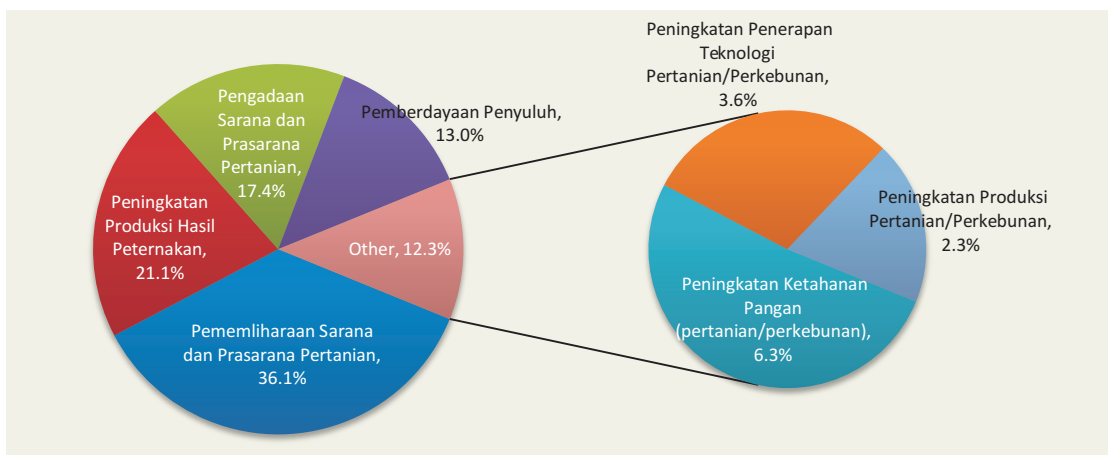
Gambar 6.12. Nilai Nominal dan Proporsi Dana Otsus Sektor Infrastruktur di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2007-2011



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat

**Alokasi dana Otsus perekonomian rakyat untuk sektor pertanian lebih difokuskan pada program pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.** Walaupun alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian hanya 1,5 persen namun program pemberdayaan masyarakat yang dibuat menyentuh masyarakat, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian yang mencapai 36,1 persen dengan total dana selama 5 tahun telah mencapai Rp. 17,9 milyar. Alokasi terbesar selanjutnya adalah peningkatan produksi hasil peternakan sebesar 21,1 persen, melebihi alokasi untuk pengadaan sarana dan prasarana pertanian sebesar 17,4 persen, pemberdayaan penyuluh yang hanya mencapai 13 persen. Selebihnya alokasi dana 12,3 persen dialokasikan untuk program lainnya, meliputi peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dan program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan).

Gambar 6.13. Proporsi Dana Otsus Perekonomian Rakyat untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2012

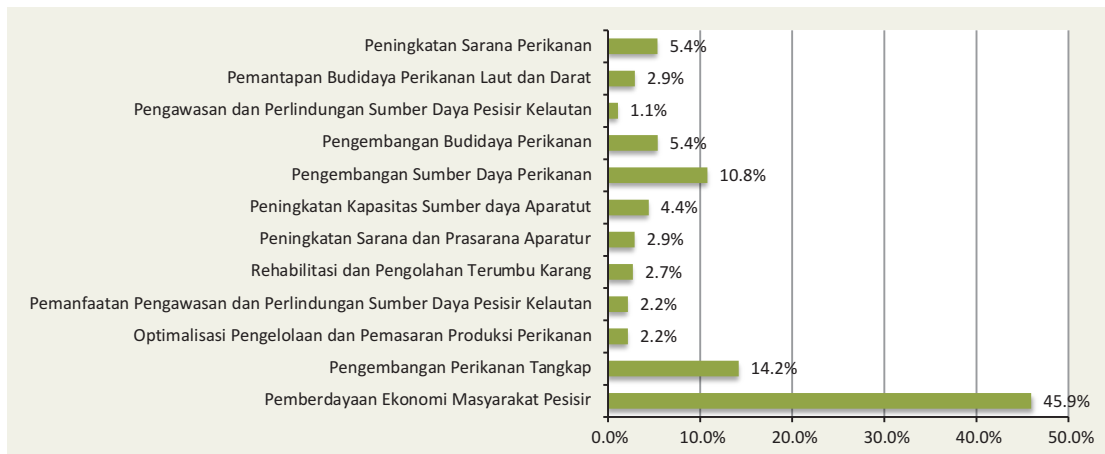


Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat

**Alokasi dana Otsus perekonomian rakyat untuk sektor perikanan dan kelautan lebih didominasi belanja program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.** Walaupun alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian hanya 2 persen namun program pemberdayaan masyarakat yang dibuat menyentuh masyarakat, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang mencapai 45,9 persen dengan total dana selama 5 tahun telah mencapai Rp 4,2 milyar. Dua program lainnya yang memperoleh alokasi terbesar selanjutnya adalah program pengembangan perikanan tangkap sebesar

14,2 persen, dan program pengembangan sumber daya perikanan sebesar 10,8 persen. Alokasi 29,1 persen dana otsus perekonomian rakyat untuk sektor perikanan terdistribusi pada sejumlah program, antara lain peningkatan sarana perikanan, pemantapan budidaya perikanan laut dan darat, pengembangan budidaya perikanan, rehabilitasi dan pengolahan terumbu karang, dan lain sebagainya.

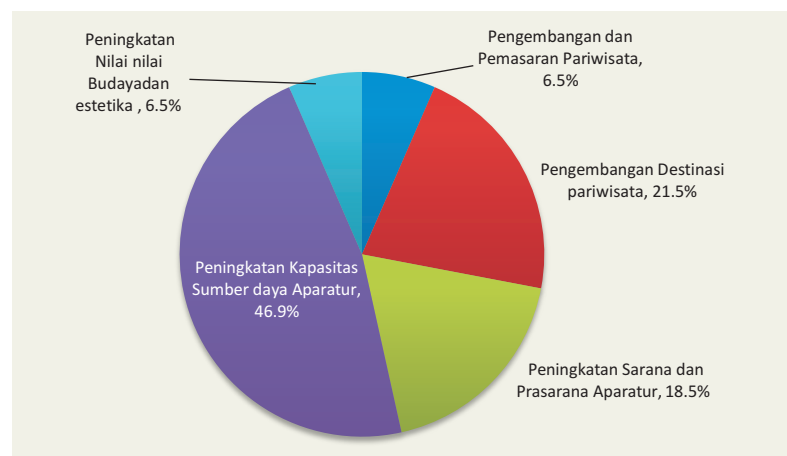
Gambar 6.14. Proporsi Alokasi Dana Otsus Untuk Program Perekonomian Rakyat di Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2012



Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat

**Alokasi dana Otsus perekonomian rakyat untuk sektor kepariwisataan didominasi untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pengembangan destinasi pariwisata.** Kedua program ini menyerap 68,4 persen dana otsus perekonomian rakyat untuk sektor kepariwisataan. Alokasi belanja untuk pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata diarahkan pada program peningkatan kapasitas aparatur yang mencapai 46,9 persen sedangkan pengembangan destinasi pariwisata yang langsung menyentuh masyarakat dialokasikan belanja sebesar 21,5 persen. Tiga program lainnya hanya menyerap 31,6 persen, yakni peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 18,5 persen, serta program peningkatan nilai-nilai budaya, dan program pengembangan dan pemasaran pariwisata masing-masing menyerap dana Otsus perekonomian rakyat untuk sektor pariwisata sebesar 6,5 persen.

Gambar 6.15. Proporsi Alokasi Dana Otsus Perekonomian Rakyat untuk Sektor Pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2012

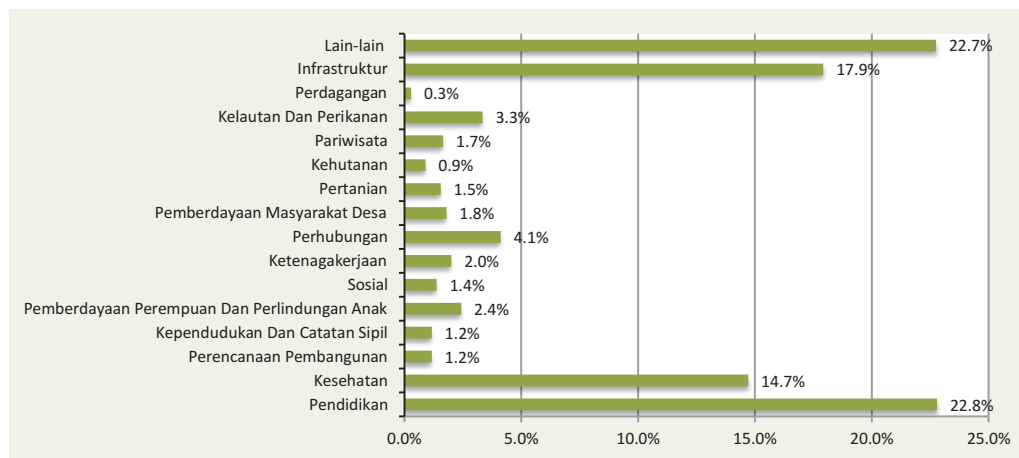


Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat



**Pembenahan perencanaan penganggaran yang mengacu pada amanat UU Otsus Papua belum dilakukan.** Berdasarkan Realisasi penggunaan dana Otsus pada tahun 2012, bidang pendidikan mendapatkan alokasi yang tertinggi yaitu 22,8, bidang kesehatan mendapat alokasi belanja sebesar 14,7 persen, infrastruktur sebesar 17,9 persen dan pemberdayaan masyarakat masing-masing pertanian sebesar 1,5 persen, pariwisata 1,7 persen, kelautan dan perikanan sebesar 3,3 persen. Berdasarkan amanat UU Otsus Papua, bidang kesehatan hanya mencapai 14,7 persen dari 15 persen dan pendidikan sebesar 22,8 persen dari 30 persen. Artinya, meskipun hingga saat ini alokasi dana Otsus untuk pendidikan dan pendidikan sudah merupakan yang terbesar, tetapi masih perlu ditingkatkan karena masih belum sesuai dengan ketentuan perundangan. Alokasi dana pendidikan masih membutuhkan tambahan dana otsus minimal 7,2 persen, sedangkan dana kesehatan membutuhkan proporsi tambahan yang lebih kecil yakni minimal 0,3 persen saja.

Gambar 6.16. Proporsi Alokasi Belanja Dana Otsus di Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2012

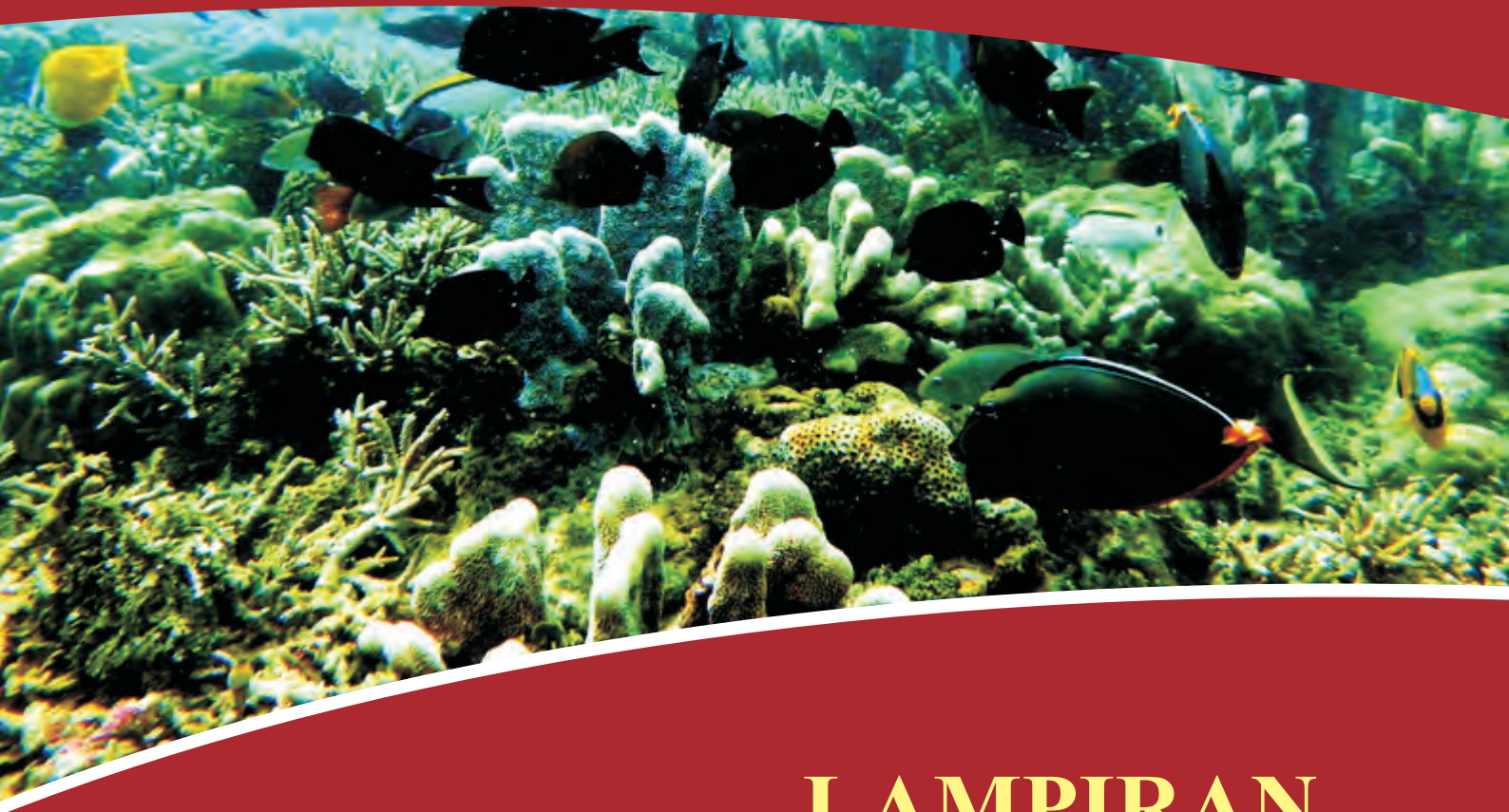


Sumber: Laporan Realisasi Dana Otsus Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat

### 6.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Tingkat kemiskinan Kabupaten Raja Ampat masih tergolong tinggi dan memiliki kecenderungan peningkatan, tetapi secara relatif merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah di Papua Barat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksi dari angka IPM, secara relatif dibandingkan daerah lainnya di Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Seiring dengan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang juga menunjukkan hasil yang semakin menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir. Perlu direkomendasikan sejumlah hal, antara lain: (1) Penyusunan masterplan pengentasan kemiskinan untuk menjadi acuan setiap SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD, serta acuan setiap kewilayahan untuk setiap distrik di Kabupaten Raja Ampat; (2) Pembetulan peningkatan IPM dengan fokus pada program utama untuk peningkatan indeks komposit daya beli masyarakat sebagai komponen utama rendahnya IPM Kabupaten Raja Ampat; (3) Mendorong peningkatan kualitas keterlibatan perempuan dalam pembangunan khususnya pada aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi dasar daerah, perikanan dan kelautan, serta kapariwisata.

Proses perencanaan dan penganggaran untuk alokasi dana Otsus belum sepenuhnya berjalan baik. Bukan hanya nampak pada fluktuasi yang cukup tajam, juga terlihat pada kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait dengan proporsi alokasi setiap sektor yang belum sepenuhnya diwujudkan. Perlu direkomendasikan, antara lain: (1) Prioritas alokasi otonomi khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan, perlu dibenahi lagi dan lebih difokuskan pada wilayah yang sulit dijangkau. Sehingga dengan adanya otonomi khusus maka keterjangkauan wilayah dapat diakses dan aktivitas perekonomian akan berjalan dengan baik; (2) Diperlukan indikator-indikator spesifik dalam pengalokasian dan pengukuran hasil kinerja dana Otsus di Kabupaten Raja Ampat.



# LAMPIRAN

## Lampiran A: Matriks Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab Pendahuluan	
Kesimpulan	Rekomendasi
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia menjadi salah satu tantangan utama pembangunan Kabupaten Raja Ampat	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu memberi perhatian serius berupa program kegiatan terhadap peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat terutama di sektor pariwisata, perikanan dan kelautan..
Bab Keuangan Daerah	
Kerangka peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah masih perlu dibenahi sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan anggaran yang layak dan realistis, harus memperhitungkan tingkat pemenuhan SPM dibidang pendidikan, kesehatan dan infratstruktur, penggunaan analisis standar harga, biaya dan belanja.</li> <li>b) Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi yang bersifat partisipatif</li> <li>c) Perencanaan dan penganggaran multi-tahun dan proses perencanaan anggaran yang terintegrasi pada masing-masing SKPD.</li> <li>d) Penyusunan perencanaan dan anggaran yang berbasis pada data dan hasil evaluasi.</li> </ul>
Penerimaan dan pembayaran kas serta surplus kas belum dikelola secara optimal. Pengadaan barang dan jasa perlu ditingkatkan koordinasi dan transparansinya. Sistem akuntansi dan manajemen belum terintegrasi secara baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan kapasitas keahlian bagi pejabat dan personil dibidang penatausahaan akuntansi perlu dilakukan secara intensif.</li> <li>b) Setiap penanganan belanja terdata secara teratur berdasarkan tingkat akurasi data akuntansi.</li> <li>c) Penyediaan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program dibuat secara teratur bagi kepentingan pelaporan akuntansi.</li> <li>d) Penyusunan laporan kinerja bagi setiap SKPD secara teratur</li> </ul>
Prosedur dan pengelolaan investasi daerah dan hibah telah dilaksanakan namun belum didukung oleh kebijakan pengelolaan hutang dan investasi yang sesuai dengan kerangka kebijakan nasional	Perlu disusun dan ditetapkan Peraturan daerah tentang Pinjaman Daerah dan Investasi Daerah yang mengacu pada PP. No. 54 Tahun 2005, bahkan perlu adanya regulasi daerah mengenai Penerimaan, Pencatatan, Pengelolaan dan Pelaporan Hibah
Perencanaan dan pengelolaan aset jangka panjang yang menunjang kelancaran aktivitas pemerintah belum ditangani secara efektif seperti kebijakan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset daerah yang mendukung tertib pengelolaan belum dilengkapi dengan sejumlah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan kebijakan</li> <li>b) Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan aset.</li> <li>c) Penataan kebijakan dan prosedur pemeliharaan aset, serta kebijakan, sistem dan prosedur pencatatan, perolehan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan serta pelaporan aset untuk menjamin pengamanan aset dengan baik.</li> <li>d) Penilaian aset untuk memastikan nilai dan status kepemilikan aset secara jelas.</li> <li>e) Penataan kebijakan dan prosedur pemeliharaan aset yang terintegrasi dengan proses perencanaan daerah.</li> <li>f) Penyusunan secara teratur tentang laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang daerah oleh pengelola barang daerah sebagai sumber utama pelaporan aset dalam neraca daerah.</li> <li>g) Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah dalam proses perencanaan, manajemen dan pengelolaan aset</li> </ul>
DPRD telah melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, namun belum diimbangi oleh akuntabilitas pemerintah terhadap publik secara memadai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Publikasi laporan keuangan pada media yang dapat diakses oleh publik</li> <li>b) Pemberian akses masyarakat pada sidang-sidang pembahasan rencana dan pertanggungjawaban keuangan di DPRD</li> </ul>

## Bab Pendapatan Daerah

Kesimpulan	Rekomendasi
Pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi ketergantungan terhadap dana perimbangan masih sangat besar, pada saat yang pendapatan dari PAD cenderung mengalami penurunan dan tidak stabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a). Melakukan inventarisasi aset dan identifikasi potensi aset daerah</li> <li>b). Perlu mengoptimalkan penerimaan Pajak dan Retribusi daerah, dengan cara mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah yang sudah ada, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir. Mengintensifkan sumber-sumber retribusi daerah, seperti retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu.</li> <li>c). Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah dalam manajemen, teknik inventarisasi, penilaian, akuntansi, dan pengelolaan aset.</li> </ul>
Pembiayaan defisit Kabupaten Raja Ampat selama periode 2007-2011 cenderung melampaui ketentuan perundangan.	Perlu menelusuri sumber defisit, salah satunya karena faktor belanja pegawai yang meningkat pesat

## Bab Belanja Daerah

Selama periode 2007-2011, total belanja pemerintah Kabupaten Raja Ampat tumbuh 12,52 persen per tahun atau rata-rata Rp 564,98 miliar per tahun. Tingkat Efektivitas pengelolaan belanja daerah masih tergolong rendah yang terlihat dari masih adanya gap antara rencana dengan realisasi belanja.	Pengelolaan belanja daerah mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga pada pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas SDM aparat pemerintah daerah.
Belanja modal mendominasi struktur belanja klasifikasi ekonomi, namun perkembangannya per tahun menurun. Kondisi yang sama untuk sektor infrastruktur. Proporsi belanja sektor pendidikan cenderung meningkat tetapi belum memenuhi regulasi pemerintah 20%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan proporsi belanja infrastruktur dan belanja sektor strategis lainnya seperti sektor pariwisata, perikanan dan kelautan sebagai leading sektor.</li> <li>b) Pembenahan terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran.</li> <li>c) Mensinkronkan dokumen perencanaan daerah dengan pengalokasian belanja terhadap sektor yang menjadi prioritas utama.</li> <li>d) Proporsi belanja pendidikan ditingkatkan hingga mencapai 20 persen sesuai dengan regulasi nasional.</li> <li>e) Menekan komponen-komponen belanja pegawai dan barang dan jasa yang tidak prioritas.</li> </ul>

## Bab Sektor Strategis

Sektor Pendidikan	
Terbatasnya tenaga pengajar tidak hanya karena persoalan sedikitnya jumlah guru tetapi juga komitmen guru. Pada aspek lainnya terjadi beban tanggungjawab yang lebih besar pada sebagian guru, sehingga pada beberapa kasus dijumpai ketidak efektifan seorang guru yang harus berada pada beberapa kelas dalam waktu bersamaan. Ditinjau dari kondisi geografis jumlah sarana sudah tergolong cukup baik untuk gedung sekolah SD, SMP dan SMK tetapi perbandingan tenaga pengajar dengan murid masih kurang memadai, bahkan terdapat gedung sekolah yang belum memiliki tenaga guru yang tetap. Untuk anak pra sekolah (TK) belum mendapatkan porsi yang cukup apabila dibandingkan dengan jumlah distrik di Raja Ampat, dimana dari 124 kampung hanya ada 10 TK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a). Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan cara menambah tenaga pengajar, gedung sekolah, pengadaan meubelair, mess sekolah, buku pelajaran, pengembangan SMA unggulan dan ketrampilan tenaga pendidik</li> <li>b). Perencanaan penganggaran terhadap program-program kegiatan pendidikan harus dibenahi sehingga alokasi anggaran maupun outputnya bisa sejalan dengan kebutuhan sektor pendidikan terutama untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan serta sarana dan prasarana.</li> <li>c). Pembenahan perencanaan dan penganggaran dana Otsus yang mengacu pada amanat UU Otsus Papua sebesar 30%.</li> </ul>
Sektor Infrastruktur	
Ketersediaan sarana dan prasarana masih minim khususnya bagi kepentingan masyarakat.	Penyediaan yang lebih memadai dapat dibenahi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang pengembangannya meliputi : (1) transportasi darat, laut dan udara; (2) sumberdaya air; (3) sarana jaringan telekomunikasi; (4) Sumber-sumber energi listrik tenaga mikro hidro; (5) pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan

## Sektor Parwisata, Perikanan, dan Kelautan

### Kesimpulan

Tingginya penduduk yang bekerja di sektor perikanan mengharuskan diberikan perhatian lebih pada sektor ini sehingga perikanan yang ada di Raja Ampat dapat berkembang

### Rekomendasi

- a) Penyuluhan perikanan dan penyediaan peralatan perikanan bisa menjadi pilihan bagi sebagian besar nelayan di Raja Ampat yang masih sangat tradisional.
- b) Penataan infrastruktur.
- c) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan, diperlukan perencanaan yang detail dan matang
- d) Mengembangkan program peningkatan industri pengolahan rumah tangga untuk produk hasil perikanan dan kelautan dari sisi permodalan, produksi, manajemen, maupun pemasaran.

### Isu-isu Strategis

Tingkat kemiskinan Kabupaten Raja Ampat masih tergolong tinggi dan memiliki kecenderungan peningkatan, tetapi secara relatif merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah di Papua Barat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksi dari angka IPM, secara relatif dibandingkan daerah lainnya di Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Seiring dengan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang juga menunjukkan hasil yang semakin menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir.

- a) Penyusunan masterplan pengentasan kemiskinan untuk menjadi acuan setiap SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD, serta acuan setiap kewilayahan untuk setiap distrik di Kabupaten Raja Ampat.
- b) Pembinaan peningkatan IPM dengan fokus pada program utama untuk peningkatan indeks komposit daya beli masyarakat sebagai komponen utama rendahnya IPM Kabupaten Raja Ampat.
- c) Mendorong peningkatan kualitas keterlibatan perempuan dalam pembangunan khususnya pada aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi dasar daerah, perikanan dan kelautan, serta kapariwisata.
- d) Memperbesar kemampuan akses penduduk miskin dan perempuan di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas sasaran kebijakan terhadap pendidikan, kesehatan.

Proses perencanaan dan penganggaran untuk alokasi dana Otsus belum sepenuhnya berjalan baik. Bukan hanya nampak pada fluktuasi yang cukup tajam, juga terlihat pada kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait dengan proporsi alokasi setiap sektor yang belum sepenuhnya diwujudkan.

- a) Prioritas alokasi otonomi khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan, perlu dibenahi lagi dan lebih difokuskan pada wilayah yang sulit dijangkau. Sehingga dengan adanya otonomi khusus maka keterjangkauan wilayah dapat diakses dan aktivitas perekonomian akan berjalan dengan baik.
- b) Diperlukan indikator-indikator spesifik dalam pengalokasian dan pengukuran hasil kinerja dana Otsus di Kabupaten Raja Ampat.

## Lampiran B: Master Tabel

### B1. Pendapatan Berdasarkan Sumber (Juta Rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>PENERIMAAN</b>					
<b>PAD</b>	8,388.05	4,140.90	62,028.17	18,293.93	17,398.62
<b>Pajak Daerah</b>	133.49	167.90	558.54	1,161.33	686.14
Pajak Hotel	-	0.90	55.15	38.08	0.90
Pajak Restoran	-	-	28.31	86.74	10.00
Pajak Hiburan	-	-	2.32	0.73	-
Pajak Reklame	11.82	20.00	26.86	22.75	30.00
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-	-	415.87	1,013.03	-
Pajak Parkir	-	-	-	-	-
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Pajak Lingkungan	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bangunan	-	-	0.14	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Pajak Radio	1.15	5.00	-	-	-
Pajak Bangsa Asing	109.76	127.00	3.90	-	263.00
Pajak Pendaftaran Perusahaan	10.77	15.00	-	-	382.24
<b>Retribusi Daerah</b>	1,554.95	1,339.00	2,111.74	6,205.26	1.48
Retribusi Jasa Umum	186.95	-	1,016.53	487.27	-
Retribusi Jasa Usaha	-	-	630.97	4,018.36	-
Retribusi Perizinan Tertentu	1,368.00	-	464.24	1,699.62	-
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	-	-	32.62	2,983.06	1,772.80
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-	15.71	2,983.06	-
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	-	-	-
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	16.91	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	6,699.61	2,634.00	59,325.27	7,944.28	14,938.20
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-	77.50	-	-
Jasa Giro	1,279.82	-	1,639.77	-	-
Pendapatan Bunga Deposito	-	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	31.02	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	5.81	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	-	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian	2.95	-	1,190.73	-	-
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-	-
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	-	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
Pendapatan lain-lain	423.69	-	56,380.44	-	-
Penerimaan dari unit kerja	-	-	-	-	-
<b>Dana Perimbangan</b>	394,553.14	785,216.89	398,346.36	519,240.95	529,108.56
<b>Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak</b>	93,502.14	71,064.76	26,221.63	150,456.44	90,210.59
Dana Bagi Hasil Pajak	24,493.01	-	6,077.90	9,829.54	9,659.71

	2007	2008	2009	2010	2011
Bagi Hasil Bukan Pajak	69,009.13	-	20,143.73	140,626.90	80,550.88
<b>Dana Alokasi Umum</b>	246,871.00	296,123.51	355,610.98	314,195.71	372,081.37
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	54,180.00	418,028.62	16,513.75	54,588.80	66,816.60
<b>BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH</b>	-	101,131.73	132,928.28	115,141.26	114,635.95
<b>Pendapatan Hibah</b>	52,649.65	-	-	-	50,924.06
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	-	-	50,924.06
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	-	-	-	-	-
<b>Dana Darurat</b>	-	-	-	-	-
Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	-	-	-	-	-
<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	640.95	527.66	-	387.80	769.82
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	640.95	-	-	387.80	769.82
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)	-	-	-	-	-
<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	48,008.74	100,604.08	132,928.28	114,753.47	62,942.07
Dana Penyesuaian	-	36,962.60	86,990.65	58,244.84	6,146.49
Dana Otonomi Khusus	48,008.74	63,641.48	45,937.63	56,508.63	56,795.58
<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	3,999.95	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	3,999.95	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Dari Kota lainnya	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	402,941.19	890,489.52	593,302.81	652,676.14	661,143.13

## B2. Belanja Berdasarkan Urusan Wajib (Juta Rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011
Urusan Pendidikan	50,356.37	79,667.09	61,706.01	87,896.15	166,958.46
Urusan Kesehatan	30,961.58	41,334.51	56,455.96	53,217.62	57,731.65
Urusan Pekerjaan Umum	119,101.75	247,805.00	131,122.04	162,787.47	103,375.79
Urusan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-
Urusan Penataan Ruang	-	-	-	-	1,626.31
Urusan Perencanaan Pembangunan	9,040.46	11,066.91	15,093.79	14,328.11	12,169.94
Urusan Perhubungan	40,486.60	26,549.95	38,882.99	26,769.92	28,013.97
Urusan Lingkungan Hidup	-	-	2,216.53	3,445.58	4,413.94
Urusan Pertanahan	-	-	-	-	-
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	5,545.86	5,726.25	9,905.77	2,798.88	3,149.60
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	989.60	4,474.47	3,748.86	5,815.21	6,533.32
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	-	-	-	-
Urusan Sosial	1,898.82	3,916.40	5,434.50	7,596.87	14,143.27
Urusan Ketenagakerjaan	-	-	5,507.39	16,110.11	12,222.45
Urusan Koperasi dan UKM	1,768.79	1,821.63	-	-	496.00
Urusan Penanaman Modal	-	-	-	-	-

	2007	2008	2009	2010	2011
Urusan Kebudayaan	-	-	-	-	-
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	-	-	992.10	3,983.72	5,961.71
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2,018.17	4,194.36	11,718.89	6,755.89	8,709.10
Urusan Pemerintahan Umum	136,131.49	170,658.41	158,420.68	178,755.39	163,910.38
Urusan Kepegawaian	-	-	-	-	-
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,763.27	17,141.97	18,347.29	20,506.09	40,702.09
Urusan Statistik	-	-	-	-	-
Urusan Kearsipan	-	-	-	-	-
Urusan Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-
Perpustakaan	-	-	592.25	2,232.63	3,531.27
Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>405,062.76</b>	<b>614,356.94</b>	<b>520,145.06</b>	<b>592,999.65</b>	<b>633,649.24</b>

### B3. Belanja Berdasarkan Urusan Pilihan (Juta Rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011
Urusan Pertanian	7,605.18	8,962.73	8,665.16	11,190.23	14,287.53
Urusan Kehutanan	4,435.56	4,768.58	4,617.19	5,330.96	6,763.23
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	7,391.56	17,199.40	24,811.87	31,441.31	34,008.99
Urusan Pariwisata	8,476.41	5,082.92	16,273.12	17,287.12	14,933.16
Urusan Kelautan dan Perikanan	16,412.90	17,677.44	15,512.42	14,025.25	17,037.40
Urusan Perdagangan	1,633.74	3,236.18	-	-	2,302.09
Urusan Industri	-	-	4,981.21	-	4,470.32
Urusan Ketransmigrasian	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>45,955.36</b>	<b>56,927.24</b>	<b>74,860.97</b>	<b>79,274.87</b>	<b>93,802.72</b>

### B4. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Juta Rupiah)

Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Belanja tidak langsung</b>	66,092.95	108,731.87	143,944.04	182,052.61	241,901.75
Pegawai	50,289.85	86,653.34	100,197.60	137,894.74	213,186.90
Bunga	-	-	-	-	-
Hibah/subsidi	2,541.00	2,746.04	29,476.43	32,004.70	18,150.53
Bantuan Sosial	10,371.66	16,884.01	6,624.75	6,728.67	5,401.77
Bagi Hasil ke Daerah Bawahan	-	-	-	-	-
Bantuan ke Daerah Bawahan	2,457.57	2,448.48	5,645.40	5,424.50	5,162.55
Tidak Terduga	432.88	-	1,999.85	-	-
Bantuan kepada Lembaga Vertikal	-	-	-	-	-
<b>Belanja langsung</b>	384,925.16	562,552.31	451,061.99	490,221.91	485,550.21
Pegawai	14,772.99	17,626.49	26,118.16	20,375.76	25,945.00
Barang dan Jasa	120,602.28	133,326.14	148,990.91	177,293.40	225,517.26
Modal	249,549.90	411,599.67	275,952.92	292,552.74	234,087.95
<b>Total</b>	<b>451,018.11</b>	<b>671,284.18</b>	<b>595,006.03</b>	<b>672,274.52</b>	<b>727,451.96</b>



## Lampiran C: Catatan Metodologi PERA

Laporan studi *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) terbagi atas 6 (enam) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan; Bab II Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM); Bab III Analisis Pendapatan Daerah; Bab IV Analisis Belanja Daerah; Bab V Analisis Sektor Strategis, Bab VI Analisis Isu Lokal. Setiap bab ditutup dengan sub-bab kesimpulan dan rekomendasi. Khusus untuk analisis sektor strategis, masing-masing sektor dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Data yang digunakan untuk analisis studi PERA secara umum dibagi atas dua kategori, yaitu (i) Data Fiskal (Keuangan Daerah), (ii) Data Non-Fiskal. Data Fiskal meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok, APBD Perubahan, dan APBD Realisasi (Pertanggungjawaban Kepala Daerah). Sementara data Non-Fiskal meliputi data makro ekonomi daerah, indikator pembangunan sosial, data kinerja *output* dan *outcome* sektor-sektor strategis (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian), dan data pembangunan gender, serta data dokumen perencanaan.

### Data Fiskal (APBD)

Seluruh data APBD diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota yang menjadi wilayah studi PERA pada lima Provinsi di Indonesia (Jawa Timur, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat) dalam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Rentang waktu data tahun 2007 hingga 2011 dengan tiga kategori data, yaitu APBD Pokok, APBD Perubahan dan APBD Realisasi. Selain itu, data rincian objek PAD diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah masing-masing kabupaten.

Data pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah seluruhnya dinyatakan dalam angka/nilai riil dengan menggunakan tahun dasar (*base-year*) 2010. Artinya, angka tersebut telah dideflator berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2010 (2010=100) atau inflasi 2010. Cara ini dilakukan untuk mengamati dan mengukur perkembangan anggaran secara riil dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2007-2011.

Bagi kabupaten studi PERA yang tidak memiliki angka inflasi, ada dua alternatif yang dapat dilakukan untuk menghitung data keuangan secara riil yaitu: (i) menggunakan angka inflasi yang terdekat dengan kabupaten tersebut, (ii) menghitung melalui PDRB deflator.

Data APBD dipergunakan untuk menganalisis 3 bab dalam struktur Laporan PERA yaitu: (i) Bab III Pendapatan daerah yang meliputi gambaran pendapatan pendapatan daerah kabupaten PERA, Struktur pendapatan daerah dan analisis pembiayaan daerah, (ii) Bab IV Belanja daerah yang meliputi Gambaran umum perkembangan belanja daerah, belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi, dan belanja daerah berdasarkan sektor, (iii) Bab V Isu Strategis khususnya menganalisis besaran alokasi belanja untuk masing-masing sektor-sektor strategis.

Analisis belanja untuk sektor strategis meliputi sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Data belanja sektor infrastruktur merupakan penggabungan atau penjumlahan belanja urusan pekerjaan umum, urusan permukiman, dan urusan perhubungan; Data belanja sektor pendidikan merupakan penjumlahan belanja urusan pendidikan, urusan kebudayaan dan urusan perpustakaan; Data belanja sektor kesehatan adalah belanja urusan kesehatan; dan data belanja sektor pertanian merupakan penjumlahan dari belanja urusan pertanian dan urusan ketahanan pangan. Selain itu, beberapa kabupaten menganalisis belanja pembangunan gender yang diproxy dari belanja urusan pemberdayaan perempuan dan urusan buruh migran; dan belanja pada urusan Kesbangpolinmas terkait dengan mitigasi bencana.

Selain data APBD, data APBN juga dianalisis terutama pada bagian belanja daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran besaran dana APBN yang dibelanjakan di masing-masing kabupaten yang menjadi studi PERA, baik berdasarkan organisasi, maupun berdasarkan fungsi.

Khusus untuk Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM) dianalisis dengan menggunakan hasil survey. Penilaian keuangan daerah mencakup aspek: (1) kerangka peraturan perundang-undangan; (2) perencanaan dan penganggaran; (3) pengelolaan kas; (4) pengadaan barang dan jasa; (5) akuntansi dan pelaporan; (6) pengawasan internal; (7) hutang dan investasi publik; (8) pengelolaan aset; dan (9) audit dan pengawasan eksternal. Kesembilan aspek tersebut dikelompokkan menjadi ke dalam tiga (3) bidang strategis, yakni: (1) perencanaan dan penganggaran; (2) pelaksanaan anggaran; dan (3) *oversight* dan akuntabilitas. Setiap bidang terdiri atas beberapa sub-bidang strategis dan setiap sub-bidang strategis terdiri atas beberapa pertanyaan (indikator penilaian).

Bidang Strategis	Sub-Bidang Strategis	Indikator
<b>Perencanaan dan Penganggaran</b>	Perencanaan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah tersedia perencanaan dan penganggaran multi tahun, RPJMD, Renstra, dan Renja SKPD?</li> <li>Apakah target anggaran disusun realistis?</li> <li>Apakah terdapat sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif?</li> </ul>
	TAPD dan Tupoksinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah setiap elemen dalam TAPD menjalankan tupoksinya?</li> <li>Apakah terdapat evaluasi terhadap tupoksi?</li> <li>Bagaimana kapasitas perencanaan dan penganggaran di SKPD?</li> <li>Apakah koordinasi antar unit kerja sudah efektif?</li> </ul>
	Pembahasan APBD di DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana proses pembahasan?</li> <li>Bagaimana ketepatan waktu pembahasan APBD-APBD P?</li> <li>Bagaimana ketepatan waktu pengesahan APBD-APBDP?</li> <li>Apakah target anggaran disusun secara realistis?</li> <li>Permasalahan apa yang ditemukan?</li> </ul>
	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama APBD, dapat diakses oleh publik?</li> <li>Apakah disusun anggaran kas sebagai mekanisme pengendalian dan pengukuran kinerja?</li> <li>Apakah ada MIS yang digunakan? Bagaimana keterkaitannya dengan MIS lain?</li> <li>Apakah ada konsistensi antara RPJMD- RKPd dan RKPd-APBD?</li> </ul>
<b>Pelaksanaan Anggaran</b>	Institusi PKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah sudah terbentuk SKPD Pengelola Keuangan dan aset daerah?</li> <li>Bagaimana struktur institusi PKD?</li> <li>Apakah terdapat kerangka transparansi dan keterlibatan publik</li> </ul>
	Kondisi SDM Pengelola Keuangan Daerah (PKD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana kondisi SDM PKD, baik di SKPKD dan SKPD?</li> <li>Apakah SDM PKD telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis secara terencana dan memadai?</li> </ul>
	Kerangka Regulasi PKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah kerangka regulasi daerah untuk PKD sudah tersedia?</li> <li>Apakah terdapat kebijakan, prosedur dan pengendalian untuk pengelolaan kas yang efisien dan efektif?</li> </ul>
	Optimalisasi PAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah terdapat sistem penagihan dan pemungutan PAD yang efisien?</li> <li>Apakah PAD sudah dikumpulkan secara optimal berdasarkan potensi daerah?</li> <li>Bagaimana dengan penerapan UU 28/ 2009?</li> </ul>
	E-Procurement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah terbentuk dan berfungsi?</li> </ul>
	Sistem Informasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada SIM yang digunakan? Bagaimana keterkaitannya dengan SIM lain?</li> <li>Bagaimana pencatatan sebuah aset dan cara menilai aset?</li> <li>Apakah transaksi keuangan pemerintah tercatat secara akurat dan disajikan tepat waktu?</li> <li>Apakah laporan keuangan dan informasi manajemen dapat diandalkan?</li> </ul>
<b>Oversight dan Accountability</b>	Struktur dan Kondisi SDM Pemeriksa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana struktur dan kondisi SDM Inspektorat?</li> </ul>
	Standar dan proses audit internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Inspektorat mempunyai SOP dan bisa menjalankan tugasnya secara efektif?</li> <li>Apakah Standar dan proses audit internal dapat diaplikasikan dengan baik?</li> <li>Apakah program audit secara regular dikaji dan direvisi?</li> <li>Apakah ada temuan signifikan dari internal audit?</li> </ul>
	Audit Eksternal dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apa saja temuan penting pada LHP LKPD beberapa tahun terakhir?</li> <li>Bagaimana tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut?</li> <li>Bagaimana status opini LHP LKPD selama 5 tahun terakhir?</li> </ul>
	Akses Publik atas LKPD dan LHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Publik dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan audit?</li> <li>Apakah LKPD dan LHP LKPD dipublikasikan ke masyarakat?</li> </ul>
	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah terdapat kebijakan, prosedur serta pengendalian pinjaman dan investasi daerah?</li> </ul>

Para responden diminta untuk menjawab “Ya” atau “Tidak” untuk setiap pertanyaan yang diwakili oleh masing-masing indikator. Skor dihitung berdasarkan presentase jawaban “Ya”. Jawaban “Ya” diberi score 1 dan 0 untuk jawaban “Tidak”. Untuk menjamin akurasi data, maka setiap jawaban “Ya” harus didukung oleh kelengkapan dokumen terkait dan atau diperiksa silang dengan responden tambahan. Tidak semua sub-bidang strategis memiliki jumlah indikator yang sama, sehingga berimplikasi terhadap bobot penilaian.

Responden PFM meliputi SKPD seperti Bappeda, Bagian Hukum Setda, bagian Keuangan Setda, bagian Humas Dinas Komunikasi dan Informasi, Seketaris DPRD, Bagian Akuntansi, Pembukuan dan Verifikasi BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Daerah, Inspektorat Daerah, dan beberapa lainnya. Bukti-bukti dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, APBD, dan dokumen lainnya. Interpretasi hasil analisis PFM dalam studi PERA menggunakan dua metode yaitu metode perbandingan dan metode pengkategorian yang telah dilakukan oleh World Bank. Metode perbandingan relatif yang dimaksud adalah interpretasi hasil yang didasarkan pada perbandingan relatif dari capaian skor antar sub-bidang strategis dalam setiap bidang strategis.

Metode pengkategorian adalah interpretasi hasil yang mengacu pada standar Bank Dunia dengan pemberian nilai sebagai berikut:

80 – 100	kategori sempurna/dapat diterima sepenuhnya
60 - 79	kategori sangat baik
40 - 59	kategori baik
20 - 39	kategori sedang/cukup
0 - 19	kategori kurang/tidak dapat diterima

Beberapa laporan studi PERA menggunakan metode perbandingan relatif dan beberapa lainnya menggunakan metode yang dikembangkan Bank Dunia.

## Data Non-Fiskal

Data non-fiskal digunakan untuk menganalisis Bab I Pendahuluan terkait dengan gambaran umum perekonomian kabupaten meliputi kinerja makro ekonomi dan pembangunan sosial; Bab V Analisis Sektor Strategis meliputi kinerja *output* dan *outcome* sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian; Bab VI Analisis Isu Lokal meliputi isu kemiskinan, isu gender, isu HIV/AIDS, dan Otonomi Khusus.

Seluruh data non-fiskal dipeoleh dari publikasi BPS seperti Daerah Dalam Angka, Statistik Daerah, Indikator Kesejahteraan Sosial, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Hasil Sensus Penduduk 2010, dll. Beberapa data teknis-sektoral diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA diperoleh dari Bappeda, dan SKPD terkait dengan sektor strategis.

Seluruh data non-fiskal dianalisis dengan menggunakan model analisis statistik-deskriptif untuk series 2007-2011 kecuali untuk Bab II Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM) dan data isu lokal terutama terkait dengan isu gender, dan HIV/AIDS (dianalisis sesuai dengan ketersediaan data).